

**REDESAIN GEDUNG DPRD
KABUPATEN PIDIE
DENGAN PENDEKATAN NEO-VERNAKULAR**



LAPORAN TUGAS AKHIR

DISUSUN OLEH:

ADIL MUWAFFAQ (170701016)

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR FAKULTAS SAINS
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

RE-DESAIN GEDUNG DPRD KABUPATEN PIDIE

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Arsitektur

Oleh

ADIL MUWAFFAQ

NIM. 170701016

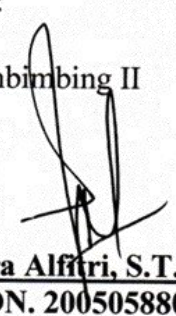
Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi Arsitektur

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Donny Arief Sumarto, S.T., M.T. IAI
NIDN. 1310048201

Pembimbing II


Mira Alfatri, S.T., M.Ars
NIDN. 2005058803

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

RE-DESAIN GEDUNG DPRD KABUPATEN PIDIE

TUGAS AKHIR

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Dalam Ilmu
Arsitektur

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022

21 Dzulhijjah 1443 H

Panitia Ujian Munaqasyah Tugas Akhir

Ketua

Sekretaris

Donny Arief Sumarto, S.T.,M.T.IAI

Mira Alfari, S.T.,M.Ars

NIDN. 1310048201

NIDN. 2005058803

Penguji I

Penguji II

T. Eka Panny Hadinata, S.T.,M.T

Marisa Hairina, S.T.,M.T

NIDN. 1307088701

NIDN. 1308038803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Azhar Amsal, M.Pd

NIDN. 2001066802

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adil Muwaffaq
NIM : 170701016
Program Studi Fakultas : Arsitektur Sains dan Teknologi
Judul Skripsi : Redesain gedung DPRD Kabupaten Pidie.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan,
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya ilmiah orang lain,
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,

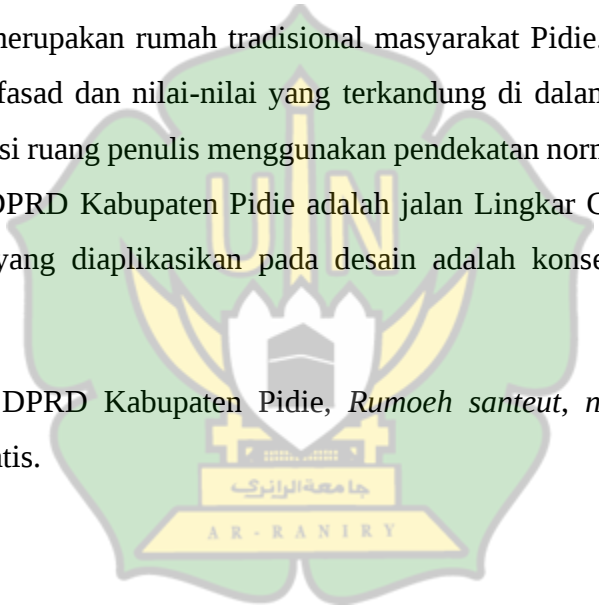


Adil Muwaffaq

ABSTRAK

Kurangnya kapasitas ruang dalam dan ruang luar membuat fungsi Gedung DPRD Kabupaten Pidie menjadi tidak maksimal. Bentuk Gedung DPRD Kabupaten Pidie yang belum menampilkan nilai kedaerahan dan identitas membuat bangunan tersebut tidak memiliki nilai lebih dibandingkan bangunan-bangunan lainnya. Perancangan Gedung DPRD Kabupaten Pidie yang baru ini bertujuan untuk membuat bangunan kantor DPRD Kabupaten Pidie menjadi lebih nyaman dan sesuai dengan standar bangunan perkantoran. Perancangan ini juga bertujuan menjadikan arsitektur di Kabupaten Pidie menjadi lebih berkembang dan memiliki nilai-nilai adat dan budaya di dalamnya. Untuk mewujudkan bangunan yang sesuai dengan standar tersebut penulis menerapkan pendekatan tema arsitektur *Neo vernakular*. Konsep yang diterapkan pada perancangan nantinya adalah konsep yang mengambil bentuk dan nilai dari *rumoeh santeut* yang merupakan rumah tradisional masyarakat Pidie. Perapapan dari *rumoeh santeut* adalah bentuk fasad dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk menjawab masalah lahan dan fungsi ruang penulis menggunakan pendekatan normatif fungsional. Lokasi perancangan Gedung DPRD Kabupaten Pidie adalah jalan Lingkar Cot Teungoh, Keuniree, Pidie, Aceh. Konsep yang diaplikasikan pada desain adalah konsep analogi dan konsep pragmatis.

Kata kunci: Gedung DPRD Kabupaten Pidie, *Rumoeh santeut*, *neo vernakular*, konsep analogi, konsep pragmatis.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan tugas akhir dengan judul **“Perancangan Gedung DPRD Kabupaten Pidie”** dengan tepat waktu guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan pada Prodi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Banyak rintangan dan hambatan yang terjadi dalam proses penyusunannya, namun berkat kehendaknya dan bantuan kerabat terdekat sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan laporan ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu menyelesaikan penyusunan laporan ini, yaitu kepada:

1. Orang tua yang sangat penulis cintai yang telah mendukung dan mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan seminar ini dengan baik.
2. Ketua Prodi Arsitektur Bapak Rusydi, ST. MPd.
3. Dosen Pembimbing Bapak Donny Arief Sumarto, S.T.,M.T. dan Ibu Mira Alfitri, S.T.,M.Ars terima kasih telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
4. Keluarga (Ridha Musafirah, Ulfah Munirah, Zufar Mubarak, Ufaira mufidah, Raisa Mujahidah, & Athoyya Mumtazah) dan sahabat saya (Muhammad Fathin Azka).

Penyusunan laporan ini berdasarkan hasil survei lokasi dan observasi penulis terkait dengan perancangan Gedung DPRD kabupaten serta berdasarkan teori dan studi literatur yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan. Semoga laporan tugas akhir ini dapat berguna bagi mahasiswa arsitektur khususnya dan kepada seluruh masyarakat yang ingin mempelajari tentang arsitektur pada umumnya. Apabila dalam penulisan ini terdapat kesalahan, baik dari segi penulisan maupun penyusunan kata-kata, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Banda Aceh, 20 Juli 2022
Penulis

Adil Muwaffaq
(170701016)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Perancangan.....	6
1.3 Tujuan Perancangan	6
1.4 Pendekatan	6
1.5 Metode.....	6
1.6 Batasan Perancangan.....	7
1.7 Kerangka Berpikir	8
1.8 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II.....	10
TINJAUAN UMUM.....	10
2.1 Tinjauan Umum Objek Perancangan	10
2.1.1 DPRD.....	10
2.1.2 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota	11
2.1.3 Kegiatan Dewan.....	12
2.1.4 Wewenang & Fungsi DPRD	12
2.2 Tinjauan Umum.....	15
2.2.1 Kriteria Pemilihan Lahan	15

2.2.2	Alternatif Lokasi	15
2.2.3	Analisis Aspek Potensi dan Masalah Lokasi	19
2.2.4	Analisis Kriteria Lahan	20
2.2.5	Lokasi Perancangan	22
2.3	Studi Banding Bangunan Sejenis	24
2.3.1	Gedung Parlemen Berlin (Bundesrat), Jerman	24
2.3.2	Gedung Parlemen Malta, Velletra.....	25
2.3.3	<i>Sarawak State Legislative Assembly</i> (Gedung Dewan Serawak), Malaysia.....	28
2.4	Kesimpulan Studi Banding Objek Perancangan Sejenis.....	29
BAB III		31
ELABORASI TEMA.....		31
3.1	<i>Neo-Vernakular</i>	31
3.2	Kriteria Arsitektur <i>Neo Vernakular</i>	31
3.3	Ciri-ciri Arsitektur <i>Neo Vernakular</i>	32
3.4	Prinsip-prinsip Arsitektur <i>Neo Vernakular</i>	32
3.5	Tinjauan Arsitektur <i>Neo Vernakular</i>	33
3.6	Studi Banding Bangunan Dengan Tema Sejenis	34
3.6.1	Istana Budaya Malaysia	34
3.6.2	<i>Asasuka Culture Tourism Information Center (ACTIC)</i>	36
3.6.3	Masjid Raya Sumatera Barat	39
3.6.4	Kesimpulan	39
BAB IV		41
ANALISIS		41
4.1	Analisis Site Terpilih.....	41
4.2	Kondisi Eksisting	42
4.2.1	Hidrologi (Air)	42
4.2.2	Vegetasi.....	43

4.2.3	Prasarana Penunjang Perancangan Gedung DPRD Kabupaten Pidie.....	43
4.2.4	Sosial Budaya.....	43
4.3	Analisis Tapak.....	44
4.3.1	Analisis Keamanan	44
4.3.2	Analisis Klimatologi	46
4.3.3	Analisis Kontur	50
4.3.4	Analisis Kebisingan	51
4.3.5	Analisis Sirkulasi	53
4.4	Analisis Fungsional	55
4.4.1	Pendekatan Fungsi	55
4.4.2	Pendekatan Perilaku Kegiatan	55
4.4.3	Pendekatan Kebutuhan Ruang	56
4.4.4	Pendekatan Kapasitas Ruang	59
4.5	Penzoningsan	61
4.6	Pendekatan Besaran Ruang	61
BAB V		65
PENERAPAN KONSEP		65
5.1	Konsep Dasar	65
5.2	Rencana Tapak	66
5.2.1	Konsep Pemintakatan.....	66
5.2.2	Sirkulasi dan Parkir.....	67
5.3	Konsep Bangunan dan Gubahan Massa	68
5.3.1	Konsep Massa Bangunan.....	68
5.3.2	Gubahan Massa.....	70
5.4	Konsep Ruang Dalam.....	70
5.5	Konsep Ruang Luar (Lanskap)	75
5.5.1	Elemen Keras	75

5.5.2	Elemen Lunak	77
5.6	Konsep Struktur, Konstruksi dan Utilitas	79
5.6.1	Struktur Bawah (<i>Lower Structure</i>).....	79
5.6.2	Struktur Atas (<i>Upper Structure</i>)	79
5.6.3	Struktur Atap.....	80
5.7	Konsep Utilitas.....	81
5.7.1	Sistem Plumbing	81
5.7.2	Sistem Jaringan Listrik	82
5.7.3	Sistem Pemadam Kebakaran.....	82
5.7.4	Sistem Keamanan.....	83
BAB VI		84
GAMBAR RENCANA		84
6.1	Gambar Arsitektural.....	84
6.1.1	<i>Layout Plan</i> Lt. Dasar.....	84
6.1.2	<i>Site plan</i>	84
6.1.3	<i>Layout Plan</i>	85
6.1.4	Denah <i>Ground Floor</i>	85
6.1.5	Denah Lt. 1.....	86
6.1.6	Denah Lt. 2.....	86
6.1.7	Denah Lt. 3.....	87
6.1.8	Tampak Depan.....	87
6.1.9	Tampak Belakang	88
6.1.10	Tampak Kanan	88
6.1.11	Tampak Kiri.....	89
6.1.12	Potongan A-A	89
6.1.13	Potongan B-B.....	90
6.2	Gambar Struktural.....	90

6.2.1	Rencana Denah Pondasi.....	90
6.2.2	Rencana Kolom Lantai Dasar	91
6.2.3	Rencana Kolom Lantai 1	91
6.2.4	Rencana Kolom Lantai 2	92
6.2.5	Rencana Kolom Lantai 3	92
6.2.6	Rencana Balok Lantai 1	93
6.2.7	Rencana Balok Lantai 2	93
6.2.8	Rencana Balok Lantai 3	94
6.2.9	Rencana Ring Balok	94
6.2.10	Potongan Kawasan.....	95
6.2.11	Denah Pondasi	95
6.2.12	Rencana Atap	96
6.2.13	Detail Ornamen.....	96
6.2.14	Detail <i>Facade</i>	97
6.2.15	Rencana Sloof	97
6.2.16	Detail Struktural & Tabel Penulangan.....	98
6.3	Gambar <i>Utilitas</i>	98
6.3.1	Utilitas Kawasan	98
6.3.2	Denah Utilitas Air Bersih <i>Ground Floor</i>	99
6.3.3	Denah Utilitas Air Bersih Lantai 1	99
6.3.4	Denah Utilitas Air Bersih Lantai 2	100
6.3.5	Denah Utilitas Air Bersih Lantai 3	100
6.3.6	Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran <i>Ground Floor</i>	101
6.3.7	Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai 1	101
6.3.8	Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai 2	102
6.3.9	Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai 3	102
6.3.10	Denah Elektrikal Lampu <i>Ground floor</i>	103

6.3.11	Denah Elektrikal Lampu Lantai 1.....	103
6.3.12	Denah Elektrikal Lampu Lantai 2.....	104
6.3.13	Denah Elektrikal lantai 3	104
6.3.14	Denah Rencana Proteksi Kebakaran <i>Ground Floor</i>	105
6.3.15	Denah Proteksi Kebakaran Lantai 1	105
6.3.16	Denah Proteksi Kebakaran Lantai 2	106
6.3.17	Denah Proteksi Kebakaran Lantai 3	106
6.4	Render Eksterior & Interior.....	107
6.4.1	Render Exterior.....	107
6.4.2	Render Interior	109
DAFTAR PUSTAKA		113



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1: Kondisi ruang dalam yang kotor dan tidak terawat pada Gedung DPRD Pidie ..3	
Gambar 1. 2: Kondisi pada area bawah tangga Gedung DPRD Pidie yang tidak terawat3	
Gambar 1. 3: Kondisi ruang fraksi yang digabung dengan ruang komisi pada Gedung DPRD Pidie3	
Gambar 1. 4: Kondisi lahan parkir DPRD Pidie.....4	
Gambar 1. 5: Tampak depan Gedung DPRD Pidie4	
Gambar 1. 6: Bentuk Gedung DPRD Lampung yang menerapkan identitas daerah kedalam bangunan5	
Gambar 1. 7 : Bentuk Gedung DPRD Kalimantan selatan yang terinspirasi dari bentuk rumah baanjang gajah baliku5	
Gambar 2. 1: Letak lokasi alternatif15	
Gambar 2. 2: Alternatif Site Pertama.....16	
Gambar 2. 3: Alternatif Site Kedua17	
Gambar 2. 4: Alternatif Site ketiga.....18	
Gambar 2. 5: Peta Aceh22	
Gambar 2. 6: Peta Pidie22	
Gambar 2. 7: Lokasi Site22	
Gambar 2. 8: Lokasi Site23	
Gambar 2. 9: Gedung Parlemen Berlin.....24	
Gambar 2. 10: Axonometri penempatan ruang pleno24	
Gambar 2. 11: Ruang sidang pleno bundesrat25	
Gambar 2. 12: Denah Gedung Parlemen Malta26	
Gambar 2. 13: Denah lantai dasar dan lantai 1 Gedung Parlemen Malta27	
Gambar 2. 14: Ruang sidang gedung parlemen valletta28	
Gambar 2. 16: Gedung Dewan Sarawak.....29	
Gambar 2. 15: ruang pleno Sarawak, Malaysia.29	
Gambar 2. 18: Skema zonasi gedung dewan Vellela, Malta30	
Gambar 2. 19: Skema zonasi gedung dewan Bundesrat, Berlin.30	
Gambar 2. 17: Skema zonasi gedung dewan Serawak, Malaysia.30	
Gambar 3. 1: Gedung istana budaya malaysia.....34	
Gambar 3. 2: Pola ukiran bunga betel pada potongan istana budaya malaysia35	

Gambar 3. 3: Bentuk layout gedung istana budaya malaysia	35
Gambar 3. 4: Fungsi Ruang Asakusa Culture Tourist Information Center	37
Gambar 3. 5: Konsep Bentuk Bangunan Asakusa Culture Tourist Information Center.....	37
Gambar 3. 6: Konsep Bentuk Bangunan Asakusa Culture Tourist Information Center.....	38
Gambar 3. 7: Konsep Material Bangunan Asakusa Culture Tourist Information Center.....	38
Gambar 3. 8: Masjid Raya Sumatera Barat	39
Gambar 4. 1: Site terpilih.....	41
Gambar 4. 2: Analisis air	42
Gambar 4. 3: Analisis vegetasi	43
Gambar 4. 4: Kondisi sirkulasi jalan di sekitar lokasi	44
Gambar 4. 5: Kondisi sirkulasi jalan di sekitar lokasi saat demo	45
Gambar 4. 6: Kondisi sirkulasi jalan di sekitar lokasi saat kedatangan tamu.....	45
Gambar 4. 7: Analisis sistem pertahanan pada bangunan.....	46
Gambar 4. 8: Data curah hujan Kabupaten Pidie.....	47
Gambar 4. 9: Skema sumur resapan	47
Gambar 4. 10: Jarak lokasi site ke garis pantai.....	48
Gambar 4. 11: Data kecepatan angin dan arah angin Kab Pidie.....	48
Gambar 4. 12: Ilustrasi arah angin.....	49
Gambar 4. 13: Ilustrasi arah angin.....	49
Gambar 4. 14: Ilustrasi tanggapan arah angin	50
Gambar 4.15: Keadaan kontur pada site	50
Gambar 4. 16: Analisis kebisingan	51
Gambar 4. 17: Tingkat kebisingan tapak	51
Gambar 4. 18: Analisis tanggapan bangunan terhadap kebisingan	52
Gambar 4. 19: Analisis sirkulasi pada site	53
Gambar 4. 20: Tanggapan sirkulasi alternatif 2.....	54
Gambar 4. 21: Tanggapan sirkulasi alternatif 1	55
Gambar 5. 1: Zonasi Pemintakan.....	67
Gambar 5. 2: Sirkulasi dan parkir	67
Gambar 5. 3: Fasade rumoeh santeut	68
Gambar 5. 4: Konsep massa bangunan gedung DPRD Pidie	69
Gambar 5. 5: Atap rumoeh santeut	69
Gambar 5. 6: Gubahan massa bangunan gedung DPRD Pidie	70
Gambar 5. 7: Ilustrasi furniture ruang dalam.....	71

Gambar 5. 8: Ilustrasi kursi ruang sidang	72
Gambar 5. 9: Ilustrasi konsep warna.....	72
Gambar 5. 10: Ilustrasi konsep kaca pada ruangan.....	73
Gambar 5. 11: Ilustrasi roller sollar shades	73
Gambar 5. 12: Ornament khas Aceh yang diterapkan pada ruang dalam.....	74
Gambar 5. 13: Ornament khas Aceh yang diterapkan pada ruang dalam.....	74
Gambar 5. 14: Paving block.....	75
Gambar 5. 15: Guiding block.....	76
Gambar 5. 16: Ramp	76
Gambar 5. 17: Ilustrasi sumur resapan	77
Gambar 5. 18: Ilustrasi bangku.....	77
Gambar 5. 19: Pohon cempaka yang merupakan tumbuhan khas Aceh.....	78
Gambar 5. 20: Pohon melinjo yang merupakan tumbuhan khas Pidie	78
Gambar 5. 21: Pondasi tiang pancang.....	79
Gambar 5. 22: Atap pelana	80
Gambar 5. 23: Atap dak.....	80
Gambar 5. 24: Ilustrasi jaringan air bersih	81
Gambar 5. 25: Skema jaringan listrik.....	82
Gambar 5. 26: Skema pemadam kebakaran.....	82
Gambar 5. 27: Sistem keamanan	83
Gambar 6.1: Layout Plan Lt. 1.....	84
Gambar 6.2: <i>Site Plan</i>	84
Gambar 6.3: <i>Layout Plan</i>	85
Gambar 6.4: Denah <i>Ground Floor</i>	85
Gambar 6.5: Denah Lt. 1.....	86
Gambar 6.6: Denah Lt. 2.....	86
Gambar 6.7: Denah Lt. 3.....	87
Gambar 6.8: Tampak Depan	87
Gambar 6.9: Tampak Belakang	88
Gambar 6.10: Tampak Kanan	88
Gambar 6.11: Tampak Kiri	89
Gambar 6.12: Potongan B-B.....	89
Gambar 6.13: Potongan B-B.....	90
Gambar 6.14: Rencana Denah Pondasi.....	90

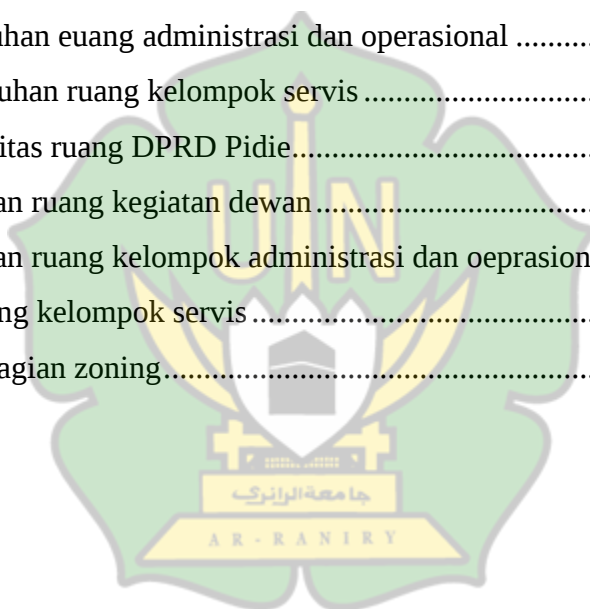
Gambar 6.15: Rencana Kolom Lantai Dasar	91
Gambar 6.16: Rencana Kolom Lantai 1	91
Gambar 6.17: Rencana Kolom Lantai 2	92
Gambar 6.18: Rencana Kolom Lantai 3	92
Gambar 6.19: Rencana Balok Lantai 1	93
Gambar 6.20: Rencana Balok Lantai 2	93
Gambar 6.21: Rencana Balok Lantai 3	94
Gambar 6.22: Rencana Ring Balok	94
Gambar 6.23: Potongan Kawasan.....	95
Gambar 6.24: Denah Pondasi	95
Gambar 6.25: Rencana Atap	96
Gambar 6.26: Detail Ornamen.....	96
Gambar 6.27: Detail <i>Facade</i>	97
Gambar 6.28: Rencana Sloof	97
Gambar 6.29: Detail Struktural & Tabel Penulangan.....	98
Gambar 6.30: Utilitas Kawasan	98
Gambar 6.31: Denah Utilitas Air Bersih <i>Ground Floor</i>	99
Gambar 6.32: Denah Utilitas Air Bersih Lantai 1	99
Gambar 6.33: Denah <i>Utilitas</i> Air Bersih Lantai 2	100
Gambar 6.34: Denah Utilitas Air Bersih Lantai 3	100
Gambar 6.35: Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai <i>Ground Floor</i>	101
Gambar 6.36: Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai 1	101
Gambar 6.37: Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai 2	102
Gambar 6.38: Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai 2	102
Gambar 6.39: Denah Elektrikal Lampu <i>Ground Floor</i>	103
Gambar 6.40: Denah Elektrikal Lampu Lantai 1	103
Gambar 6.41: Denah Elektrikal Lampu Lantai 2	104
Gambar 6.42: Denah Elektrikal Lampu Lantai 3	104
Gambar 6.43: Denah Proteksi Kebakaran <i>Ground Floor</i>	105
Gambar 6.44: Denah Proteksi Kebakaran Lantai 1	105
Gambar 6.45: Denah Proteksi Kebakaran Lantai 2	106
Gambar 6.46: Denah Proteksi Kebakaran Lantai 3	106
Gambar 6.47: Render Exterior Depan	107
Gambar 6.48: Render Exterior Samping Kanan	107

Gambar 6.49: Render Exterior Belakang.....	108
Gambar 6.50: Render Exterior Samping Kiri	108
Gambar 6.51: Render Exterior Kawasan	109
Gambar 6.52: Render Interior Lobby.....	109
Gambar 6.53: Render Interior Ruang Pembahasan.....	110
Gambar 6.54: Render Interior Ruang Pimpinan	110
Gambar 6.55: Render Interior Ruang Pleno	111
Gambar 6.56: Render Interior Ruang Tamu	111
Gambar 6.57: Render Interior Ruang Banmus	112



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 : Standar besaran ruang bangunan kenegaraan	11
Tabel 2. 2 : Tabel keterangan alternatif site pertama	16
Tabel 2. 3: Tabel keterangan alternatif site kedua	17
Tabel 2. 4 : tabel keterangan alternatif site ketiga	18
Tabel 2. 5: Analisis kriteria lahan	20
Tabel 2. 6: Tabel keterangan site terpilih.....	23
Tabel 3. 1: Tabel perbandingan arsitektur, tradisional, vernakular, dan neo vernakular.....	33
Tabel 4. 1: Informasi tapak	41
Tabel 4. 2: Tabel analisis SWOT lokasi terpilih.....	42
Tabel 4. 3 Tabel kegiatan tugas dewan	56
Tabel 4. 4 Tabel kebutuhan euang administrasi dan operasional	57
Tabel 4. 5: Tabel kebutuhan ruang kelompok servis	58
Tabel 4. 6: Tabel kapasitas ruang DPRD Pidie.....	59
Tabel 4. 7: Tabel besaran ruang kegiatan dewan	61
Tabel 4. 8: Tabel besaran ruang kelompok administrasi dan oeprasional dewan.....	62
Tabel 4. 9: Besaran ruang kelompok servis	63
Tabel 5. 1: Tabel pembagian zoning.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pidie adalah sebuah kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli. Sejak 5 tahun terakhir Pemerintah Pidie mulai mengembangkan bidang arsitektur, hal ini dapat dilihat dari beberapa bangunan baru di Pidie yang mulai dibangun. Diantaranya adalah pembangunan *Islamic center* Kabupaten Pidie, pembangunan Gedung Pidie *Convention Center*, perencanaan pembangunan Tugu Melinjo dan masih ada beberapa perencanaan lainnya. Dari beberapa perencanaan tersebut Gedung DPRD menjadi salah satu isu yang akan diredesain oleh Pemerintah Pidie.

Gedung DPRD Pidie harus diredesain karena ada beberapa faktor. Diantaranya adalah karena lahan yang tidak cukup luas sehingga menyebabkan pola sirkulasi menjadi tidak teratur. kekurangan ruangan dalam sehingga menyebabkan fungsi ruang menjadi tidak efektif. Bentuk langgam bangunan yang umum. Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pidie Bapak Mahfuddin Ismail, S.Pdi (Mahfuddin Ismail, 2021) dalam wawancara dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa bangunan yang sekarang kondisinya seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Gedung Anggota Dewan merupakan salah satu bangunan yang penting sehingga harus benar-benar diperhatikan kelayakannya. Kenyamanan dan kelayakan sebuah gedung dapat ditinjau dari aspek kebersihan lingkungan, keamanan, ketertiban, kecukupan ruang, fungsi ruang, serta tampilan interior dan eksterior bangunan sehingga setiap pengguna gedung mendapatkan haknya dengan baik. Dalam Qanun Pemerintah Kabupaten Pidie nomor 6 tahun 2015 pada poin a berbunyi bahwa “Penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif serta bangunan gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya” (Qanun Kabupaten Pidie, 2015) dari bunyi Qanun tersebut menjelaskan bahwa bangunan harus sesuai dengan fungsi, kemudian nyaman dan aman bagi pengguna yang menggunakan gedung dan juga ramah terhadap lingkungan. Kemudian pada pasal 26 Qanun Pemerintah Kabupaten Pidie tentang persyaratan arsitektur juga dijelaskan bahwa “Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur

dan rekayasa”(Qanun Kabupaten Pidie, 2015) dari dua bunyi pasal di atas sangat menjelaskan bahwa bangunan Gedung DPRD Kabupaten Pidie sangat layak untuk diredesain karena pada keamanan dan kenyamanan tidak memadai sebagai sebuah gedung yang sesuai standar dalam Qanun kabupaten pidie tahun 2015. Kemudian dari segi bentuk bangunan juga tidak mewakili nilai-nilai adat tradisional kabupaten Pidie.

Berikut adalah faktor yang menjadi alasan kenapa Gedung DPRD Kabupaten Pidie harus diredesain:

a. Kapasitas ruang luar dan ruang dalam

Lahan parkir pada Gedung DPRD Kabupaten Pidie yang lama sangat tidak memadai, seringkali ketika diadakan rapat atau pertemuan mobil-mobil harus diparkir di gedung sebelah (Gedung Pertemuan) dan di depan Masjid Bulog karena kurangnya tempat parkir di Gedung DPRD Kabupaten Pidie. Masalah lahan parkir ini juga dapat membuat sirkulasi pada lahan parkir mejadi terganggu sehingga kenyamanan dan keamanan dapat terganggu. Kondisi lahan pada Gedung DPRD juga sangat terbatas karena gedung tersebut berada pada lokasi yang padat. pada sisi samping dan belakang lokasi sudah ada bangunan lain sehingga tidak memungkinkan untuk perluasan lahan.

Masalah lainnya dari gedung ini adalah kekurangan ruang dalam, padahal ruang menjadi sarana paling penting untuk kenyamanan kerja sehingga pekerjaan yang dikerjakan menjadi efektif. Menurut penuturan salah seorang mantan Anggota Dewan ibu Siti Hawa. Beliau mengatakan bahwa terdapat ruang yang seharusnya terpisah digabung fungsinya menjadi satu karena faktor dari kurangnya ruangan pada Gedung DPRD Kabupaten Pidie. Anggota Dewan lainnya yaitu Sayuti juga membenarkan bahwa Gedung DPRD yang sekarang masih belum layak “di dalam gedung dewan tidak ada Pustaka dan ruang tamu. Di gedung dewan ruang komisi dan fraksi juga terbatas. Pada pembahasan anggaran dengan sistem Pokja tapi dalam ruang yang sama, ini menandakan bahwa ruang tidak cukup” papar Sayuti(Riza, 2020). Keadaan beberapa ruang dalam gedung juga sangat memprihatinkan, ruang-ruang tersebut seperti tidak terawat dan terkesan kumuh.



Gambar 1. 3: Kondisi ruang fraksi yang digabung dengan ruang komisi pada Gedung DPRD Pidie
Sumber: dokumen pribadi



Gambar 1. 2: Kondisi pada area bawah tangga Gedung DPRD Pidie yang tidak terawat
Sumber: dokumen pribadi



Gambar 1. 1: Kondisi ruang dalam yang kotor dan tidak terawat pada Gedung DPRD Pidie
Sumber: dokumen pribadi



Gambar 1. 4: Kondisi lahan parkir DPRD Pidie
Sumber: dokumen pribadi

b. Langgam bangunan yang sangat umum

Permasalahan lain dari gedung lama adalah langgam bangunan yang sangat umum dan tidak terlalu merepresentasikan nilai-nilai budaya dari Aceh dan Pidie. Gedung DPRD Kabupaten Pidie terlihat seperti bangunan kebanyakan (bangunan tua) dengan bentuk atap, jendela, dan tampak yang terlihat seperti bangunan dengan langgam kontemporer. Dengan menerapkan identitas kedaerahan dapat membuat bangunan menjadi lebih mudah untuk dikenali dan juga dapat menjadi identitas bagi daerah tersebut. Berikut adalah dua contoh bangunan Gedung DPRD yang telah menerapkan identitas lokal ke dalam bangunan. Yang pertama ada Gedung DPRD Lampung yang menerapkan bentuk dari rumah adat Lampung yaitu rumah *nowou sesat*. Kemudian contoh kedua adalah Gedung DPRD Kalimantan selatan yang terinspirasi dari rumah *baanjung gajah baliku* yang merupakan salah satu rumah adat di Kalimantan selatan.



Gambar 1. 5: Tampak depan Gedung DPRD Pidie
Sumber: dokumen pribadi



Gambar 1. 6: Bentuk Gedung DPRD Lampung yang menerapkan identitas daerah kedalam bangunan

Sumber: apahabar.com



Gambar 1. 7 : Bentuk Gedung DPRD Kalimantan selatan yang terinspirasi dari bentuk rumah *baanjang gajah baliku*

Sumber:

Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pidie yang menjadi gedung pemerintahan yang baru di Pidie ini tentu menjadi suatu perencanaan yang tidak mudah karena di dalamnya akan menyangkut banyak kepentingan yang bertujuan untuk memajukan perkembangan kota. Oleh karena itu kehadiran gedung baru harapannya dapat menjawab permasalahan-permasalahan dari gedung lama. Selain isu-isu utama tadi, bangunan ini nantinya juga bisa menjawab problem dari isu-isu lainnya dari sebuah bangunan dewan seperti lahan untuk demo, meja dan kursi yang didesain sedemikian rupa agar tidak rusak saat rapat paripurna berlangsung dan beberapa problem lainnya. Secara simbolik gedung DPRD harus memiliki keterkaitan karakteristik dengan masyarakat. sehingga dengan menghadirkan pendekatan neo vernakular dapat memunculkan nuansa-nuansa lokal dan budaya yang mempererat hubungan gedung ini dengan masyarakat Pidie. Dengan perancangan Gedung DPRD ini diharapkan juga mampu mempertegas identitas dari Kabupaten Pidie sehingga gedung ini nantinya menjadi citra baru bagi karya arsitektur bangunan Aceh, terutama bangunan di Kabupaten Pidie.

1.2 Masalah Perancangan

1. Bagaimana mendesain Gedung DPRD Kabupaten Pidie yang sesuai dengan kapasitas dan fasilitas bangunan standar DPRD?
2. Bagaimana cara mewujudkan Gedung DPRD Kabupaten Pidie menjadi salah satu bangunan yang memiliki nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya kedaerahan?

1.3 Tujuan Perancangan

1. Mendesain Gedung DPRD Kabupaten Pidie yang sesuai dengan kapasitas dan fasilitas bangunan standar DPRD.
2. Menjadikan Gedung DPRD Kabupaten Pidie sebagai salah satu bangunan yang memiliki nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya kedaerahan.

1.4 Pendekatan

Gedung DPRD Kabupaten Pidie merupakan gedung pemerintahan sehingga bangunannya harus mewakili nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya kedaerahan. Dalam konteks ini karena yang dibangun adalah Gedung DPRD Kabupaten Pidie yang berada dalam Provinsi Aceh, maka pendekatan desain juga harus mewakili identitas Aceh dan Pidie. Karena berbicara masalah identitas maka penulis akan melakukan pendekatan neo vernakular, normatif fungsional dan studi literatur budaya terkait nilai adat/tradisional sosial budaya Kabupaten Pidie sehingga pada tahap perancangan nantinya dapat menjadi bangunan yang merepresentasikan Kabupaten Pidie.

1.5 Metode

Beberapa metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

- a. Studi literatur yaitu dengan cara mempelajari permasalahan serta pemecahan masalah berdasarkan referensi–referensi seperti buku panduan, standar bangunan maupun standar keselamatan pada bangunan sesuai dengan fungsi dan kelayakannya.
- b. Metode preseden dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fungsi bangunan yang memiliki kesamaan dalam perancangan bangunan sejenis maupun tema dalam perancangan ini yang diambil dari berbagai sumber seperti internet, buku bacaan, media cetak lainnya dan sumber – sumber yang dianggap perlu.
- c. Survey lapangan dengan melihat kondisi eksisting setempat baik potensi maupun masalah yang ada pada lingkungan sekitar.

- d. Mendapatkan informasi dari instansi–instansi terkait untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung kelayakan studi proyek, baik dengan instansi pemerintah maupun swasta.

1.6 Batasan Perancangan

1. Merancang bangunan DPRD yang sesuai dengan standar kapasitas dan fasilitas bangunan DPRD yang mengacu pada studi preseden.
2. Batasan pendekatan pada nilai-nilai adat/tradisional pada rumah tradisional Pidie.
3. Mengacu pada peraturan daerah setempat.



1.7 Kerangka Berpikir



1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai pokok permasalahan yang menjadi latar belakang perancangan Gedung DPRD Kabupaten Pidie, ruang lingkup pembahasan, tujuan, manfaat, dan pokok – pokok dari bab – bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan objek perancangan, macam, jenis dan tipe objek perancangan, persyaratan – persyaratan objek perancangan, peraturan – peraturan, studi banding objek perancangan yang sudah ada atau bangunan serupa dengan objek perancangan.

BAB III ELABORASI TEMA

Membahas tentang tema yang akan diterapkan pada perancangan Gedung DPRD Kabupaten Pidie, penerapan – penerapan yang sesuai dengan tema, studi banding tema sejenis serta penerapan yang sesuai dengan tema.

BAB IV ANALISIS

Membahas analisis pelaku kegiatan, kebutuhan ruang, studi besaran ruang, organisasi kegiatan, dan analisis – analisis pada tapak.

BAB V PENERAPAN KONSEP

Membahas konsep yang diterapkan pada perancangan arsitektur yang dibutuhkan oleh Gedung DPRD Kabupaten Pidie, konsep interior, konsep struktur, utilitas bangunan dan konsep lansekap.

DAFTAR PUSTAKA

Meliputi daftar referensi, sumber atau rujukan yang diambil atau yang benar-benar digunakan sebagai acuan penulisan laporan seminar.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Objek Perancangan

2.1.1 DPRD

DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. pada perancangan ini yang dirancang adalah DPRD kabupaten/kota. Pasal 341 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa DPRD kabupaten/Kota diisi oleh Anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang terpilih melalui pemilihan umum dan Pasal 342 menegaskan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berstatus sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten/Kota(DPR-RI, 2009).

Menurut Permen PU No.45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN),

1. Standar luas Gedung bangunan Gedung negara

Dalam menghitung luas ruang bangunan Gedung kantor yang diperlukan, dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana rata-rata sebesar $9,6 \text{ m}^2/\text{personil}$.
- b. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar $10 \text{ m}^2/\text{personil}$
- c. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang) di luar luas ruangan seluruh personil yang akan ditampung(Permen PU, 2007).

Berikut adalah tabel standar besaran ruang gedung kenegaraan:

Tabel 2. 1 : Standar besaran ruang bangunan kenegaraan

jabatan	Jenis Ruang							Jumlah
	R.kerja	R.Tamu	R.Rapat	R.Tunggu	R.Staff	R.Istirahat	R.Toilet	
Ketua/wakil Ketua DPRD Kab/kot	30 m ²	20 m ²	36 m ²	25 m ²	9 m ²	9 m ²	6 m ²	135 m ²
Es. II	25 m ²	12 m ²	30 m ²				4 m ²	71 m ²
Es. III	12 m ²	10 m ²	12 m ²					34 m ²
Es. IV	12 m ²	10 m ²						19 m ²
Staff	4 m ²							4 m ²

(sumber: Permen PU no.45,2007)

Adapun berikut adalah beberapa besaran ruang untuk ruang penunjang:

- Ruang rapat : 40 m²
- Ruang arsip : 0.4 m²/orang (pengguna/staff)
- Wc : 2 m²/25 orang
- Musaholla : 0.8 m²/orang (pemakai 20% dari jumlah personil)(Permen PU, 2007).

2.1.2 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Di dalam undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD ditetapkan adalah sebagai berikut:

- jumlah anggota DPR RI adalah 560 orang;
- batas anggota DPRD Provisinsi paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang;
- batas anggota DPRD kab/kota paling minimal 20 dan maksimal 50(DPR-RI, 2008).

Peresmian anggota DPR diresmikan berdasarkan keputusan presiden. Anggota DPR bertempat tinggal di ibukota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang paripurna DPR.

Anggota dewan di Pidie berjumlah 40 orang, hal ini sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UUD 1945 nomor 10 tahun 2008 pasal 26 nomor 2 poin e tentang jumlah Anggota Dewan yang berbunyi “kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi”(UUD 1945, 2008). Diambil dari sumber Badan Pusat Statistik Aceh Jumlah

penduduk di Pidie pada tahun 2019 berjumlah 444.976 jiwa (Badan Pusat Statistik Aceh, 2019).

2.1.3 Kegiatan Dewan

Berdasarkan wawancara saya dengan seorang mantan Anggota Dewan ibu Siti Hawa (Hawa, 2022), beliau adalah mantan Anggota Dewan yang pernah menjabat pada periode 2014-2019. Berikut hasil wawancara saya dengan beliau terkait beberapa agenda/kegiatan pada kantor dewan. Kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sidang Paripurna. sidang ini dilaksanakan Ketika ingin membuka atau menutup suatu pembahasan dewan. Sidang ini dihadiri oleh Bupati dan jajarannya, Anggota Dewan, Kepala Dinas tiap instansi, Camat, dan juga para Wartawan. Rapat ini digelar pada ruang sidang paripurna.
- b) Rapat Pembahasan Anggaran. Rapat ini dilaksanakan setahun satu kali dihadiri oleh perwakilan Anggota Dewan yang bertugas membahas anggaran dan beberapa dinas terkait, serta Tenaga Ahli. Rapat ini seharusnya dilakukan pada ruang pembahasan dewan, namun pada Gedung DPRD Kabupaten Pidie rapat ini dilaksanakan pada ruang Sidang Paripurna.
- c) Rapat Pembahasan Perubahan Anggaran. Rapat ini dilaksanakan setahun sekali dengan dihadiri oleh perwakilan Anggota Dewan yang bertugas membahas perubahan anggaran dan beberapa dinas terkait serta Tenaga Ahli. Rapat ini juga seharusnya dilaksanakan pada Ruang khusus Pembahasan namun pada Gedung DPRD Kabupaten Pidie masih dilaksanakan pada ruang paripurna karena kurangnya ruang.
- d) Pembahasan Legislasi/Qanun dilaksanakan setahun satu kali dan dihadiri oleh perwakilan Anggota Dewan yang bertugas membahas Legislasi/Qanun, Dinas terkait dan Tenaga Ahli.
- e) Rapat fraksi. Dilaksanakan sesuai keadaan (kondisional). Dihadiri oleh 5-25 orang tergantung jumlah anggota dalam satu fraksi.
- f) Rapat komisi. Dilaksanakan sesuai keadaan dan kebutuhan (kondisional). Dihadiri oleh 8 orang dalam satu komisi.
- g) Audiensi. Dilakukan pada saat ada kunjungan dari pihak luar. bisa berupa tamu, masyarakat, dan para pendemo.

2.1.4 Wewenang & Fungsi DPRD

fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang

kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur dan Bupati/Walikota. Bahkan, UU 32/2004 “mewajibkan” Gubernur dan Bupati/Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Perda dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD hanya berperan sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan pada kesempatan tertentu dapat mengajukan Raperda dengan usul dari rancangan sendiri.

Seiring dengan itu, DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a) membentuk Perda yang didiskusikan dengan kepala daerah (Bupati) untuk mencapai persetujuan bersama;
- b) membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah dalam hal ini Bupati Pidie;
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e) memilih Wakil Kepala Daerah ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- f) memberikan pendapat dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pidie;
- i) membentuk panitia pengawas ketika akan diadakan pemilihan Kepala Daerah;
- j) melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah; dan
- k) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah (DPR-RI, 2009).

Dari yang dijelaskan di atas maka secara garis besar fungsi DPRD dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

- a) fungsi pengawasan,
- b) fungsi legislasi,

c) fungsi representasi.

Apa yang diatur dalam Pasal 292 ayat (2) dan Pasal 343 ayat (2) UU 27/2009 mengisyaratkan bahwa DPRD sebenarnya selain berfungsi sebagai pengawasan, dan legislasi DPRD juga berfungsi sebagai representasi.



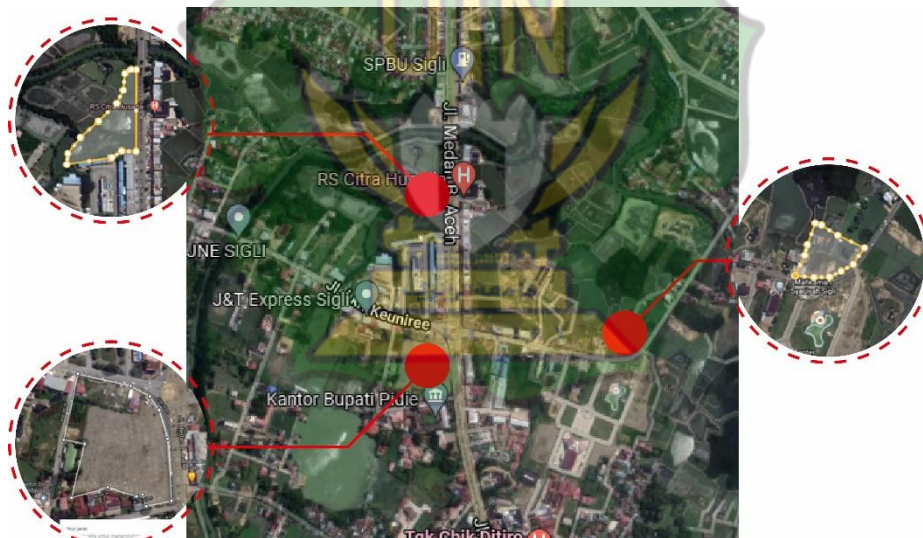
2.2 Tinjauan Umum

2.2.1 Kriteria Pemilihan Lahan

Beberapa faktor yang mempengaruhi faktor penentuan lokasi site perancangan Gedung DPRD Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

- a) perancangan harus menyesuaikan dengan rencana lahan yang diatur dalam peraturan Qanun RTRW Kabupaten Pidie
- b) Lokasi site harus mudah diakses oleh instansi pemerintahan
- c) Lingkungan sekitar lokasi site dapat mendukung/menunjang fungsi dari Gedung DPRD Kabupaten Pidie.
- d) Memerhatikan faktor keamanan di sekitar lokasi
- e) Faktor yang dapat menampilkan identitas bangunan dengan baik.
- f) Faktor ketersediaan lahan yang cukup.

2.2.2 Alternatif Lokasi



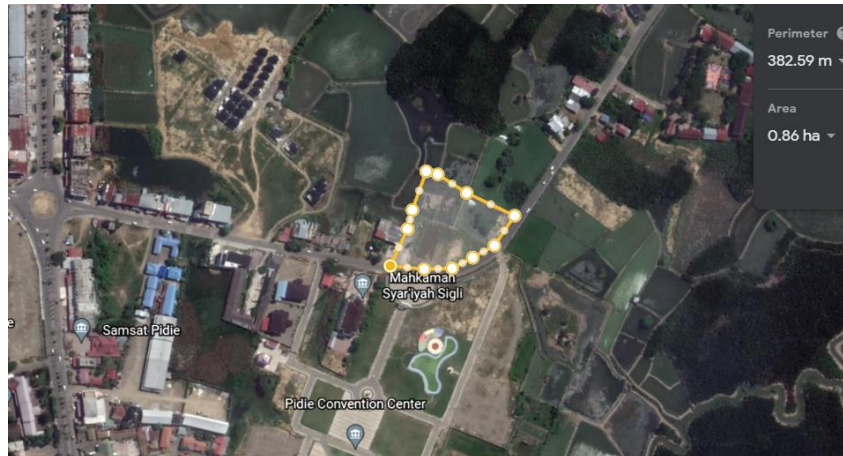
Gambar 2. 1: Letak lokasi alternatif

Sumber: google maps

Berdasarkan faktor dan pertimbangan penentuan lokasi, maka ada 3 alternatif lokasi yang perancangan yang dipilih, ketiga alternatif tersebut adalah :

- a) Lampeude Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh
- b) Jalan Lingkar Cot Teungoh, Keuniree, Pidie, Aceh
- c) Blok sawah, kota sigli, Kabupaten Pidie, Aceh

1. alternatif lokasi site pertama



Gambar 2. 2: Alternatif Site Pertama

Sumber: *google earth*

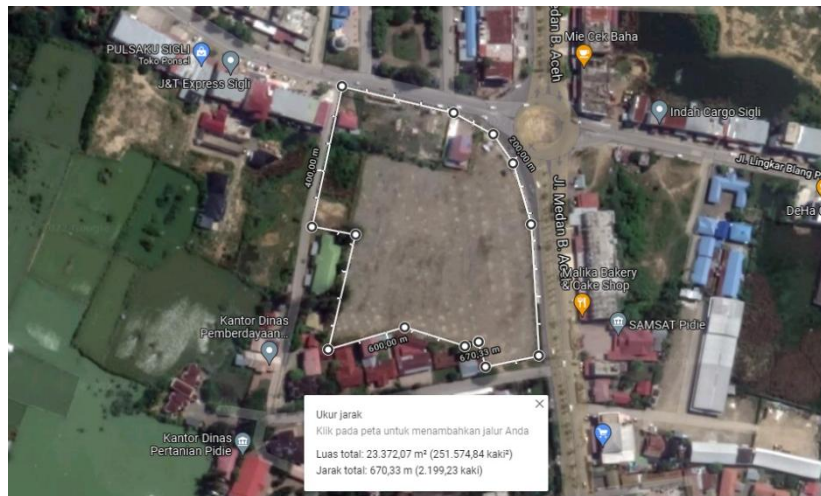
Untuk mengetahui kondisi dalam site berikut penulis cantumkan tabel kondisi site alternatif pertama:

Tabel 2. 2 : Tabel keterangan alternatif site pertama

no	keterangan	
1	alamat	Lampeude Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh
2	Peruntukan lahan	Kawasan perkantoran
3	Luas tapak	0.86 ha
4	Kondisi tapak	Lahan bekas timbunan, terdapat beberapa vegetasi dan semak belukar.
5	Batasan site	1) sebelah utara berbatasan dengan tambak masyarakat. 2) Sebelah selatan berbatasan dengan jalan, Gedung <i>Pidie Convention Center</i> (PCC) & Gedung mahkamah syariah 3) Sebelah barat berbatasan dengan kedai kopi Sigli premium & tambak masyarakat. 4) Sebelah timur berbatasan dengan tambak masyarakat.

(sumber: Analisis pribadi)

2. Alternatif site kedua



Gambar 2. 3: Alternatif Site Kedua

Sumber: *google maps*

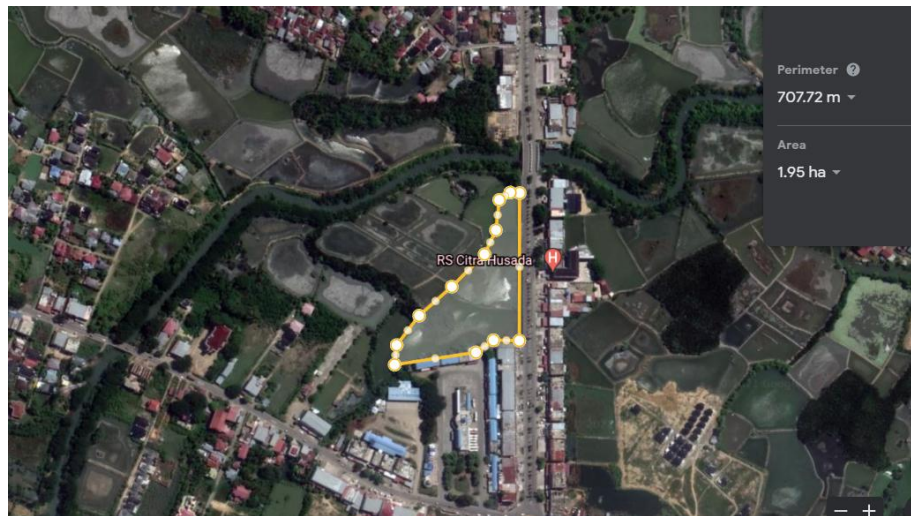
Untuk mengetahui kondisi dalam site berikut penulis cantumkan tabel kondisi site alternatif dua:

Tabel 2. 3: Tabel keterangan alternatif site kedua

no		keterangan
1	alamat	Jalan lingkar cot teungoh, keuniree, Kabupaten Pidie, Aceh
2	Peruntukan lahan	Kawasan perkantoran
3	Luas tapak	2.26 ha
4	Kondisi tapak	Lahan kosong, bekas timbunan rawa-rawa, belum ada vegetasi, lahan bersih dan rata
5	Batasan site	1) sebelah utara berbatasan dengan Terminal Sigli 2) Sebelah selatan berbatsan dengan Kantor Bupati 3) Sebelah barat berbatasan dengan kedai kaki lima dan tambak masyarakat 4) Sebelah timur berbatasan dengan jalan lingkar dan pertokoan.

(sumber: Analisis pribadi)

3. Alternatif site ketiga



Gambar 2. 4: Alternatif Site ketiga

Sumber: *google earth*

Untuk mengetahui kondisi dalam site berikut penulis cantumkan tabel kondisi site alternatif tiga:

Tabel 2. 4 : tabel keterangan alternatif site ketiga

no	keterangan	
1	alamat	Cot teungoh, keuniree, Kabupaten Pidie, Aceh
2	Peruntukan lahan	Kawasan perkantoran
3	Luas tapak	1.95 ha
4	Kondisi tapak	Tambak ikan, lahan perlu ditimbun

5	Batasan site	1) sebelah utara berbatasan dengan sungai dan tambak 2) Sebelah selatan berbatsan dengan terminal sigli 3) Sebelah barat berbatasan dengan tambak masyarakat 4) Sebelah timur berbatsan dengan rumah sakit Citra Husada.
---	--------------	---

(Sumber : Analisis pribadi)

2.2.3 Analisis Aspek Potensi dan Masalah Lokasi

Untuk memperkuat alasan pemilihan site maka kita perlu memperhatikan potensi dan Masalah dalam lokasi. Berikut adalah analisis ketiga alternatif site:

A. Alternatif lokasi site pertama

1. Potensi

- Lokasi mudah diakses
- Lokasi sudah ditimbun sehingga tidak diperlukan *cut and fill*
- Lokasi berada di daerah yang lumayan sepi

2. Kelemahan

- Lokasi berada di daerah yang berpotensi banjir
- Kondisi lahan cenderung sempit
- Adanya ancaman kepadatan di kemudian hari

B. Alternatif lokasi site kedua

1. Potensi

- Lokasi mudah diakses dari pusat kota
- Lokasi site berada di jalan Medan-Banda Aceh
- Lokasi site berdekatan dengan pusat pemerintahan
- Lokasi sudah ditimbun sehingga tidak perlu diperlukan *cut and fill*

2. Kelemahan

- Site berpotensi macet
- Adanya ancaman kepadatan di kemudian hari

C. Alternatif lokasi site ketiga

1. Potensi

- a) Lokasi mudah diakses dari pusat kota
- b) Site dekat dengan terminal dan rumah sakit

2. Kelemahan

- a) Lokasi site berpotensi banjir
- b) Adanya ancaman di kemudian hari

2.2.4 Analisis Kriteria Lahan

Dari data ketiga alternatif lokasi di atas maka selanjutnya kita menentukan lokasi terbaik untuk dipilih, Adapun proses pemilihannya dengan menghitung nilai dari kriteria lahan.

Berikut adalah tabel perhitungan kriteria lahan:

Tabel 2. 5: Analisis kriteria lahan

no	Kriteria lahan	Nilai lokasi 1	Nilai lokasi 2	Nilai lokasi 3
1	Tingkat kepadatan lingkungan	5	1	3
2	Ketersediaan sarana transportasi	1	5	5
3	Kemudahan akses dari pusat kota	3	5	5
4	Mudah diakses oleh instansi pemerintah	3	5	5
5	Fasilitas Kesehatan	3	5	5
7	Tingkat keamanan saat demo	5	3	3
8	Fasilitas perdagangan dan jasa	1	5	5
9	Jaringan listrik	5	5	5
10	Jaringan air bersih	5	5	5
11	Jalan	5	5	3
12	Jaringan internet	5	5	5
13	Luasan lahan	3	5	3
14	Jenis tanah	5	5	1
	total	44	59	58

(sumber: Analisis pribadi)

Berdasarkan dari data Analisis SWOT dan penilaian kriteria lahan di atas, maka lokasi yang terpilih adalah lokasi alternatif kedua yang terletak di Jalan Lingkar Cot Teungoh, Keuniree, Kabupaten Pidie, Aceh. Perbedaan skor sangat tipis sehingga penulis perlu memperhatikan faktor lain dalam menentukan lokasi, yaitu dengan mengacu pada tujuan awal redesain Gedung DPRD Kabupaten Pidie, yaitu menjadikan gedung sebagai identitas baru.

Lokasi ke dua berada pada titik yang paling banyak dilalui oleh kendaraan dibandingkan lokasi satu dan lokasi 3. Dengan banyaknya kendaraan yang melewati lokasi tersebut dapat membuat tujuan memperkenalkan identitas menjadi lebih maksimal. Penentuan lokasi kedua ini juga mengacu pada berita yang membahas isu tentang pembahasan perencanaan redesain Gedung DPRD. Pada berita tersebut dituliskan bahwa lokasi yang akan dijadikan sebagai lahan pembangunan gedung baru adalah lokasi kedua. Berikut adalah kutipan tentang penentuan lokasi dari kanal berita Pemerintah Kabupaten Pidie “Pemerintah Kabupaten Pidie berencana membangun Gedung DPRD di Kawasan jalan Prof H. Majid Ibrahim, tepatnya bersebelahan dengan Kantor Bupati Pidie.” (Pemerintah Kabupaten Pidie, 2015)



2.2.5 Lokasi Perancangan

Lokasi perancangan terletak di Jalan Lingkar Cot Teungoh, Keuniree, Pidie, Aceh



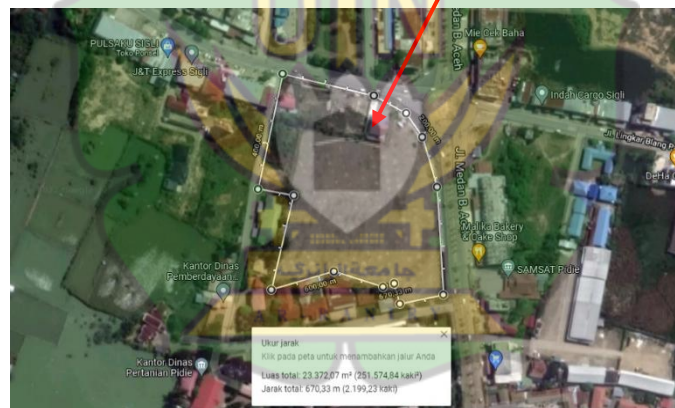
Gambar 2. 7: Peta Aceh

Sumber: *wordpress.com*



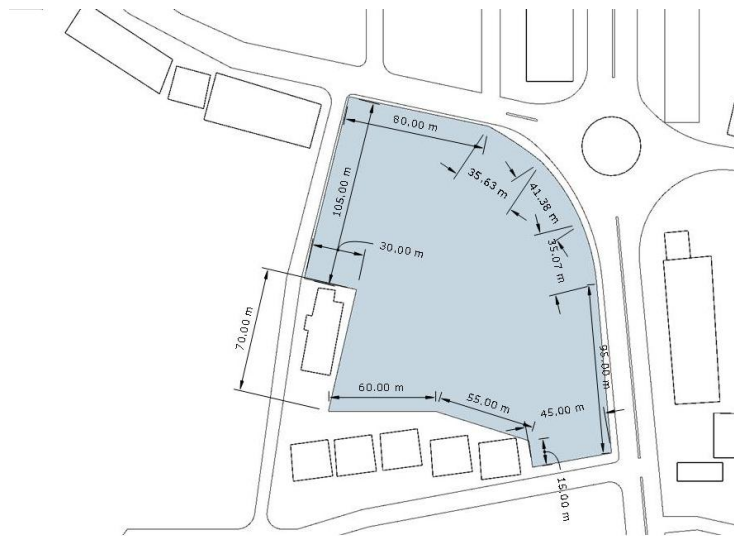
Gambar 2. 7: Peta Pidie

Sumber: *metropolis.id*



Gambar 2. 7: Lokasi Site

Sumber: *google maps*



Gambar 2. 8: Lokasi Site
Sumber: *google maps*

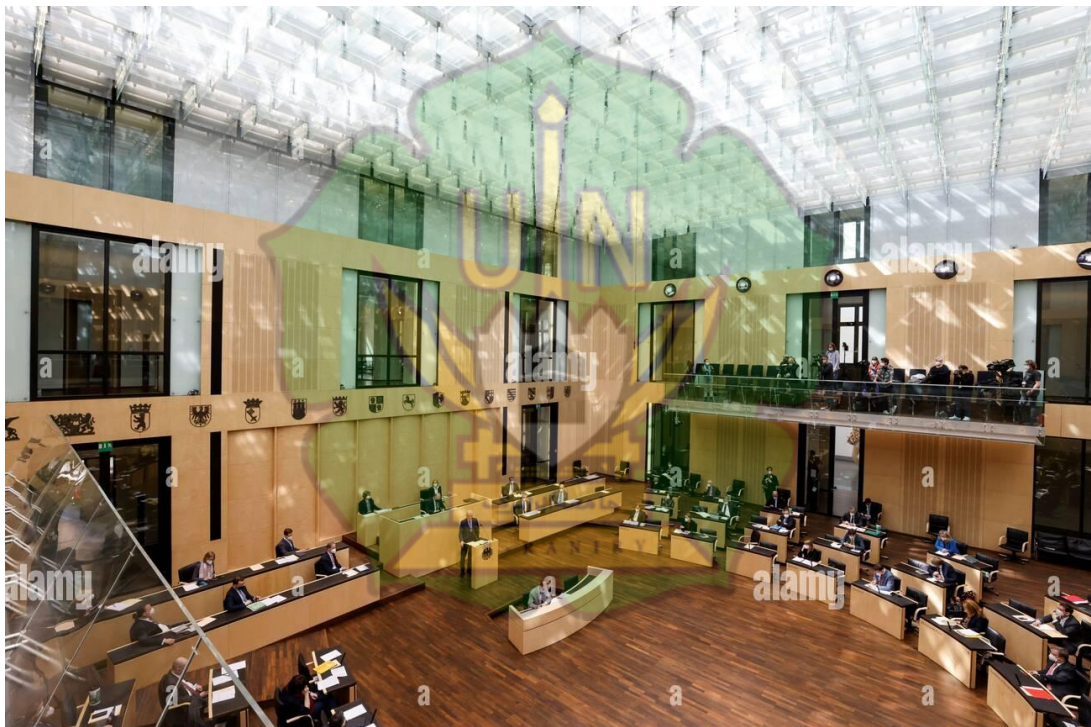
Berikut ini adalah tabel keterangan site terpilih:

Tabel 2. 6: Tabel keterangan site terpilih

Kelebihan site	Kekurangan site
1) Site terletak di dekat jalan banda aceh-medan. 2) Site berada di Kawasan perkantoran. 3) Site dekat dengan perkotaan. 4) Lokasi site berhadapan langsung dengan terminal. 5) Lokasi site mudah dijangkau oleh masyarakat. 6) Fasilitas pendukung di sekitar site memadai.	1) Lokasi site adalah bekas rawa-rawa yang telah ditimbun. 2) Lokasi site berada di tempat keramaian. 3) Lokasi site berada di tempat yang padat dengan bangunan lain.

(sumber: Analisis pribadi)

Yang menjadi poin penting dari studi banding bangunan parlemen ini adalah penempatan ruang pleno dan bagaimana ruang tersebut didesain. Ruang pleno diletakkan di bagian paling aman dan nyaman, yaitu di bagian paling dalam. Penempatan ini bertujuan untuk mengatasi kebisingan dari luar dan menjaga privasi dari sebuah persidangan. Penempatan ini juga bertujuan untuk memastikan keamanan dalam sebuah persidangan, sehingga saat sidang berlangsung tidak ada gangguan dari luar ruangan. Desain dinding pada ruang pleno dibuat tinggi, sehingga terkesan megah dan monumental. Untuk mengatasi gema saat sidang berlangsung, maka pada bagian dinding dan lantai dibuat dengan material yang berserat agar suara dapat diredam, kemudian pada bagian plafon juga dibuat rongga-rongga agar suara tidak memantul ke bawah. Penempatan kursi dibuat dengan bentuk setengah melingkar agar sidang terfokus pada presidium sidang (bundesrat, n.d.).



Gambar 2. 11: Ruang sidang pleno *bundesrat*
Sumber: *alamy*

2.3.2 Gedung Parlemen Malta, Velledda

Sepanjang sejarahnya, negara kecil Mediterania Malta berfungsi sebagai persimpangan kerajaan dan jembatan budaya antara Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Terlepas dari ukurannya yang kecil, Malta memiliki begitu banyak situs bersejarah, kota bertembok dan monumen, menjadikannya tujuan wisata utama diantara orang Eropa. Malta ingin mengubah gerbang utama ibukota velletta menjadi ruang publik yang lebih menarik dengan membangun

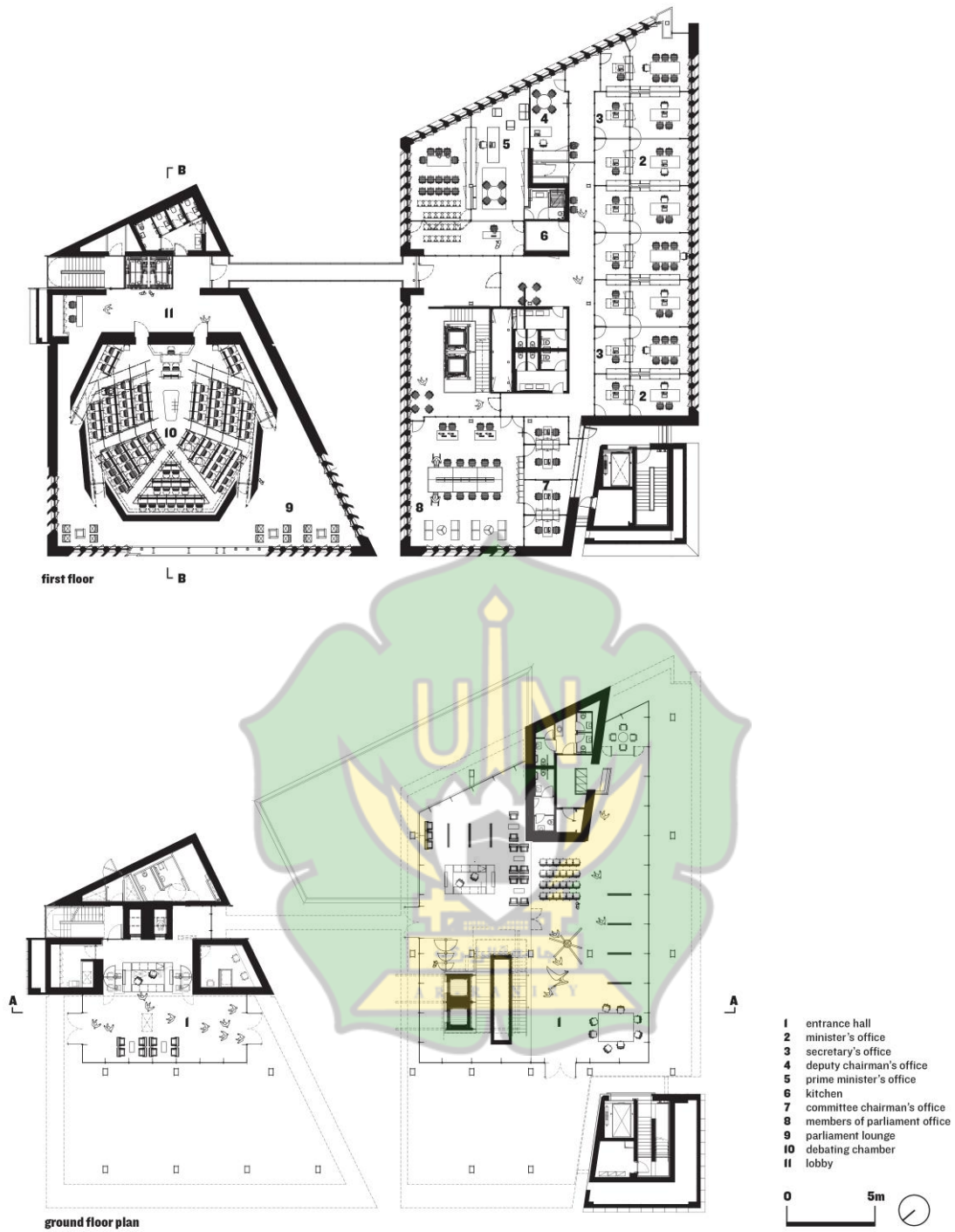
sebuah Gedung parlemen yang menggunakan pendekatan budaya. Gedung Parlemen baru, yang direncanakan oleh arsitek terkenal dunia Renzo Piano, bertujuan untuk menghubungkan warisan arsitektur Malta dengan memasukkan bahan bangunan lokal ke dalam desain modern. Menariknya, facade utama memiliki peta Malta berpiksel yang diukir dari lempengan, terinspirasi oleh batu pantai yang terkikis, tersebar luas di banyak bangunan bergaya Maltese-Baroque (Bevan, 2015).



Gambar 2. 12: Denah Gedung Parlemen Malta

Sumber: *architecturalreview.com*

Dari bentuk denah kita dapat melihat bahwa bangunan dibagi menjadi dua sisi, satu sisi diprioritaskan untuk ruang sidang, sedangkan sisi lainnya sebagai ruang rapat dan administrasi. Penempatan ruang sidang di tempatkan di lantai atas, tujuannya adalah untuk membuat suasana ruangan menjadi aman dan nyaman dari kondisi yang dapat mengganggu proses sidang berlangsung. Ruang sidang didesain berbentuk segi delapan dengan diameter 22 m yang dibuat dengan material batu warna krim khas material lokal malta. Di sekitar ruang sidang adalah space sirkulasi yang sekaligus berfungsi sebagai peredam suara agar suara kebisingan dari luar tidak mengganggu persidangan (Bevan, 2015).



Gambar 2. 13: Denah lantai dasar dan lantai 1 Gedung Parlemen Malta
Sumber: *architecturalreview.com*



Gambar 2. 14: Ruang sidang gedung parlemen valletta

Sumber: *micHEL denance*

2.3.3 Sarawak State Legislative Assembly (Gedung Dewan Serawak), Malaysia

Gedung dewan Sarawak didesain oleh Bina Puri Holding Bhd. Gedung ini terdiri dari 9 lantai dengan tinggi bangunan 114 m dan dibangun di atas lahan seluas 47.747 m². Atap yang berbentuk payung adalah bentuk atap yang diambil dari rumah khas masyarakat Dun yang berada di Sarawak. penempatan zonasi ruang ditentukan secara vertical, ruang sidang diletakkan dilantai 8 yang terhubung juga ke lantai 9. Penempatan ruang sidang dilantai 8 adalah bertujuan untuk kenyamanan dan keamanan saat proses persidangan berlangsung. Ruang sidang berbentuk lonjong dan kursinya juga disusun mengikuti bentuk bangunan. Ruang sidang terlihat megah dan bentuk langit-langitnya mengikuti bentuk atap pada rumah Dun. Ukuran ruang yang besar akan membuat suara menggema, oleh karena itu sang arsitek membuat langit-langit yang berpola garis-garis sehingga memiliki serat. Serat dapat berfungsi sebagai pemecah suara sehingga suara tidak akan bergema. Lobi pada bangunan juga didesain sangat luas agar sirkulasi menjadi nyaman dan aman (Etawau.com, 2019).



Gambar 2. 16: ruang pleno Sarawak, Malaysia.
Sumber: Etawau

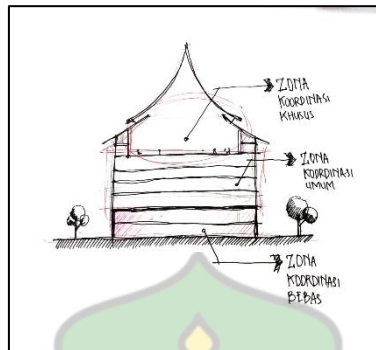


Gambar 2. 15: Gedung Dewan Sarawak
Sumber: *iopscience*

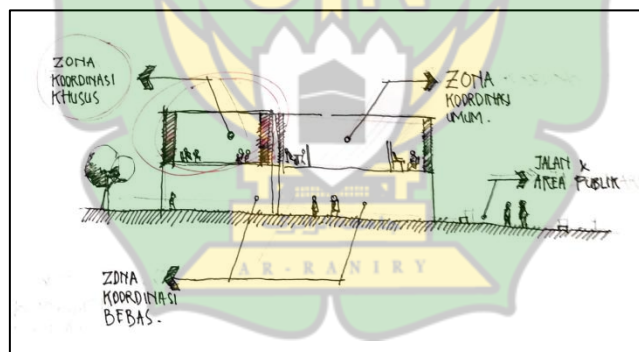
2.4 Kesimpulan Studi Banding Objek Perancangan Sejenis

Kesimpulan pertama adalah penerapan identitas kedalam bangunan. Bangunan dibuat sedemikian rupa agar dapat mewakili daerah dimana bangunan dibangun. Kesimpulan kedua adalah bentuk desain ruang sidang/pleno. Dari ketiga studi banding semuanya memiliki tipikal yang sama, yaitu ruangan yang lebar dan tinggi, kemudian bentuk pola kursi difokuskan kearah depan, lantai dan dinding menggunakan material berserat. Kesimpulan ketiga zonasi ruangan dibuat berdasarkan faktor kepentingan. Yang menjadi poin penting dari zonasi adalah penempatan ruang sidang yang harus berada pada tempat yang aman dan nyaman. Dari ketiga studi banding bangunan dewan dapat kita lihat bahwa ruang sidang ditempatkan di area yang paling dalam dan aman.

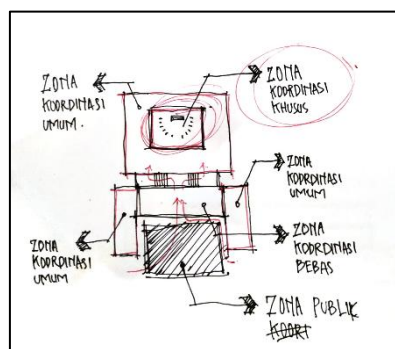
Menerapkan pendekatan identitas kedaerahan, membuat zonasi yang tepat dan mendesain ruangan yang nyaman dapat menjadi 3 poin penting yang harus ditekankan agar perancangan bangunan nantinya memiliki identitas kedaerahan, nyaman dan aman untuk digunakan. Dari hasil studi banding bangunan sejenis kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 aspek penting yang ditekankan, yaitu identitas, kenyamanan dan keamanan. Poin dari hasil studi banding ini nantinya akan diterapkan pada perancangan Gedung DPRD Kabupaten Pidie.



Gambar 2. 19: Skema zonasi gedung dewan Serawak, Malaysia.
Sumber: Analisis pribadi



Gambar 2. 17: Skema zonasi gedung dewan Vellela, Malta
Sumber: Analisis pribadi



Gambar 2. 18: Skema zonasi gedung dewan Bundesrat, Berlin.
Sumber: Analisis pribadi

BAB III

ELABORASI TEMA

3.1 *Neo-Vernakular*

Pemilihan tema *neo-vernakular* berasal dari pertimbangan 4 faktor utama. yang pertama adalah jenis bangunan, karena bangunan yang akan dirancang adalah bangunan pemerintahan sehingga bangunan tersebut harus merepresentasikan identitas dari daerah di mana bangunan tersebut akan dirancang. Pada kasus ini adalah bangunan Gedung DPRD Kabupaten Pidie. Faktor kedua dari penentuan tema *neo-Vernakular* adalah lokasi site yang berada di daerah yang masih sangat kental dengan adat dan budaya setempat sehingga sangat disayangkan jika nilai-nilai dari adat dan budaya setempat harus dihilangkan. Faktor ketiga adalah masyarakat yang ingin bangunan pemerintah mewakili identitas dari daerah tersebut dalam hal ini daerah Pidie. Faktor keempat adalah bagaimana tema dapat menjawab permasalahan dari kapasitas dan fasilitas yang menjadi problem pada bangunan sebelumnya. Dari ke empat faktor di atas tema *neo vernakular* dapat memberikan solusi untuk permasalahan pada bangunan sebelumnya.

Menurut (SANI, 2018) arsitektur *vernakular* adalah arsitektur asli daerah setempat yang tumbuh dari kondisi sosial masyarakat setempat, masih bersifat sederhana, mengacu pada karya manusia/penduduk setempat, dan diterapkan oleh beberapa generasi. Dapat disimpulkan bahwa arsitektur *vernakular* adalah arsitektur yang bersifat elastis yang menyesuaikan nilai lokal dengan keadaan setempat.

Penegrtian arsitektur *neo vernakular* menurut (Wibowo, 2019) adalah merupakan arsitektur dengan konsep yang berprinsip dari kaidah-kaidah kosmologis, normatif, dan peran serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat. *Neo vernakular* juga sangat memperhatikan keselarasan antara bangunan, lingkungan, dan alam. *Neo vernakular* adalah perpaduan antara nilai-nilai modern yang dikombinasikan dengan nilai-nilai kedaerahan suatu tempat sehingga menghasilkan bangunan yang memiliki identitas dan tidak universal.

3.2 Kriteria Arsitektur *Neo Vernakular*

Arsitektur *neo vernakular* terlahir dari adanya kritik terhadap gaya arsitektur modern yang membosankan. Karena neo vernakular ini adalah aliran baru pada era *post modern* maka muncullah kriteria yang memberikan batasan terhadap arsitektur *neo vernakular*. Menurut (Fajrine et al., 2017) kriteria arsitektur *neo vernakular* adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan bentuk-bentuk yang memiliki nilai budaya dan lingkungan setempat, termasuk memperhatikan iklim setempat. Penerapannya sendiri dapat berupa bentuk arsitektural (denah,tampak, struktur & ornament).
2. Selain menerapkan elemen fisik juga dapat berupa elemen non fisik seperti pola pikir, kepercayaan, tata letak dan elemen lainnya.
3. Produk bangunan tidak murni menerapkan prinsip-prinsip *vernakular* melainkan menghasilkan karya yang baru yang mengandung nilai *vernakular* di dalamnya.

3.3 Ciri-ciri Arsitektur *Neo Vernakular*

Pada hakikatnya penerapan *neo vernakular* adalah gabungan antara bangunan modern yang dikombinasikan dengan nilai-nilai daerah setempat. Menurut (Fajrine et al., 2017) ciri-ciri dari bangunan yang bisa dikatakan sebagai bangunan *neo vernakular* adalah sebagai berikut:

1. Membangkitkan kenangan sejarah
2. Bersifat ekletik
3. Berkonteks urban
4. Menggunakan ornamentasi
5. Berwujud berbeda
6. Mencerminkan aspirasi umum
7. Dihasilkan dari partisipasinya
8. Bersifat plural
9. Mewakili keseluruhan dari nilai daerah
10. Mengandung nilai komunikatif dengan lokal.

3.4 Prinsip-prinsip Arsitektur *Neo Vernakular*

Menurut (Wibowo, 2019) dalam menerapkan arsitektur *neo vernakular* ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:

1. Menyesuaikan dengan keterkaitan langsung bentuk perkembangan yang kreatif dan adaptif dengan arsitektur lokal.
2. Hubungan yang abstrak, memasukkan interpretasi bentuk arsitektur, dapat diaplikasikan dengan melihat tradisi dan warisan arsitektur sebelumnya.
3. Memperhatikan hubungan langsung dengan kondisi alam.
4. Hubungan kontemporer dengan memperhatikan penggunaan teknologi ataupun material baru kedalam ide desain.
5. Memperhatikan kondisi yang akan datang.

3.5 Tinjauan Arsitektur *Neo Vernakular*

Berikut ini adalah tabel perbandingan arsitektur tradisional, arsitektur *vernakular* dan arsitektur *neo vernakular*.

Tabel 3. 1: Tabel perbandingan arsitektur, tradisional, vernakular, dan *neo vernakular*

perbandingan	tradisional	<i>vernakular</i>	<i>Neo vernakular</i>
ideologi	Terbentuk oleh tradisi yang diwariskan secara turun temurun.	Terbentuk dari tradisi turun temurun namun masih terdapat pengaruh dari luar berupa pengaruh fisik maupun non fisik.	Bangunan modern yang memasukkan nilai-nilai yang sudah ada dari masa lalu dan bersifat regional.
prinsip	Tertutup dari pengaruh zaman, hanya terpaut pada satu kultur kedaerahan dan memiliki aturan-aturan dan norma keagamaan yang kental.	Berkembang setiap waktu menyesuaikan dengan budaya, lingkungan dan sejarah setempat.	Arsitektur yang berupaya melestarikan nilai-nilai local yang telah lama terbentuk secara empiris oleh tradisi dan mengembangkannya
Ide desain	Fasad dan bentuk ornament adalah sebuah keharusan.	Ornamen hanya sebagai pelengkap. Memperhatikan nilai setempat dan aktifitas disekitar masyarakat.	Bentuk desain lebih modern dengan menerapkan nilai-nilai setempat.

(sumber:ahluldesigner.co.id)

Dari ketiga perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa *neo vernakular* merupakan tema yang paling memungkinkan untuk diterapkan pada bangunan masa kini, ini dikarenakan dari ideologi, prinsip, dan ide desain dapat diterapkan pada bangunan yang berskala besar.

3.6 Studi Banding Bangunan Dengan Tema Sejenis

3.6.1 Istana Budaya Malaysia



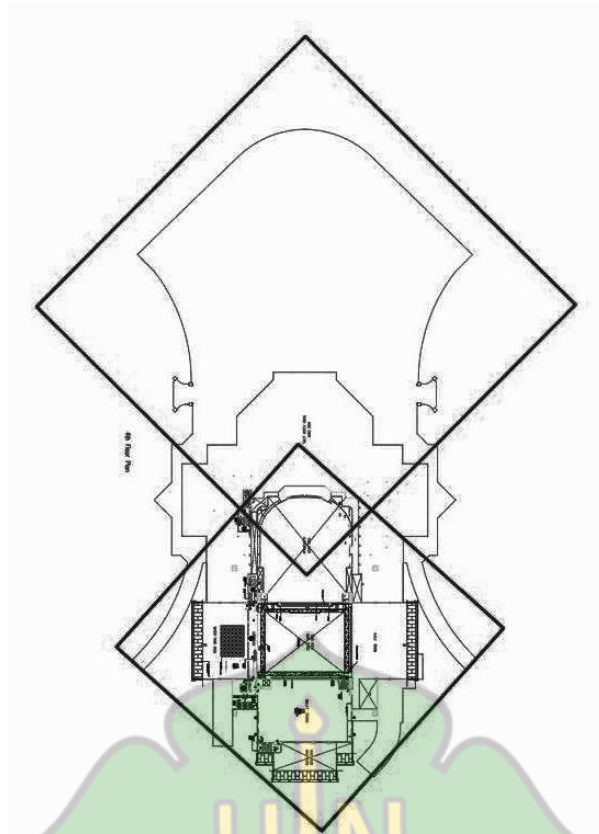
Gambar 3. 1: Gedung istana budaya malaysia
Sumber: wikiarchitettura

Gedung Istana Budaya adalah gedung teater utama yang menampilkan berbagai macam penampilan mulai dari teater musik, operet, musik klasik, dan juga opera dari lokal dan internasional. Bangunan ini terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur, berdekatan dengan National Art Gallery. Bangunan ini dibangun pada tahun 1999.

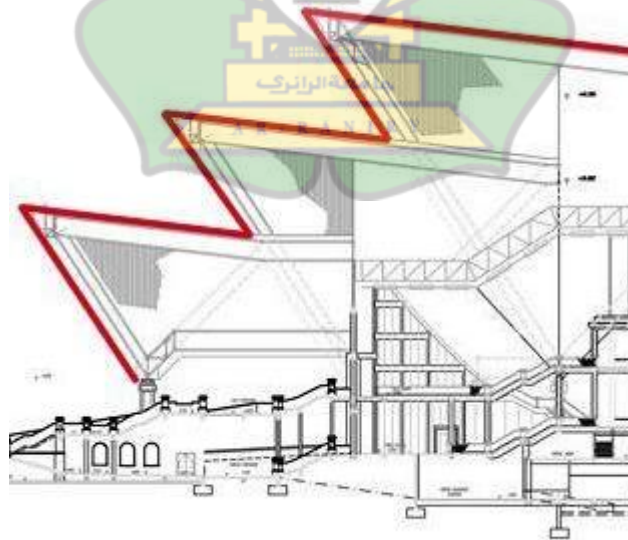
Layout pada bangunan ini mengikuti pola pada rumah tipikal di Malaysia. Adapun pembagian layoutnya terbagi menjadi 3, yaitu:

- a) Serambi: berfungsi sebagai lobi dan beranda. Area ini adalah area yang kecil. Area ini terhubung ke 2 ruang aula, yaitu ruangan *The Stall* dan *The Great Circle*.
- b) Rumah ibu: area ini berfungsi sebagai area utama/auditorium. Ruang ini adalah ruang paling luas.
- c) Rumah dapur: ini adalah area yang digunakan untuk panggung belakang sekaligus pada kondisi tertentu digunakan untuk area latihan.

Penerapan *neo vernakular* pada bangunan ini terdapat pada bagian bentuk layout, bentuk layout pada bangunan terinspirasi dari bentuk layangan tradisional Malaysia (*moon kite/wau bulan*). Kemudian pada bentuk potongan terinspirasi dari bentuk ukiran daun betel yang merupakan bagian dari aspek budaya Malaysia (Farahimakbar, n.d.).



Gambar 3. 3: Bentuk layout gedung istana budaya
malaysia
Sumber: issu



Gambar 3. 2: Pola ukiran bunga betel pada potongan
istana budaya malaysia
Sumber: issu

3.6.2 Asakusa Culture Tourism Information Center (ACTIC)

Asakusa Culture Tourist Information Center (ACTIC) merupakan objek yang memiliki fungsi utama yang sama dengan *visitor center*, yaitu sebagai sarana informasi dan promosi wisata. *Asakusa Culture Tourist Information Center (ACTIC)* berlokasi di Asakusa-Taito, Tokyo, Jepang, dibangun pada tahun 2012 oleh arsitek Kengo Kuma dengan luas area terbangun 234 m²

Asakusa adalah daerah wisata yang paling terkenal di Tokyo. Asakusa merupakan sebuah kota yang sudah makmur bahkan sejak zaman Edo di Jepang. Asakusa menjadi sebuah kota yang berkembang maju dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah berlangsung sejak lama. Asakusa menjadi salah satu tempat tujuan wisata favorit wisatawan karena disini para pengunjung dapat menikmati dan merasakan suasana pusat kota tua zaman Edo yang masih mempertahankan rasa khas tradisional Jepang, seperti makanan dan bangunan-bangunan tradisional yang masih berdiri bahkan sejak periode Perang Dunia II. Salah satu yang menjadi landmark dan ikon adalah kuil Buddha Senso-ji merupakan kuil tertua di Tokyo yang sudah dibangun sejak abad ke 6 dan memiliki nilai sejarah penting di Jepang, serta kawasan Nakamise-dori street sebagai pusat hiburan dan belanja yang identik dengan suasana Jepang yang begitu kental dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan untuk datang mengunjungi Asakusa (arch daily, 2012).

1. Program Ruang

Bangunan ACTIC memiliki 8 lantai yang memiliki masing-masing lantai memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi utama dari bangunan ACTIC adalah sebagai pusat informasi Wisata, namun di samping itu bangunan ACTIC juga memiliki fasilitas pendukung seperti kantor, teater, ruang pameran, ruang workshop, ruang pertemuan, ruang serbaguna, kafe dan tempat penukaran mata uang (*money exchange*). Karena bangunan ACTIC diakomodasi untuk

bermacam fungsi maka setiap fungsi tersebut dikelompokkan kedalam sifat masing-masing ruangnya, meliputi ruang privat, ruang semi privat dan ruang public (arch daily, 2012).



Gambar 3. 4: Fungsi Ruang Asakusa Culture Tourist Information Center
Sumber: *precedent (slideshare.net)*

2. Konsep Bangunan



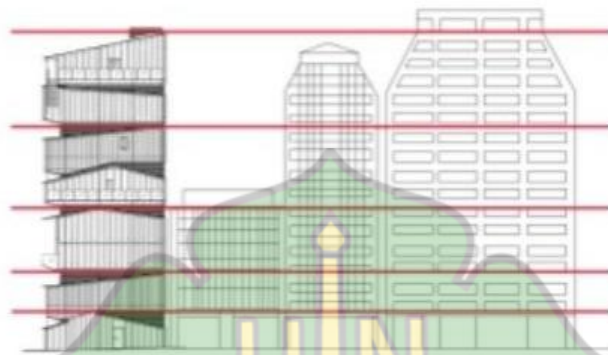
Gambar 3. 5: Konsep Bentuk Bangunan Asakusa Culture Tourist Information Center
Sumber: *precedent (slideshare.net)*

Bangunan ACTIC mengadaptasi beberapa bentuk bangunan khas tradisional Jepang yaitu machiya, ageya dan nagaya, yang kemudian dipadukan kedalam sentuhan desain yang lebih modern. Bangunan ini secara tidak langsung menghubungkan antara bangunan tradisional dan modern kedalam bentuk yang dibuat tidak terlalu kontras dengan bangunan disekitarnya. Bangunan dibuat dengan struktur yang menumpuk dengan tujuan untuk menyediakan fungsi yang lebih beragam dalam luas area yang sangat terbatas, sehingga

sirkulasi dalam bangunan dibuat vertikal agar setiap fungsi yang ada dapat diwadahi dalam satu bangunan (arch daily, 2012).

3. Fasad Bangunan

fasad bangunan didesain dengan garis horizontal yang mengikuti bangunan disekitar Gedung ACTIC untuk menghormati bangunan yang sebelumnya sudah ada. penerapan garis horizontal ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara bangunan yang disamping area site dengan bangunan ACTIC. Penerapan garis tersebut membuat irama dari kota Asasuka tetap terjaga.



Gambar 3. 6: Konsep Bentuk Bangunan Asakusa Culture Tourist Information Center
Sumber: *precedent (slideshare.net)*

4. Material Bangunan

material yang paling menonjol dari bangunan ini adalah material kayu. alasan dari penggunaan material kayu adalah karena jenuh dengan bangunan tinggi di sekitar site yang dominan menggunakan material beton. material yang terlihat kontras dapat membuat Gedung Asasuka menjadi fokus di daerah tersebut (arch daily, 2012).



Gambar 3. 7: Konsep Material Bangunan Asakusa Culture Tourist Information Center
Sumber: *precedent (slideshare.net)*

3.6.3 Masjid Raya Sumatera Barat



Gambar 3. 8: Masjid Raya Sumatera Barat
Sumber: sumbarprov.go.id

Masjid Raya Sumatera Barat adalah masjid yang sangat ikonik yang lokasinya terletak di Kota Padang, ibukota Sumatera Barat. Masjid ini menerapkan tema *neo vernakular* yang sangat kental. Masjid ini terinspirasi dari bentuk atap yang berbentuk seperti tanduk pada rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Pada fasadnya bangunan masjid ini menerapkan ornamen yang ada pada rumah gadang. Selain terinspirasi dari rumah gadang, masjid ini juga sangat ental dengan pendekatan agama Islam. Pendekatan agama Islam ini diterapkan karena Sumatera Barat sangat erat kaitannya dengan Islam. Salah satu penerapannya adalah pada bagian atap yang mengarah ke empat penjuru dengan bentuk seperti kain yang mengangkat hajar aswad (Rahmania et al., 2019).

3.6.4 Kesimpulan

Dari kesimpulan studi banding tema sejenis kita dapat mengerti bahwa dalam menerapkan desain *neo vernakular* harus benar-benar memperhatikan konteks berkesinambungan antara gedung dengan aspek modern dan nilai-nilai adat dan budaya. Gedung juga harus memperhatikan keadaan dari sekitar site sehingga gedung dapat diterima dengan baik di kawasan gedung di bangun.

Ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari studi banding tema sejenis, diantaranya adalah:

1. Identitas

Bangunan yang dibangun harus sesuai dengan culture setempat agar bangunan bisa diterima oleh masyarakat sekitar dan juga mudah dikenali oleh para pengunjung yang datang ke daerah tersebut. Pada kasus perancangan Gedung DPRD Kabupaten Pidie identitas bisa berupa bentuk rumah khas Pidie atau bentuk melinjo yang sudah menjadi identitas penting di Kabupaten Pidie

2. Material

Karena temanya adalah *neo vernakular* maka material yang digunakan harus mudah didapatkan dan cocok dengan daerah tersebut. Material juga mempengaruhi bentuk fasad sehingga bentuk bangunan nantinya terlihat mewakili identitas daerah dengan nilai-nilai budaya dan adat. Pada perancangan Gedung DPRD Kabupaten Pidie nantinya akan diterapkan penggabungan material modern dan material tradisional. Material modern dapat berupa beton dan kaca sedangkan material tradisional bisa berupa kayu sebagai ornamen.

3. Bentuk atap

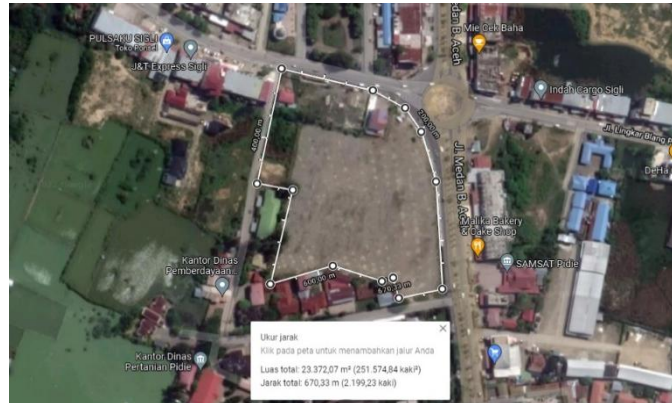
Bentuk atap sebisa mungkin dibentuk sesuai dengan daerah di mana bangunan akan dibangun. Karena bentuk atap nantinya akan berpengaruh pada iklim daerah setempat sehingga bentuk atap juga harus diperhatikan. Karena bangunan yang dirancang berada di Pidie maka sebisa mungkin bentuk atap disesuaikan dengan bentuk atap rumah tradisional Pidie yaitu atap pelana yang sedikit menjulang kedepan.

4. Fasad

Bentuk fasade pada bangunan *neo vernakular* selalu memunculkan identitas kedaerahan. Pengaplikasiannya bisa berupa ornament maupun bentuk pola-pola yang menggambarkan ciri khas dari daerah tersebut.

BAB IV ANALISIS

4.1 Analisis Site Terpilih



Gambar 4. 1: Site terpilih

Sumber: *google earth*

Berikut adalah tabel informasi pada eksisting perancangan tapak

Tabel 4. 1: Informasi tapak

No		Keterangan
1	Alamat	Jalan lingkar cot teungoh, keuniree, Kabupaten Pidie, Aceh
2	Peruntukan lahan	Kawasan perkantoran
3	Luas tapak	23.372 m ² /2.3 ha
4	Kondisi tapak	Lahan kosong, bekas timbunan rawa-rawa, belum ada vegetasi, lahan bersih dan rata
5	Batasan site	5) sebelah utara berbatasan dengan terminal sigli 6) Sebelah selatan berbatasan dengan kantor bupati 7) Sebelah barat berbatasan dengan kedai kaki lima dan tambak masyarakat 8) Sebelah timur berbatasan dengan jalan lingkar dan pertokoan.

(Sumber: Analisis pribadi)

Berikut adalah tabel Analisis SWOT pada lokasi yng terpilih :

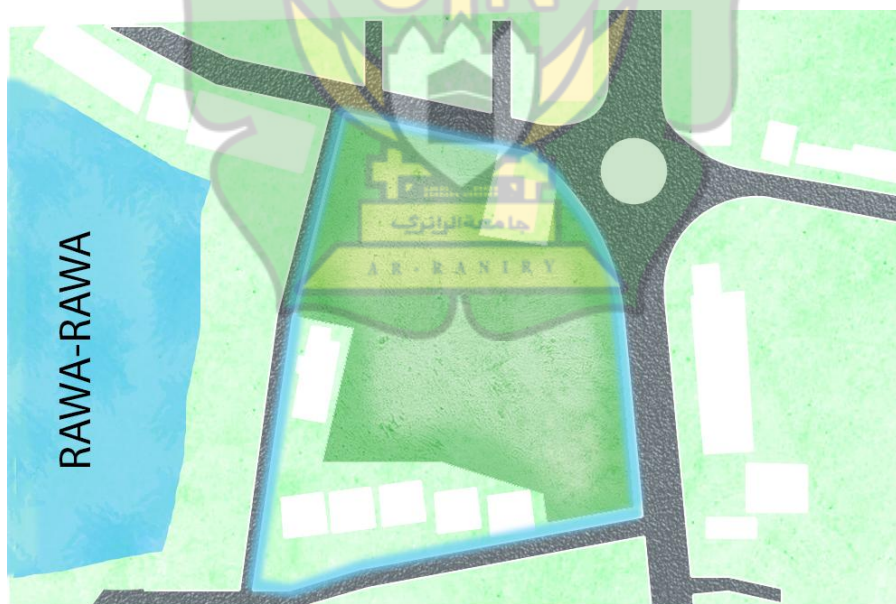
Tabel 4. 2: Tabel analisis SWOT lokasi terpilih

	Analisis SWOT
S	1) Lokasi mudah diakses, 2) lokasi berada di jalan utama Medan-Banda Aceh, 3) keadaan site sudah bersih dan tidak perlu <i>dicut and fill</i> .
W	1) site berada di daerah yang berpotensi macet.
O	1) site berdekatan dengan Kantor Bupati 2) site berdampingan dengan Terminal Sigli 3) site berdekatan dengan area perkantoran/area Pemerintahan Pidie 4) site berdekatan dengan rumah sakit
T	1) adanya ancaman kepadatan di kemudian hari

(sumber: Analisis pribadi)

4.2 Kondisi Eksisting

4.2.1 Hidrologi (Air)



Gambar 4. 2: Analisis air

Sumber: Analisis pribadi

Kondisi air dalam tapak tidak mengalami genangan air dan di depan site juga terdapat selokan yang terhubung dengan drainase sebelah utara site sampai ke arah jalan menuju sungai. Sehingga dapat dimanfaatkan dalam mendukung perancangan.

4.2.2 Vegetasi



Gambar 4. 3: Analisis vegetasi

Sumber: Analisis pribadi

Dalam site terdapat vegetasi dari jenis rumput, semak belukar, beberapa anakan pohon palem, beberapa anakan mahoni, beberapa anakan flamboyan, dan beberapa jenis pohon liar lainnya. Adapun vegetasi yang sangat dominan dalam site merupakan semak belukar dan pohon-pohon liar yang tinggi 2-4 meter sehingga tidak dapat dipertahankan dan tidak berpengaruh dalam proses perancangan.

4.2.3 Prasarana Penunjang Perancangan Gedung DPRD Kabupaten Pidie

Adapun beberapa fasilitas penunjang yang terdapat disekitar site perancangan Gedung DPRD Kabupaten Pidie, yaitu:

1. Berada di pinggir jalan raya yang dilewati oleh banyak kendaraan umum.
2. Dekat dengan kantor-kantor pusat pemerintahan Kabupaten Pidie .
3. Terdapat tugu melinjo sebagai icon kota di depan site.
5. Bersebelahan dengan Kantor Bupati, beberapa kantor dinas
6. Berhadapan dengan Kantor Samsat
7. Berdekatan dengan Polisi Militer (PM)

4.2.4 Sosial Budaya

Mayoritas masyarakat dan penduduk Kabupaten Pidie merupakan masyarakat yang memeluk agama islam yang kuat sehingga nilai-nilai islam sangat berpengaruh kepada

pedoman kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, masyarakat Pidie juga memiliki sifat sosial seperti gotong royong, saling kerja sama dan tolong menolong.

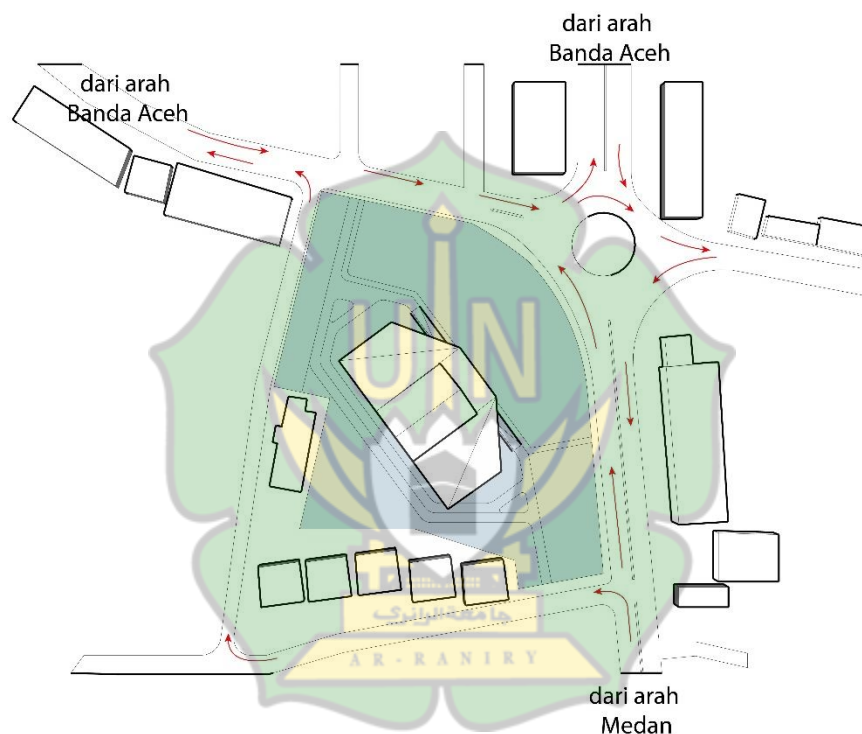
4.3 Analisis Tapak

4.3.1 Analisis Keamanan

a) Analisis keamanan jalan

1. Kondisi eksisting

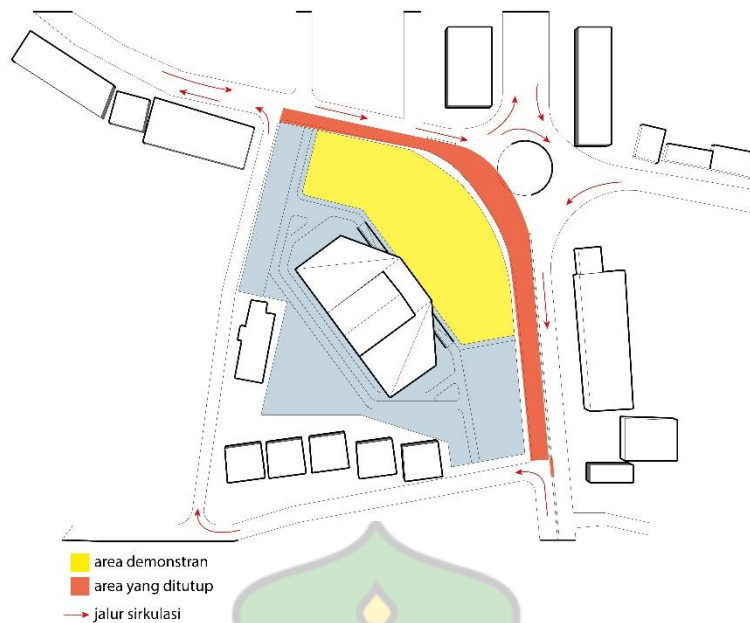
Lokasi berada pada area yang berdekatan dengan lampu lalu lintas (simpang empat) jalur antar provinsi sehingga faktor keamanan jalan harus benar-benar diperhatikan.



Gambar 4. 4: Kondisi sirkulasi jalan di sekitar lokasi
Sumber: Analisis pribadi

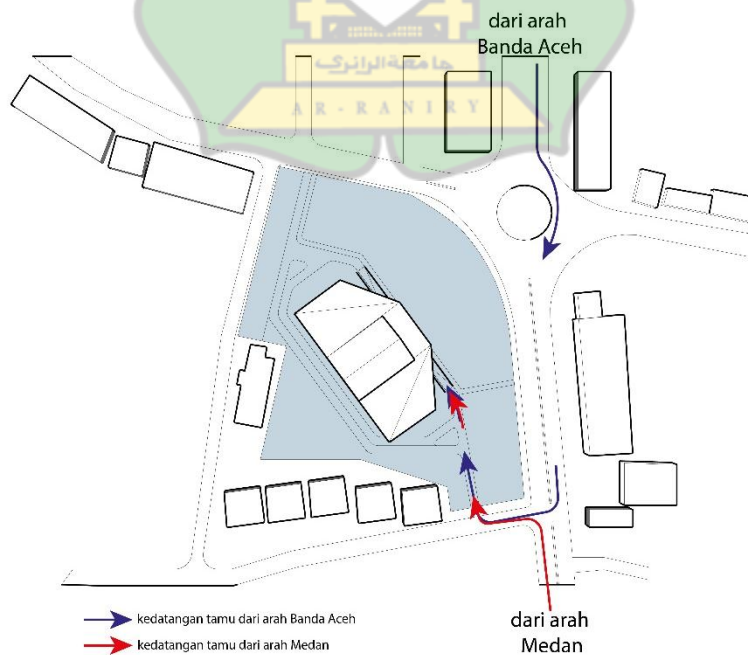
2. Tanggapan

Terdapat dua kondisi yang harus diperhatikan pada sistem keamanan sirkulasi. Yang pertama adalah kondisi saat demo dan yang kedua adalah saat ada tamu dari instansi pemerintahan. Pada saat demo jalur yang berada pada bagian di depan ditutup untuk menjaga keamanan pengguna jalan. Kemudian jalan akan dipantau oleh pihak keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi jalan bagian depan kemudian dialihkan kearah jalan belakang bangunan.



Gambar 4. 5: Kondisi sirkulasi jalan di sekitar lokasi saat demo
Sumber: Analisis pribadi

Pada kondisi saat ada tamu jalan akan dikawal oleh pihak keamanan Kabupaten Pidie. adapun sirkulasimnya adalah seperti gambar di bawah.

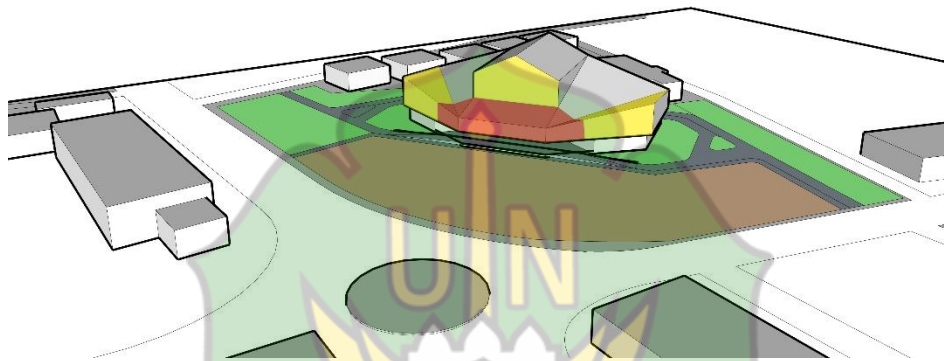


Gambar 4. 6: Kondisi sirkulasi jalan di sekitar lokasi saat kedatangan tamu
Sumber: Analisis pribadi

b) Analisis keamanan terhadap bangunan (aspek pertahanan)

Untuk mengatasi para pendemo yang anarkis bentuk bangunan akan dibuat menonjol kedepan sehingga sifat anarkis para pendemo akan terfokus ke bagian depan saja (zona pertahanan tinggi). Pada bagian serambi lantai satu juga dibuat area untuk audiensi sehingga para pendemo dapat ditahan terlebih dahulu di area serambi sebelum masuk ke dalam gedung. Pada fasade bagian depan juga dibuat dengan material yang tahan terhadap lemparan benda keras dari para pendemo.

- Zona bahaya tinggi
- Zona bahaya sedang
- Zona demostran



Gambar 4. 7: Analisis sistem pertahanan pada bangunan.
Sumber: Analisis pribadi

4.3.2 Analisis Klimatologi

Analisis klimatologi merupakan analisis yang dipengaruhi oleh iklim di mana site berada. Yang termasuk kedalam analisis klimatologi adalah analisis hujan & angin. Berikut merupakan analisis, tanggapan dan data yang diperoleh dari data pemerintahan Kabupaten Pidie:

a) Analisis hujan

1. Kondisi eksisting

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman website badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Pidie, maka didapat data tentang curah hujan di Kabupaten Pidie:

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa curah hujan pada Kecamatan Pidie 1094 dengan total hari hujan adalah 73. Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di daerah Kabupaten Pidie maka curah hujan pada Kecamatan Pidie lumayan tinggi namun hari hujannya tergolong rendah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa curah hujan pada Kecamatan Pidie seimbang antara curah hujan dengan hari hujannya.

REKAPITULASI DATA CURAH HUJAN DAN JUMLAH HARI HUJAN BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2012
DALAM WILAYAH KABUPATEN PIDIE

No.	KECAMATAN	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		TOTAL		
		CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	
1	Kota Sigli	90.0	7	63.0	7	80.0	14	51.5	8	99.0	6	2.0	2	15.0	3	82.0	7	69.0	10	84.5	12	159.5	17	388.0	20	1,183.5	113	
2	Tiro	245.3	15	232.0	15	166.2	12	299.5	18	70.2	12	38.0	5	31.3	9	38.9	9	120.5	18	-	-	-	-	-	-	-	1,241.9	113
3	Mila	176.8	11	172.0	10	99.8	7	151.0	10	122.9	7	7.0	1	17.5	3	107.4	6	156.0	5	-	-	-	-	-	-	-	1,010.4	60
4	Pidie	35.0	3	45.0	4	77.0	6	72.0	6	98.0	7	12.0	1	17.0	2	79.0	5	132.0	7	97.0	6	151.0	13	279.0	13	1,094.0	73	
5	Simpang Tiga	95.0	13	135.5	14	60.5	15	51.0	14	138.5	11	3.0	1	15.0	2	24.0	5	48.0	7	82.0	12	82.0	10	191.0	11	925.5	115	
6	Grogong-grogong	204.0	18	38.5	7	118.0	16	81.5	14	114.0	12	14.0	7	26.0	8	68.0	8	63.0	9	84.0	11	110.0	10	340.0	17	1,261.0	137	
7	Tangee	138.0	14	177.0	15	172.0	16	337.0	22	55.0	10	45.0	9	11.0	3	155.0	18	97.0	16	185.0	19	366.0	27	169.0	21	1,907.0	190	
8	Sakti	164.0	7	237.5	11	230.5	8	139.5	4	20.0	5	39.0	3	78.0	6	91.0	10	106.0	9	80.0	6	154.0	18	259.0	13	1,598.0	100	
9	Delima	115.0	8	99.5	8	65.5	11	83.0	11	102.5	10	99.0	5	28.7	2	99.0	6	42.5	5	91.5	11	134.2	15	267.5	18	1,227.9	110	
10	Peukan Baro	97.0	6	84.0	6	70.0	8	20.0	3	171.0	7	19.0	5	65.0	2	35.0	3	117.0	6	102.0	7	168.0	8	266.0	12	1,214.0	73	
11	Titeu	133.4	13	126.7	18	250.8	20	148.7	18	128.7	15	8.1	1	26.6	11	95.9	11	200.9	14	103.1	14	125.2	15	256.0	15	1,604.1	165	
12	Glumpang Tiga	200.0	18	36.0	19	44.0	15	50.0	17	13.0	3	-	-	3.0	2	16.0	3	27.0	6	8.0	3	-	-	-	-	-	397.0	86
13	Padang Tji	136.0	9	74.0	5	204.9	8	102.0	8	44.5	7	5.0	1	93.0	4	34.0	3	86.0	7	196.2	12	87.5	8	223.0	11	1,286.1	83	
14	Keumaia	280.0	18	111.0	14	249.5	19	229.5	18	101.0	18	8.0	2	219.0	15	219.0	9	300.0	12	414.0	18	217.0	15	325.0	16	2,673.0	174	
	JUMLAH	2,109.5	160	1,631.7	153	1,888.7	175	1,816.2	171	1,374.3	130	299.1	43	646.1	72	1,144.2	103	1,564.9	131	1,527.3	131	1,754.4	156	2,963.5	167	18,623.9	1,592	
	RATA-RATA	150.7	11	116.6	11	134.9	13	129.7	12	98.2	9	21.4	3	46.2	5	81.7	7	111.8	9	109.1	9	125.3	11	211.7	12	1,330.3	114	

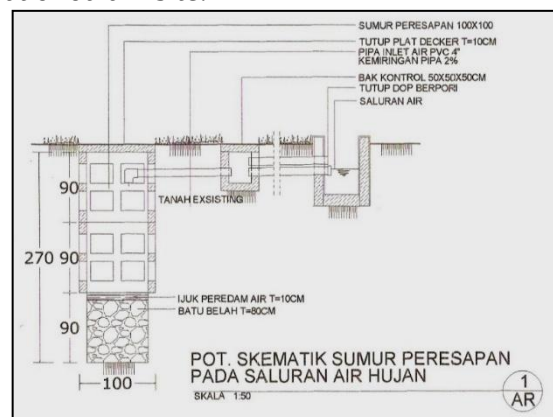
Sumber: Bidang Pengembangan Lahan & Perindungan Diras Pertanian dan Peternakan Kab. Pidie Tahun 2013

Keterangan : CH = Curah Hujan
HH = Hari Hujan

Gambar 4. 8: Data curah hujan Kabupaten Pidie 2012
Sumber: BPS Kab Pidie

2. Tanggapan

Tanggapan terhadap permasalahan hidrologi atau hujan yang lumayan tinggi maka solusi yang dapat diterapkan adalah mengalirkan air hujan kedalam drainase yang ada di sekeliling site. Selain mengalirkan air hujan ke drainase dalam perancangan nantinya juga menerapkan sistem sumur resapan untuk mengantisipasi jika drainase tidak dapat menampung air hujan. Sumur resapan sendiri nantinya juga bisa menjadi air cadangan Ketika musim kering, air sumur resapan juga dapat diaplikasikan untuk menyiram taman yang terdapat di dalam site.

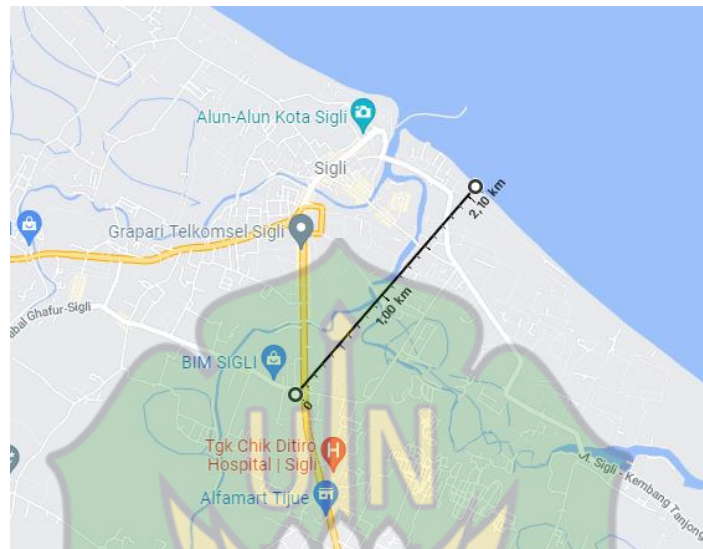


Gambar 4. 9: Skema sumur resapan
Sumber: skematik sumur resapan (Arif Jaya 2018)

b) Analisis Angin

1. Kondisi Eksisting

Dihitung pada 10 hari pada bulan November (musim hujan) kecepatan angin berkisar antara 8-11 km/jam dengan arah angin berasal dari timur laut dan timur-timur laut. Jarak lokasi site ke laut lumayan jauh sehingga kecepatan angin yang sampai ke lokasi site menjadi lebih rendah. Jarak dari lokasi site dengan garis pantai kurang lebih 2 km.



Gambar 4. 10: Jarak lokasi site ke garis pantai

Sumber: google maps

Sab 11	27°/20°	Badai Petir	94%	TL 10 km/j	▼
Min 12	28°/20°	Badai Petir	75%	TL 11 km/j	▼
Sen 13	28°/21°	Badai Petir	72%	TL 10 km/j	▼
Sel 14	27°/21°	Badai Petir	65%	TL 10 km/j	▼
Rab 15	27°/21°	Badai Petir	60%	TL 9 km/j	▼
Kam 16	27°/21°	Badai Petir	60%	TL 9 km/j	▼
Jum 17	27°/21°	Badai Petir	60%	TL 8 km/j	▼
Sab 18	27°/21°	Badai Petir	60%	TL 9 km/j	▼
Min 19	27°/21°	Badai Petir	60%	TTL 9 km/j	▼
Sen 20	28°/21°	Badai Petir	60%	TTL 8 km/j	▼
Sel 21	28°/21°	Badai Petir	60%	TL 8 km/j	▼

Gambar 4. 11: Data kecepatan angin dan arah angin Kab Pidie

Sumber: weather.com

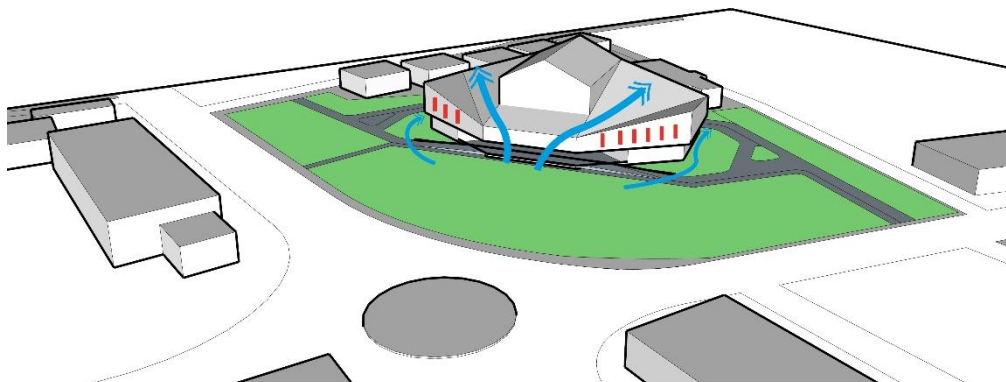


Gambar 4. 12: Ilustrasi arah angin
Sumber: dokumen pribadi

2. Tanggapan

Ancaman angin di sekitar site tidak terlalu berbahaya, namun kita juga perlu berjaga-jaga agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi. salah satu antisipasinya adalah dengan membuat vegetasi di sekitar site agar dapat meredam kekuatan angin, terutama di bagian arah timur laut dan timur-laut. Angin juga bisa menjadi potensi terhadap site. Dengan adanya angin dapat membuat site lebih sejuk dan sirkulasi udara bisa berfungsi dengan baik. Oleh karena itu sebisa mungkin bangunan nantinya menerapkan bukaan-bukaan yang dapat memaksimalkan fungsi angin.

- angin
- bukaan yang dimaksimalkan



Gambar 4. 13: Ilustrasi arah angin
Sumber: dokumen pribadi

a) Analisis matahari

Matahari adalah potensi yang baik terhadap bangunan, terutama matahari pada pagi hari yang dapat membuat semangat kerja. Arah orientasi bangunan menghadap langsung ke arah matahari terbit sehingga membuat potensi matahari pagi dapat dimanfaatkan dengan baik.



Gambar 4. 14: Ilustrasi tanggapan arah angin
Sumber: dokumen pribadi

4.3.3 Analisis Kontur

1. Kondisi Eksisting

Kondisi kontur sejajar dengan jalan. Keadaan kontur rata dan tidak ada yang perlu ditimbun atau dipotong.



Gambar 4.15: Keadaan kontur pada site
Sumber: dokumen pribadi

2. Tanggapan

Melihat dari keadaan kontur pada site yang sudah rata maka tidak perlu adanya tindakan terhadap kontur pada site. Site sudah layak untuk dibangun bangunan.

4.3.4 Analisis Kebisingan

1. Kondisi Eksisting



Gambar 4. 16: Analisis kebisingan

Sumber: Analisis pribadi

Sumber kebisingan berasal dari luar dan dari dalam. Kebisingan dari dalam berasal dari suara manusia yang melakukan kegiatan dalam ruangan.

Karena site berada di daerah yang ramai maka tingkat kebisingan di sekitar site berkisar dari tinggi, sedang, & rendah. Sumber kebisingan berasal dari jalan raya, ruko, terminal, dan pusat perkantoran.



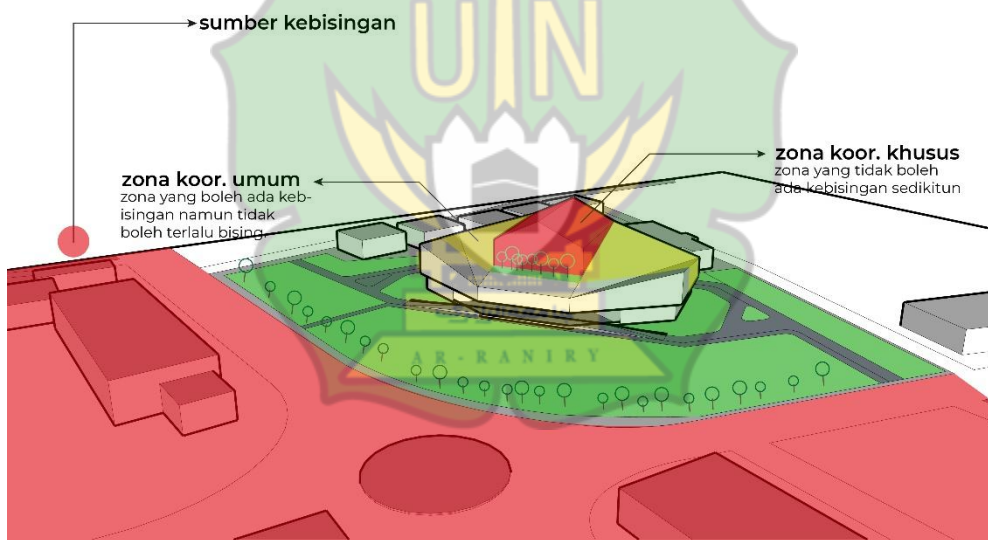
Gambar 4. 17: Tingkat kebisingan tapak

Sumber: Dokumen pribadi

2. Tanggapan

Karena keadaan site yang bising maka perlu penanganan lebih lanjut terhadap bangunan agar bangunan tetap nyaman dan tidak terganggu dengan kondisi sekitar.

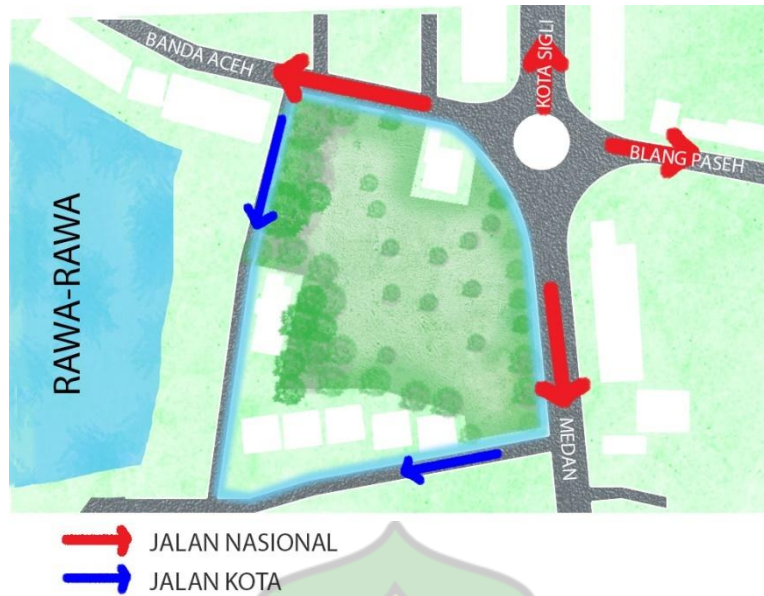
Penerapan pertama adalah penerapan yang mengantisipasi suara dari dalam agar tidak mengganggu ruangan-ruangan di sekitar asal suara yaitu dengan menerapkan dinding yang dilapisi dengan lapisan cat peredam suara, kemudian pada bagian lantai menggunakan alas karpet agar suara tidak menyebar dengan cepat, kemudian dengan membuat ruangan yang tertutup agar suara dari luar tidak masuk dan suara dari dalam tidak keluar. Selain dengan solusi di atas dapat juga mengantisipasi dengan tirai/gorden agar suara tersamarkan. Untuk sumber suara dari luar dapat diantisipasi dengan membuat jarak antara bangunan dengan pusat kebisingan (jalan raya, ruko, dan terminal). Langkah selanjutnya adalah dengan membuat peredam suara agar suara yang masuk ke site bisa di minimalisir, peredam suara dapat berupa pepohonan, taman, dan rumput. Langkah selanjutnya adalah membuat peredam suara pada beberapa ruang privat seperti ruang rapat paripurna, ruang fraksi dan ruang pimpinan. Kemudian untuk membuat suara kebisingan tidak terlalu terdengar adalah dengan meletakkan ruang-penting pada zona yang sedikit jauh dari sumber suara kebisingan.



Gambar 4. 18: Analisis tanggapan bangunan terhadap kebisingan
Sumber: Dokumen pribadi

4.3.5 Analisis Sirkulasi

1. Kondisi Eksisting



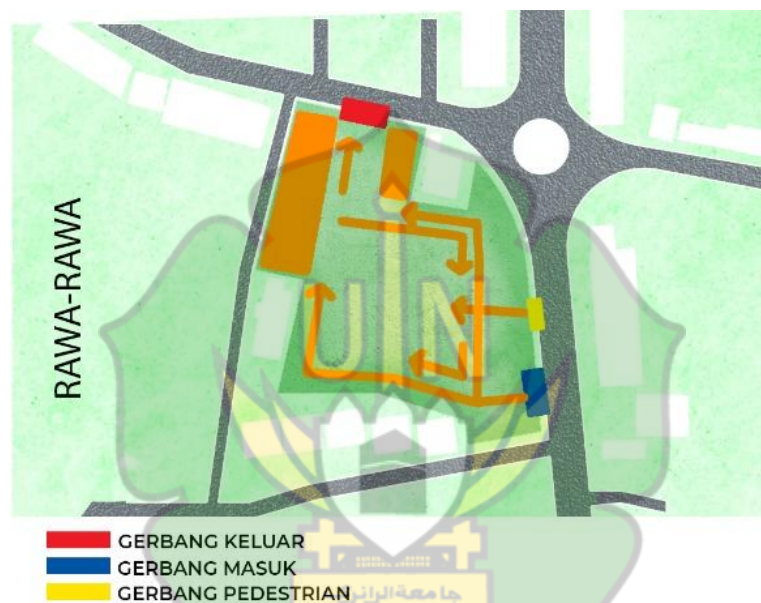
Gambar 4. 19: Analisis sirkulasi pada site

Sumber: Dokumen pribadi

Tapak dikelilingi oleh jalan. Adapun tipe jalannya berbeda-beda di setiap arahnya. Pada arah utara timur jalannya adalah jalan nasional Banda Aceh-Medan. Sedangkan pada sisi barat dan selatan adalah jalan dua jalur (jalan kota) dengan lebar kurang lebih 6,5 meter.

2. Tanggapan

Lokasi site yang berada pada pojok jalan/persimpangan membuat sirkulasi site harus benar-benar diperhatikan. Tanggapan pertama yang dapat ditawarkan adalah dengan meletakkan jalur masuk di sebelah jalan sebelah selatan yang berdekatan dengan bagian timur (pojok sebelah kiri bagian selatan). Pertimbangannya adalah untuk menghindari terjadinya macet pada jalan nasional dan agar arus transportasi tidak terlalu amburadul di sekitaran site. Alternatif kedua adalah dengan meletakkan gerbang masuk di area sebelah timur site, namun gerbangnya diletakkan di pojok yang berdekatan dengan arah selatan sehingga tidak mengganggu aktivitas *traffic light*.



Gambar 4. 20: Tanggapan sirkulasi alternatif 2
Sumber: Dokumen pribadi



Gambar 4. 21: Tanggapan sirkulasi alternatif 1
Sumber: Dokumen pribadi

4.4 Analisis Fungsional

4.4.1 Pendekatan Fungsi

Fasilitas Gedung DPRD Kab Pidie memiliki fungsi sebagai pusat perkumpulan para Anggota Dewan yang meliputi fasilitas utama seperti, ruang rapat paripurna, ruang fraksi, ruang komisi, ruang tamu dan fasilitas pendukung seperti ruang perpustakaan, kafe dan parkir yang luas.

4.4.2 Pendekatan Perilaku Kegiatan

Pendekatan tersebut dilaksanakan berdasarkan analisis jenis pelaku sehingga diperoleh jenis kegiatan yang dibutuhkan untuk pendekatan desain gedung dewan. Jenis pelaku meliputi:

a) Anggota dewan

Jumlah anggota dewan di Pidie berjumlah 40 Orang.

b) Pengunjung

Pengunjung dari fasilitas gedung dewan ini adalah orang-orang yang mengunjungi dan menggunakan segala macam fasilitas yang ada di gedung dewan dari daerah, Dinas-dinas, para camat, mahkamah syariah, Majelis pertimbangan Ulama, Hakim, Jaksa, kepolisian serta wartawan kepala.

c) Pengelola

Pengelola fasilitas gedung dewan ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola semua aktivitas yang berlangsung di fasilitas gedung dewan di Kabupaten

Pidie. Ada beberapa pengelola pada setiap fungsi dari aktivitas yang dilakukan, diantaranya:

- 1) Sekretariat dewan, mereka adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan administrasi dan operasional gedung dewan yang meliputi kepala bagian, kepala sub bagian rapat, kepala sub bagian TU, Staf (Analisis Data dan Informasi, Analisis tata usaha, pengelola persidangan, pengolahan data, dan pengadministrasi umum), dan Tenaga ahli (Bidang hukum tata Negara, sosial dan keagamaan, kebijakan publik dan keagamaan, bidang hukum bisnis, bidang ekonomi manajemen, bidang komunikasi massa dan ketahanan nasional, bidang sosial politik, bidang pendidikan dan keagamaan, serta bidang hukum keamanan maritim)
- 2) Bagian Pelayanan adalah orang yang bertanggung jawab atas layanan dan aktivitas teknis seperti penjaga keamanan, teknisi, dan layanan kebersihan.

4.4.3 Pendekatan Kebutuhan Ruang

Kebutuhan ruang Anggota Dewan di Kabupaten Pidie terutama dibagi menjadi beberapa kelompok kegiatan yang berbeda berdasarkan kegiatan yang dilakukan di dalamnya antara lain ruang pimpinan, kegiatan rapat paripurna, rapat komisi, fraksi, dan operasional. Kebutuhan ruang diperoleh dari analisis pendekatan pelaku dan kegiatan yang berlangsung sehingga muncul kebutuhan ruang sebagai berikut:

a) Kegiatan terkait tugas dewan

Berikut adalah tabel kebutuhan ruang terkait kegiatan tugas dewan:

Tabel 4. 3 Tabel kegiatan tugas dewan

No	Pelaku	Kegiatan	Kebutuhan ruang
1	Pimpinan DPRD	Mengatur kegiatan pelayanan yang terkait dengan fungsi Anggota Dewan	Ruang pimpinan 1
		Keperluan ke toilet Toilet pimpinan	Toilet pimpinan 1
2	Wakil pimpinan 2	Mengatur kegiatan pelayanan yang terkait dengan fungsi Anggota Dewan	Ruang pimpinan 2
		Keperluan ke toilet Toilet pimpinan	Toilet pimpinan 2
3	Wakil pimpinan 3	Mengatur kegiatan pelayanan yang terkait dengan fungsi Anggota Dewan	Ruang pimpinan 3
		Keperluan ke toilet Toilet pimpinan	Toilet pimpinan 3

4.	8 fraksi	Mengatur kegiatan tiap fraksi dari 40 Anggota Dewan	Ruang fraksi
		Keperluan ke toilet Toilet	Toilet ruang fraksi
5	5 komisi	Komisi A Pemerintahan, Komisi B ekonomi dan keuangan, Komisi C pembangunan, Komisi D kestra/pembangunan masyarakat, dan Komisi E Keistimewaan Aceh	Ruang komisi
		Keperluan ke toilet Toilet	Toilet ruang komisi
6	Paripurna	Melakukan rapat paripurna dengan seluruh aspek pemerintahan	Ruang paripurna
		Keperluan ke toilet Toilet	Toilet ruang paripurna

b) Kegiatan administrasi sekretariat dan operasional dewan

Berikut ini adalah tabel kebutuhan ruang untuk kategori kegiatan administrasi dan operasional dewan:

Tabel 4. 4 Tabel kebutuhan ruang administrasi dan operasional

Pelaku		Kegiatan	Kebutuhan ruang
1	Kepala bagian	Mengatur kegiatan pelayanan yang ada di gedung dewan	Ruang kepala bagian
		Keperluan ke toilet	Toilet kepala bagian
		Melakukan rapat dengan seluruh staff	Ruang rapat sekretariat dewan
		Mengatur kegiatan pelayanan yang ada di gedung dewan	Ruang kepala sub bagian rapat
2.	Kepala sub bagian rapat	Mengatur kegiatan pelayanan yang ada di gedung dewan	Ruang kepala sub bagian TU
3	Kepala sub bagian TU	Analisis Data dan Informasi, Analisis tata usaha, pengelola persidangan, pengolahan data, dan pengadministrasi umum	Ruang staf sekwan

4	Staf	Beristirahat	Pantry
		Keperluan ke toilet	Toilet anggota staf
		Bidang hukum tata Negara, social dan keagamaan, kebijakan public dan keagamaan, bidang hukum bisnis, bidang ekonomi manajemen , bidang komunikasi massa dan ketahanan nasional, bidang social politik, bidang pendidikan dan keagamaan, serta bidang hukum keamanan maritim	Ruangan tenaga ahli
5	Tenaga ahli	Keperluan ke toilet	Toilet anggota tenaga ahli
		Menyambut dan mengarahkan para pengunjung	resepsionis information
6.	Custumor Service	Ruang tunggu bagi tamu yang datang	Ruang tamu/Lobby utama
		Melakukan kegiatan berkumpul dan bersantai	Taman
		Melakukan kegiatan ibadah	Musala
		Keperluan ke toilet	Toilet umum
		Keperluan ke toilet	Toilet umum

c) Kelompok kegiatan service

Berikut adalah tabel kebutuhan ruang terkait kelompok kegiatan servis:

Tabel 4. 5: Tabel kebutuhan ruang kelompok servis

No	Kegiatan Service	Kegiatan	Kebutuhan ruang
1	teknisi	Melakukan perbaikan dan pengecekan terkait electrical engireering	Ruang panel
		Melakukan perbaikan dan pengecekan terkait dengan pompa air	Ruang Pompa
		Melakukan perbaikan dan pengecekan terkait dengan genset bangunan	Ruang genset

		Melakukan perbaikan dan pengecekan terkait dengan Pendingin udara bangunan	Ruang AHU
		Keperluan ke toilet	Toilet Service
2	Petugas Keamanan	Melakukan Kegiatan Pemantauan CCTV dan tempat berkumpul dan berkoordinasi petugas keamanan termasuk istirahat petugas keamanan	Ruang Petugas Keamanan
		Melakukan kegiatan pemantauan	Pos Jaga
		Menyimpan Alat Keamanan	Ruang Peralatan
		Keperluan ke toilet	Toilet Service
3	Petugas Kebersihan	Istirahat dan Ganti Baju Petugas Kebersihan	Ruang Petugas Kebersihan
		Menyimpan alat alat kebersihan	Janitor
		Membuang dan mengangkut sampah	Ruang Pembuangan Sampah
		Keperluan ke toilet	Toilet Service
4	Parkir	Tempat penyimpanan kendaraan	Parkir

4.4.4 Pendekatan Kapasitas Ruang

Berikut ini adalah tabel pendekatan kapasitas ruang yang dibutuhkan dalam perancangan gedung DPRD Pidie:

Tabel 4. 6: Tabel kapasitas ruang DPRD Pidie

Ruang	Pendekatan	Kapasitas
Ruang pimpinan 1	Terdiri dari 1 orang pimpinan dan para tamu yang hadir 9 orang	10 orang
Toilet		

Ruang pimpinan 2	Terdiri dari 1 orang pimpinan dan para tamu yang hadir 5 orang	6 orang
Ruang pimpinan 3	Terdiri dari 1 orang pimpinan dan para tamu yang hadir 5 orang	6 orang
Ruang fraksi sebanyak 8 ruang	Terdiri dari 5-15 orang dari tiap fraksi	15 orang
Ruang komisi sebanyak 5 ruang	Terdiri dari 5-10 orang tiap komisi	10 orang
Ruang paripurna	Terdiri dari 40 anggota dewan, 1 orang kepala daerah, masing 19 kepala dinas (Inpekterot, DPUPR, Dinsos, Dinkes, Disdik, DPP, DKP, Dishub, Disperindagkop, disdukcapil, DSI, diskominfo, disporabudpar, disungdup, dp3akb, dtkt, dinas perizinan, dinas pendidikan dayah), 6 orang kepala badan (bappeda, BPDB, KESBAGPOLINMAS, BPKK, BKPSDM), 6 orang kepala kantor (Baitul mal, satpol PP dan WH, MPU, MAA, MPK, Rsu tgk Chik Di tiro) 23 kepala camat, Hakim, Jaksa, kepolisian serta 15 wartawan	113 orang

4.5 Penzoningan

Lokasi site yang berada di daerah perkotaan yang rawan dengan kebisingan. Penempatan zonasi menjadi pertimbangan yang penting agar pembangunan Gedung DPRD nantinya sesuai dengan tujuan awal, yaitu merancang bangunan yang berfungsi dengan baik, nyaman, dan mewailiki nilai-nilai adat dan budaya. Yang paling harus diperhatikan pada Gedung DPRD adalah zonasi privat, yang mana zona ini harus dibuat senyaman dan sebaik mungkin. Atas pertimbangan di atas maka zona privat diletakkan di bagian barat selatan. Pertimbangannya adalah karna area sebelah selatan adalah area yang tidak terlalu bising dan jauh dari jalan raya sehingga bangunan nantinya terlihat lebih megah namun tidak terkesan sombong karena dilihat dari jarak yang lumayan jauh. Selanjutnya di bagian samping kanan zona privat diisi oleh zona publik. Di samping kanan zona publik diisi oleh zona taman. Di sebelah barat oleh zona service dan zona taman. Di sebelah selatan diisi dengan zona taman.

4.6 Pendekatan Besaran Ruang

Besaran ruang didapat dari beberapa sumber, diantaranya adalah:

1. Data arsitek
2. Permendagri
3. Analisis pribadi (berdasarkan survei)
4. Perpres
5. Scribd
6. Standar NFPA
7. Dirjen Perhubungan Darat
- a) Besaran ruang berdasarkan kegiatan tugas dewan

Berikut ini adalah perkiraan kebutuhan ruang untuk kelompok kegiatan tugas dewan:

Tabel 4. 7: Tabel besaran ruang kegiatan dewan

Ruangan	Kapasitas	Standard (m2)	Luas (m2)	Sumber
Ruang pimpinan 1	10 orang	13m ² /orang	130 m ²	Permen PU
Toilet pimpinan 1	1 orang	6 m ² /orang	6 m ²	Permen PU
Ruang pimpinan 2	6 orang	13m ² /orang	130 m ²	Permen PU
Toilet pimpinan 2	1 orang	6 m ² /orang	6 m ²	Permen PU
Ruang pimpinan 3	6 orang	13m ² /orang	130 m ²	Permen PU
Toilet pimpinan 3	1 orang	6 m ² /orang	6 m ²	Permen PU
Ruang fraksi	15 orang	10 m ² /0rang x 8	1.200 m ²	Analisis pribadi

Toilet ruang fraksi	1 orang	2 m ² /orang	2 m ²	perpres
Ruang komisi	10 orang	6 m ² /orang x 5	300 m ²	Analisis pribadi
Toilet ruang komisi	1 orang	2 m ² /orang	2 m ²	perpres
Ruang paripurna	113 orang	4 m ² /orang	452 m ²	Analisis pribadi
Toilet ruang paripurna	1 orang	2 m ² /orang	2 m ²	perpres
Ruang pembahasan	30 orang	4 m ² /orang	120 m ²	Analisis pribadi
Ruang audiensi	30 orang	4 m ² /orang	120 m ²	Analisis pribadi
total			2.606 m²	

b) Besaran ruang berdasarkan administrasi dan operasional dewan

Berikut adalah tabel perkiraan kebutuhan besaran ruang untuk kelompok administrasi dan operasional dewan:

Tabel 4. 8: Tabel besaran ruang kelompok administrasi dan operasional dewan

Ruangan	Kapasitas	Standard (m2)	Luas	Sumber
Ruang kepala bagian	4	2 m ² /orang	8 m ²	Data arsitek
Toilet kepala bagian	1	2 m ²	2 m ²	perpres
Ruang rapat sekretariat dewan	4	2 m ² /orang	8 m ²	Data arsitek
Ruang kepala sub bagian rapat	4	2 m ² /orang	8 m ²	Data arsitek
Ruang kepala sub bagian TU	4	2 m ² /orang	8 m ²	Data arsitek
Ruang staf sekwan	4	2 m ² /orang	8 m ²	Data arsitek
Pantry	2	2 m ² /orang	4 m ²	Data arsitek
Toilet anggota staf	1	2 m ²	2 m ²	perpres
Ruangan tenaga ahli	15	2 m ² /orang	30 m ²	Data arsitek
Toilet anggota tenaga ahli	1	2 m ²	2 m ²	perpres
resepsionis information	2	2,5 m ² /orang	5 m ²	Data arsitek
Ruang tamu/Lobby	20	0.9 m ² /orang	18 m ²	Data arsitek
Musala	113	0.8 m ² /orang (30% dari personil)	26,4 m ²	perpres

Toilet umum	1	2 m ²	2 m ²	perpres
Arsip & pustaka	4	2 m ² +4 m ² perabot	32 m ²	Analisis pribadi
total			158,4 m²	

c) Besaran ruang berdasarkan kelompok kegiatan service

Berikut ini adalah perkiraan kebutuhan besaran ruang kelompok servis:

Tabel 4. 9: Besaran ruang kelompok servis

Ruangan	Kapasitas	Standard (m2)	Luas	Sumber
Ruang panel	1	2,1 x 3,5 m ²	7,35 m ²	Data arsitek
Ruang Pompa	1	3,6 x 2,0 m ²	7,2 m ²	Standar NFPA
Ruang genset	1	6,0 x 4,5 m ²	27 m ²	scribd
Ruang AHU	1	15 m ²	15 m ²	Data arsitek
Toilet Service	1	2 m ²	2 m ²	perpres
Ruang Petugas Keamanan	1	2,5 m ²	2,5 m ²	Data arsitek
Pos Jaga	3	2,5 m ²	7,5 m ²	Data arsitek
Ruang Peralatan	1	2,5 m ²	2,5 m ²	Data arsitek
Ruang Petugas Kebersihan	2	2,5 m ²	5,0 m ²	Data arsitek
Janitor	1	1,5 m ²	1,5 m ²	Data arsitek
Ruang pembuangan sampah	1	2,5 m ²	2,5 m ²	Data arsitek
Parkir	125 mobil	SRP 2,5x5 m ² /mobil	1.562,5 m ²	Dirjen Perhubungan Darat
	120 motor	SRP 0,7x2 m ²	168 m ²	Dirjen Perhubungan Darat
total			1.810,55 m²	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa total kebutuhan ruang adalah **2.606 m²+158,4 m²+ 1.810,55 m²= 4.574,95 (dibulatkan menjadi 4.575)**. selanjutnya besaran tersebut dijumlahkan dengan sirkulasi sebesar **30% (4.575x30%=1.372,5)** maka total kebutuhan ruang keseluruhan adalah **4.575+1.372,5=5.947,5**. Lahan yang terpakai adalah 25%

dari luas lahan. 75% Sisa lahan nantinya akan dijadikan untuk taman(ruang hijau) dan area untuk masyarakat (dapat digunakan Ketika demo). Karena ini adalah gedung dewan yang mana identik dengan kehormatan maka bangunan akan dibangun 3 lantai agar terlihat megah. Adapun pembagian porsi lantai satu 30% ,lantai dua 35% dan lantai tiga 35%.

Garis Sepadan Bangunan (GSB) Kabupaten Pidie untuk kategori jalan nasional adalah 20 m diukur dari jarak garis as jalan (Pidie et al., 2012). Sedangkan untuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) tidak dijelaskan secara langsung batasannya, namun pada pasal 10 ayat 4 poin f dijelaskan bahwa bangunan boleh dibangun lebih dari 2 lantai (Pidie et al., 2012). Maka oleh karena itu bangunan 3 lantai masih diperbolehkan untuk dibangun. Dari persyaratan GSB dan KLB maka kebutuhan ruang dan luasan site sudah memenuhi kriteria untuk dibangun Gedung DPRD Kabupaten Pidie.



BAB V

PENERAPAN KONSEP

5.1 Konsep Dasar

Konsep dasar perancangan Gedung DPRD Pidie adalah menggunakan konsep “Analogi”. Konsep analogi adalah penerapan konsep yang menghubungkan sifat dan bentuk khas suatu benda kedalam desain (purwaningtyas, 2016). Konsep ini merupakan penyesuaian antara nilai-nilai kebudayaan dengan jenis gedung sehingga nantinya gedung dapat mewakili identitas dari nilai-nilai budaya dan adat didaerah Pidie. Adapun penerapan konsepnya adalah *rumoh santeut (tampong limbong)*. *Rumoh santeut* adalah rumah adat asli yang berasal dari Pidie, rumah ini sangat mewakili nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Pidie sehingga Ketika nantinya diterapkan ke Gedung DPRD Kabupaten Pidie dapat mewakili identitas masyarakat Pidie.

Rumoe h santeut adalah rumah adat masyarakat aceh yang digunakan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, perbedaan dari *rumoe h santeut* dengan *rumoh aceh* terletak pada lantai dasar yang sejajar tanpa adanya elevasi lantai. *Rumoh santeut* dapat juga disebut sebagai *rumoh aceh* dalam versi yang lebih sederhana, hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan material yang lebih murah dan tidak banyak ukiran pada bagian dinding rumah. Pembagian ruang antara *rumoh santeut* dan *rumoh aceh* sama, yaitu ruang depan (*seuramoe keu*), ruang tengah (*rumoe h inoeng*) dan ruang belakang (*seuramoe likot*).

Pada penerapannya nanti nilai-nilai yang diambil adalah berupa nilai fisik yang ada pada fasade bangunan *rumoh santeut* dan nilai yang tidak terlihat seperti aktivitas dan zonasi ruang. Nilai-nilai yang diterapkan menjadi konsep diantaranya adalah :

- a) Konsep rumah panggung. Konsep ini mengikuti dari bentuk *rumoh santeut* yang mana rumah tersebut adalah rumah panggung yang bagian bawahnya digunakan sebagai tempat untuk vegetasi dan juga untuk tempat saling bertemu (diskusi).
- b) Menerapkan kesetaraan (*santeut*) pada bentuk bangunan.
- c) Konsep fasade bentuk ornamen dari *rumoh santeut* sehingga bentuk bangunan nantinya kental dengan nilai adat dan budaya Kabupaten Pidie
- d) Konsep kesederhanaan, bangunan dibuat dengan bentuk yang menarik namun sederhana karena sesuai dengan bentuk *rumoe h santeut* yang sangat sederhana. Gedung dewan adalah gedung yang mewakili rakyat jadi harus memiliki nilai kesederhanaan dan merakyat.
- e) Konsep ramah terhadap lingkungan dengan membuat banyak ruang hijau.

- f) Konsep zonasi ruang menggunakan konsep pragmatis yang memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan fungsi ruang sehingga dapat berguna/berfungsi dengan baik.
- g) Konsep parkir menggunakan konsep linear sehingga pola parkir tertata rapi dan penggunaan lahan menjadi maksimal.
- h) Konsep ramah terhadap para pendemo dengan membuat area bangunan berada sedikit lebih kebelakang site sehingga area depan menjadi lebih luas dan memperhatikan ketahanan bangunan terhadap sikap anarkis para pendemo.
- i) Menggunakan warna yang kuat dan kontras seperti warna putih, abu-abu, dan coklat.
- j) Konsep bangunan memaksimalkan bukaan-bukaan yang besar sehingga cahaya yang masuk cukup.
- k) Bangunan ramah untuk semua. Karena ini adalah bangunan pemerintah maka bangunan harus benar-benar ramah terhadap semua, terutama terhadap disabilitas dan lansia.

5.2 Rencana Tapak

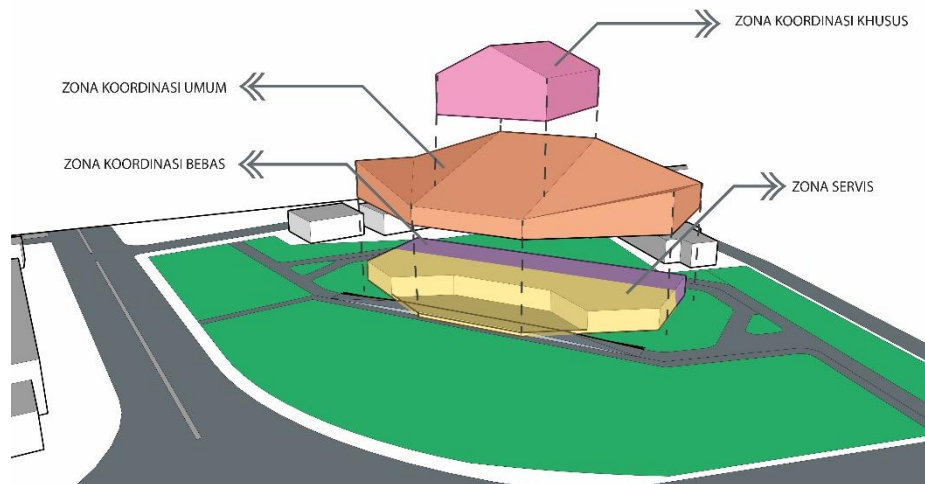
Rencana tapak adalah pengembangan dari konsep dasar yang kemudian bisa dikembangkan menjadi beberapa hasil diantaranya adalah dikembangkan menjadi konsep pemintakatan, konsep tata letak ruangan, konsep pencapaian, konsep sirkulasi dan parkir.

5.2.1 Konsep Pemintakatan

Pemintakatan adalah pengelompokan zona-zona ruangan yang dibuat berdasarkan jenis dan sifat kegiatan di dalamnya sehingga kegiatan dalam sebuah bangunan menjadi lebih rapi dan teratur. Berikut ini adalah tabel pembagian pemintakatan pada bangunan Gedung DPRD Kabupaten Pidie :

Tabel 5. 1: Tabel pembagian zoning

NO	Kelompok ruang	Jenis zonasi
1	Kelompok kegiatan terkait tugas dewan	Zona koordinasi khusus
2	Kelompok kegiatan administrasi dan operasional dewan	Zona koordinasi umum
3	Kelompok servis	Zona servis
4	Kelompok pengunjung	Zona koordinasi bebas



Gambar 5. 1: Zonasi Pemintakan
Sumber: Dokumen pribadi

5.2.2 Sirkulasi dan Parkir

Sirkulasi di dalam site dibuat dengan konsep dapat berputar sehingga membuat pengguna tidak perlu memutar dari luar. Penempatan tempat parkir diletakkan di bagian



Gambar 5. 2: Sirkulasi dan parkir
Sumber: dokumen pribadi

belakang agar tidak mengganggu view dari luar kedalam bangunan. Gerbang masuk ditempatkan pada bagian barat site dan gerbang keluar diletakkan di sebelah timur. Pertimbangan penempatan gerbang di sebelah barat agar tidak mengganggu lalu lintas jalan utama. Jalur keluar dibuat disebelah timur agar Ketika kendaraan keluar tidak mengganggu aktivitas lampu lalu lintas.

5.3 Konsep Bangunan dan Gubahan Massa

5.3.1 Konsep Massa Bangunan

Konsep massa bangunan diadopsi dari bentuk dan nilai-nilai pada *rumoeh santeut*. Adapun beberapa bentuk yang diambil diantaranya adalah fasade depan, panggung, dan bentuk atap.



Gambar 5. 3: Fasade *rumoeh santeut*

Sumber: Dokumen pribadi

a) Fasade *Rumoeh santeut*

Bentuk fasade yang diambil adalah 3 bagian yang membagi ruang *Rumoeh santeut*. 3 bagian tersebut adalah *seuramoe keu* (ruang depan), *seuramoe tangoeh* (ruang tengah), dan *seuramoe likot* (ruang belakang).

b) Panggung

Penerapan panggung nantinya tidak sepenuhnya berbentuk panggung, melainkan bangunan hanya terlihat seperti berada di atas.

c) Bentuk atap

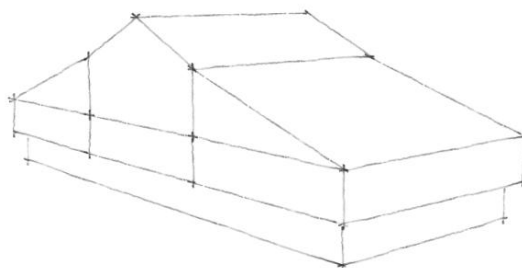
Bentuk atap nantinya bukan diletakkan di bagian atap, melainkan pada bagian depan bangunan. Tujuannya adalah agar bangunan terlihat lebih bermartabat dengan adanya bentuk atap segitiga pada fasade depan bangunan.



Gambar 5. 5: Atap rumoeh santeut

Sumber: dokumen pribadi

dari ketiga elemen bentuk di atas maka lahirlah sebuah bentuk konsep bangunan. Bentuknya adalah seperti gambar di bawah ini:

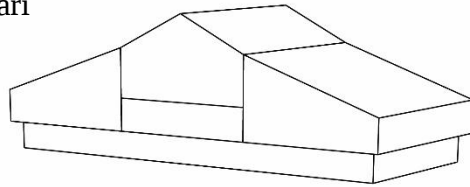


Gambar 5. 4: Konsep massa bangunan gedung DPRD Pidie

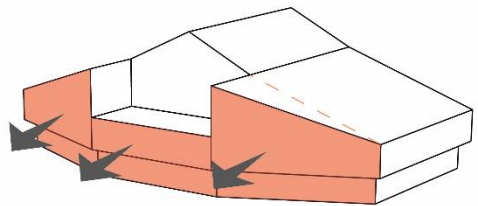
Sumber: dokumen pribadi

5.3.2 Gubahan Massa

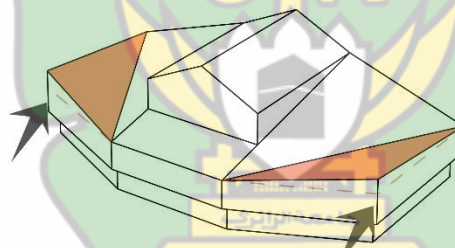
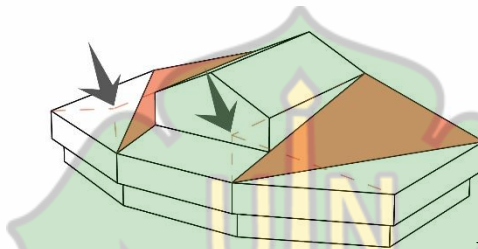
Massa bangunan berasal dari bentuk *Rumoh Santeut*.



Kemudian bagian yang menonjol diturunkan kebawah agar memaksimalkan potensi matahari pagi dan juga sirkulasi angin.



Pada bagian depan dimajukan, tujuannya adalah untuk memfokuskan area pertahanan.



Kemudian pada bagian samping depan dinaikkan untuk menjawab solusi dari kebisingan untuk lantai 3 dan dapat memberikan kesan yang dinamis pada tampak depan bangunan.

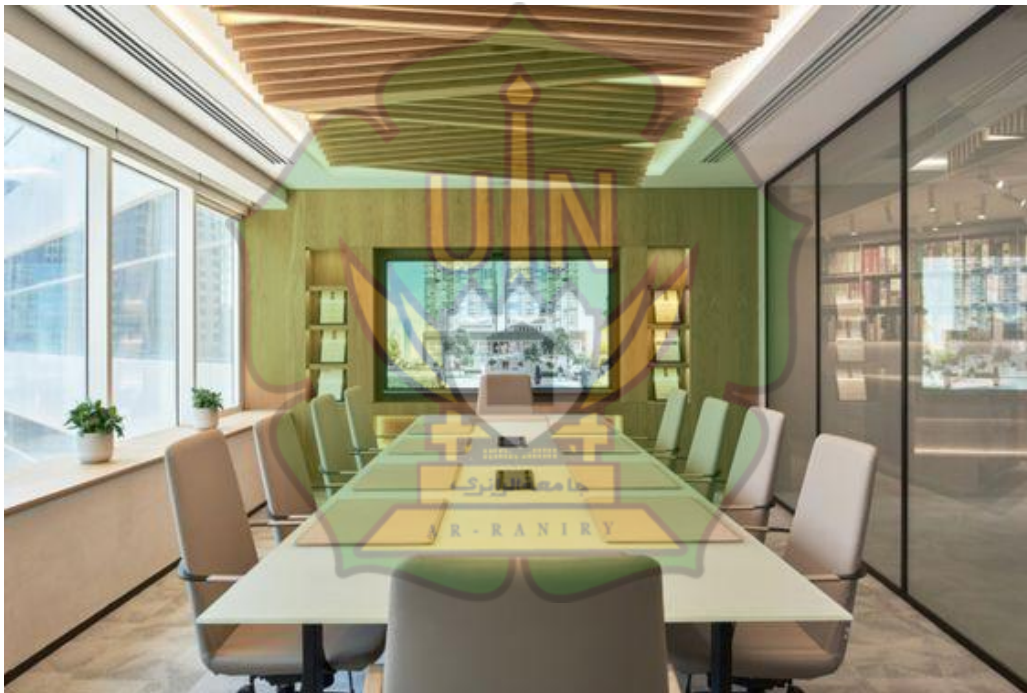
Gambar 5. 6: Gubahan massa bangunan gedung DPRD Pidie
Sumber: Dokumen pribadi

5.4 Konsep Ruang Dalam

Ruang dalam pada bangunan Gedung DPRD Pidie mengacu pada pendekatan *neo vernakular*. Konsep ini memberikan kesan kedaerahan pada ruang dalam bangunan. Selain kesan kedaerahan ruang dalam nantinya juga sangat memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengguna bangunan. Berikut adalah beberapa konsep yang akan diterapkan pada ruang dalam bangunan Gedung DPRD Pidie:

1. Furnitur dengan bentuk yang modern dan nyaman dipakai. Pengaplikasiannya adalah dengan menggunakan pola garis dan simetris sehingga suasana di dalam ruangan terlihat rapi dan nyaman untuk digunakan.

Untuk menjawab problem dari isu yang ada pada gedung dewan terkait pelemparan kursi Ketika sedang rapat paripurna berlangsung, maka pada ruang paripurna furnitur kursi dirancang kursi yang besar, berat dan nyaman. Tujuan dari kursi yang berukuran besar dan berat adalah agar para peserta sidang harus berpikir dua kali Ketika ingin melempar kursi. Kemudian meja yang digunakan adalah meja yang menyatru dengan lantai sehingga tidak dapat dipindahkan. Pada sekeliling dinding juga digunakan material yang keras dan berserat, tujuannya adalah untuk keamanan sekaligus sebagai peredam suara.



Gambar 5. 7: Ilustrasi furniture ruang dalam
Sumber: Officenapshots.com



Gambar 5. 8: Ilustrasi kursi ruang sidang
Sumber: jmm.es

2. Penggunaan warna pada ruang dalam adalah warna-warna yang terkesan tradisional seperti warna coklat, warna abu-abu dan warna putih. Agar tidak terlihat membosankan maka ditambah dengan elemen-elemen tumbuhan hijau sehingga ruang dalam terkesan ramai dan segar.



Gambar 5. 9: Ilustrasi konsep warna
Sumber: fourseasons.com

3. Penggunaan kaca-kaca yang lebar agar mendapat pencahayaan yang cukup. Untuk menghindari panas pada sisi dalam kaca dipakai *sollar roller shade* agar cahaya yang masuk tidak terlalu berlebihan. Penggunaan kaca yang lebar juga bertujuan agar ruang dalam tidak terasa sempit.

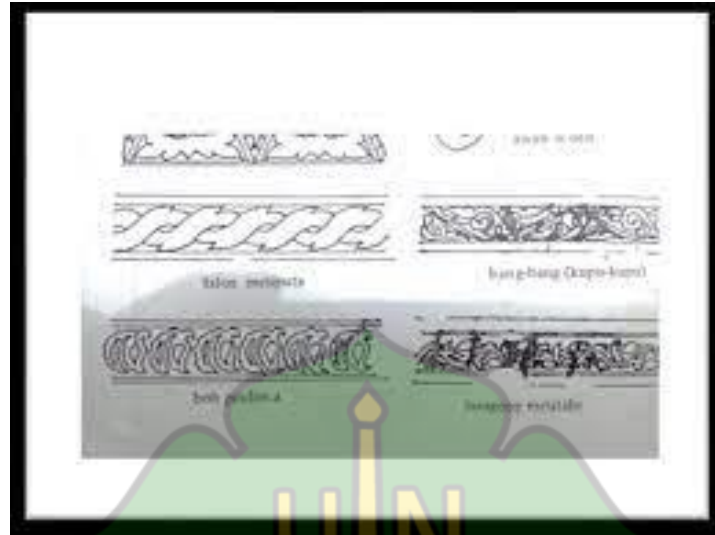


Gambar 5. 11: Ilustrasi roller solar shades
Sumber: homedepot.ca



Gambar 5. 10: Ilustrasi konsep kaca pada ruangan
Sumber: smithhandnoble.com

4. Penggunaan ornament-ornamen dan simbol dengan ciri khas keacehan sehingga Ketika pengguna berada di dalam ruangan pengguna merasakan nilai-nilai adat dan budaya aceh.



Gambar 5. 12: Ornament khas Aceh yang diterapkan pada ruang dalam
Sumber: *ejurnalunsam*



Gambar 5. 13: Ornament khas Aceh yang diterapkan pada ruang dalam
Sumber: disbudpar.acehprov.go.id

5. Penerapan konsep yang berbeda dari setiap zonasi sehingga setiap zonasi memiliki kesan yang berbeda. Pada zonasi koordinasi khusus penerapan

konsepnya berupa bentuk ruangan yang megah dan besar. Pada zonasi koordinasi umum penerapan konsepnya berupa suasana ruangan yang elegan. Pada zona koordinasi bebas suasana yang dibangun adalah suasana yang luas dan ramah terhadap publik. Untuk zona servis konsepnya memperhatikan fungsi dari ruangan.

5.5 Konsep Ruang Luar (Lanskap)

Isu yang harus paling diperhatikan dari Gedung DPRD adalah isu pendemo. Oleh karena itu pada konsep ruang luar yang harus diperhatikan adalah *open space* sehingga terdapat ruang untuk pendemo. kemudian selain para pendemo Gedung DPRD harus memperhatikan para lansia dan disabilitas. selain itu juga pada Gedung DPRD dibutuhkan udara yang segar sehingga membutuhkan ruang hijau (taman). hal di atas dapat dikategorikan menjadi 2 elemen, yaitu elemen keras dan elemen lunak.

5.5.1 Elemen Keras

1. Pedestrian atau jalur pejalan kaki didesain menggunakan material *paving block*. Pada bagian tengah dibuat *guiding block* dari pedestrian dibuat, kemudian pada bagian yang memiliki elevasi akan ditambahkan *ramp* (bidang miring) agar bisa dilalui oleh kursi roda. Selain itu pada pinggiran pedestrian akan di buat railing



Gambar 5. 14: Paving block

Sumber: rumah.com

agar para ibu hamil dan lansia dapat berjalan dengan bertumpu pada *railing* pada saat berjalan maupun saat kelelahan.



Gambar 5. 16: *Ramp*
Sumber : krjogja



Gambar 5. 15: *Guiding block*
Sumber : krjogja

2. *Open space* untuk par pendemo dibuat dengan material *paving block*. Tempat untuk pendemo tidak menggunakan seluruh area terbuka, namun hanya 50%

dari area terbuka.50% sisanya akan digunakan sebagai area terbuka hijau dan taman.

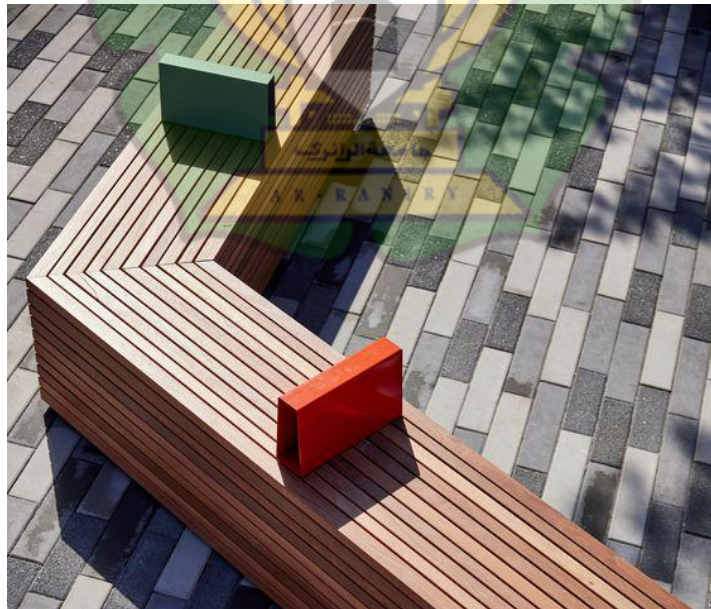
3. Sumur resapan juga akan ditempatkan di beberapa titik agar air tidak tergenang pada halaman Gedung DPRD Pidie.



Gambar 5. 17: Ilustrasi sumur resapan

Sumber: tribun

4. Pada beberapa titik juga akan ditempatkan bangku untuk para pengunjung dan tamu duduk dan berbincang.



Gambar 5. 18: Ilustrasi bangku

Sumber: artformurban.co.uk

5.5.2 Elemen Lunak

1. Vegetasi pada tapak akan ditanami dengan tumbuhan dengan ukuran besar, sedang, dan kecil. Pohon besar dapat berupa pohon palm dan pohon melinjo.

tumbuhan sedang yang akan ditanami di area tapak Gedung DPRD Pidie adalah bunga cempaka (*bungoeng jeumpa*) dan beberapa bunga-bunga lainnya seperti melati dan mawar. Untuk tumbuhan kecil dapat berupa tanaman hias seperti bunga-bunga kecil di taman.

2. Rumput jepang digunakan untuk menutup bagian tanah pada tapak agar terlihat lebih rapi dan bersih.



Gambar 5. 19: Pohon cempaka yang merupakan tumbuhan khas Aceh
Sumber: mbizmarket



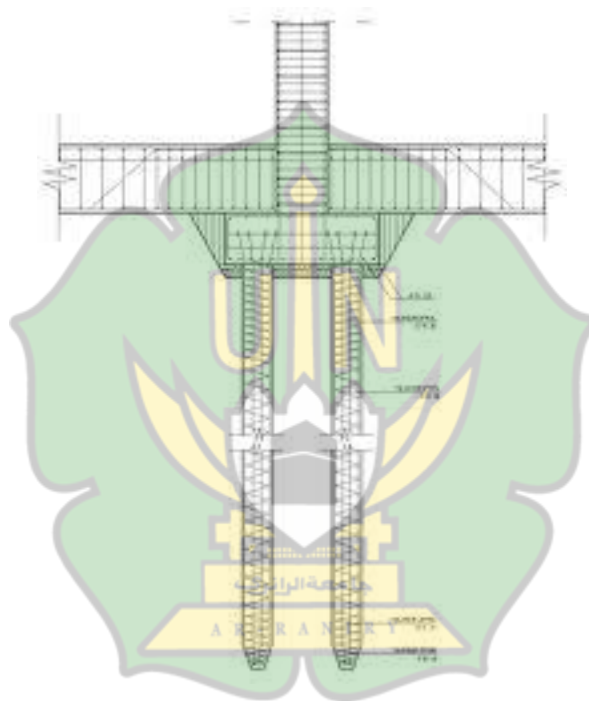
Gambar 5. 20: Pohon melinjo yang merupakan tumbuhan khas Pidie
Sumber: wordpress.com

5.6 Konsep Struktur, Konstruksi dan Utilitas

Bangunan Gedung DPRD Pidie dibangun dengan 3 lantai sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari struktur, konstruksi dan utilitas.

5.6.1 Struktur Bawah (*Lower Structure*)

Struktur bawah adalah struktur yang menopang seluruh struktur di atasnya, dalam hal ini adalah pondasi. Pondasi yang digunakan pada bangunan Gedung DPRD Pidie adalah pondasi tiang pancang. Alasan memilih pondasi tiang pancang adalah dikarenakan bangunan Gedung DPRD Pidie dirancang dengan 3 lantai sehingga membutuhkan pondasi yang kuat dan kokoh.



Gambar 5. 21: Pondasi tiang pancang
Sumber: septianantoni.wordpress.com

5.6.2 Struktur Atas (*Upper Structure*)

Struktur atas adalah struktur yang berada di atas struktu bawah, struktur atas mencakup lantai, kolom, balok dan dinding. Setiap bagian tersebut memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah fungsi dari setiap elemen struktur atas, diantaranya adalah :

1. Kolom memiliki fungsi sebagai penopang balok dan beban lantai di atasnya. Kolom terbuat dari beton bertulang.
2. Balok berfungsi sebagai penyalur beban dari atas untuk disalurkan ke kolom. Balok terbuat dari beton bertulang.

3. Dinding berfungsi sebagai elemen penutup pada bangunan. Dinding pada bangunan Gedung DPRD Pidie dibuat dari batu bata dan beton.
4. Lantai berfungsi sebagai tempat pijakan pada bangunan.

5.6.3 Struktur Atap

Pada perancangan Gedung DPRD Pidie atap yang digunakan adalah gabungan atap pelana dan atap dak beton. Atap pelana diaplikasikan pada bagian *drop off* sedangkan atap dak beton diaplikasikan pada atap utama. Penggunaan atap dak akan disesuaikan dengan bentuk bangunan. Pada pinggiran atap dak akan dibuatkan talang agar dapat mengatasi masalah hujan.



Gambar 5. 22: Atap pelana
Sumber: lacakharga



Gambar 5. 23: Atap dak
Sumber: 99.co

5.7 Konsep Utilitas

5.7.1 Sistem Plumbing

1. Jaringan air bersih

Jaringan air bersih pada bangunan Gedung DPRD Pidie menggunakan sistem penampungan tangka atap. Jadi alurnya adalah air yang disalurkan dari PDAM disalurkan ke ground tank, kemudian dari ground tank air dipompa menuju tangka atas dan kemudia dari tangka atas air disalurkan ke dalam bangunan



Gambar 5. 24: Ilustrasi jaringan air bersih

Sumber: okezone.com

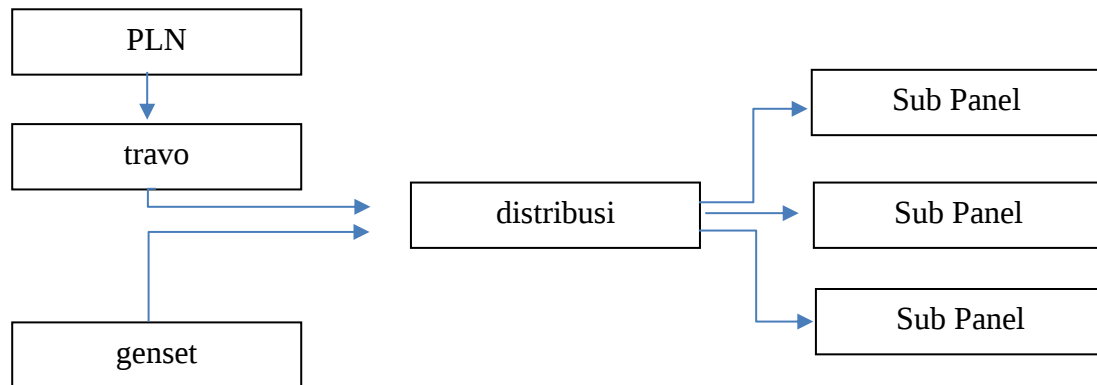
2. Sistem jaringan air kotor

Sistem jaringan air kotor dibagi menjadi tiga, yaitu:

- Limbah toilet: limbah toilet dibuang ke septic tank dan kemudian diangkut dengan mobil pengangkut tinja untuk dibawa ke roil kota.
- Limbah kamar mandi dan dapur: limbah kamar mandi dan dapur langsung dibuang ke parit yang berada disekeliling bangunan, kemudian dari parit dialirkan ke roil kota.
- Air hujan: air hujan dialirkan ke sumur resapan. Beberapa airtetap itmapung di dalam sumur dan dapat digunakan Kembali utuk menyiram tanaman. Air hujan yang meluap dari sumur resapan di alirkan ke parit menuju ke riol kota.

5.7.2 Sistem Jaringan Listrik

Sistem jaringan listrik pada bangunan DPRD Pidie menggunakan listrik dari PLN dan juga bantuan *genset* (*generator set*) yang dapat bekerja apabila listrik dari PLN padam.

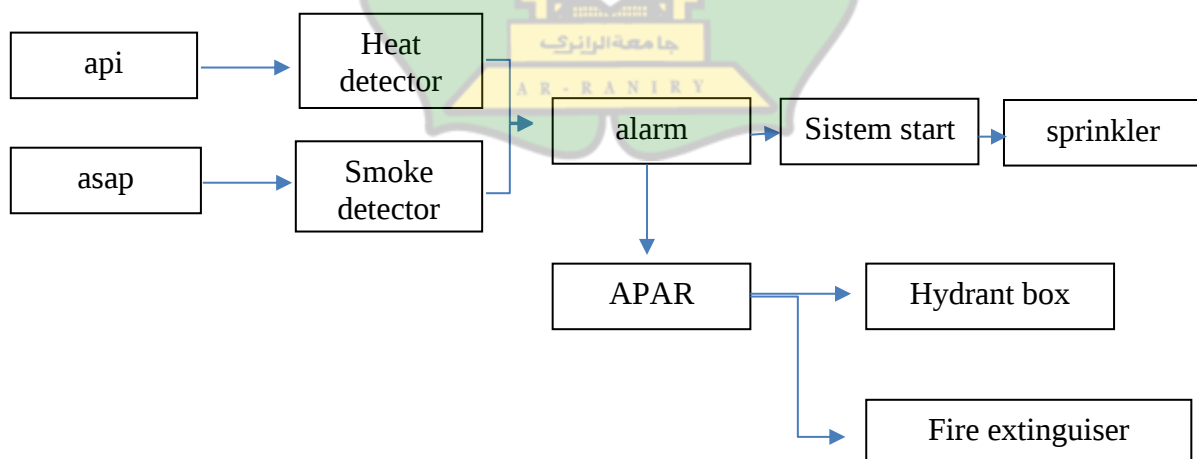


Gambar 5. 25: Skema jaringan listrik

Sumber: Analisis pribadi

5.7.3 Sistem Pemadam Kebakaran

Sistem pemadam kebakaran yang digunakan untuk mendeteksi api adalah heat detector dan smoke detector. Pemadaman api dilakukan dengan menggunakan sistem *sprinkler*, *hydrant box*, *hydrant Pillar* dan *fire ekstingusiers*.

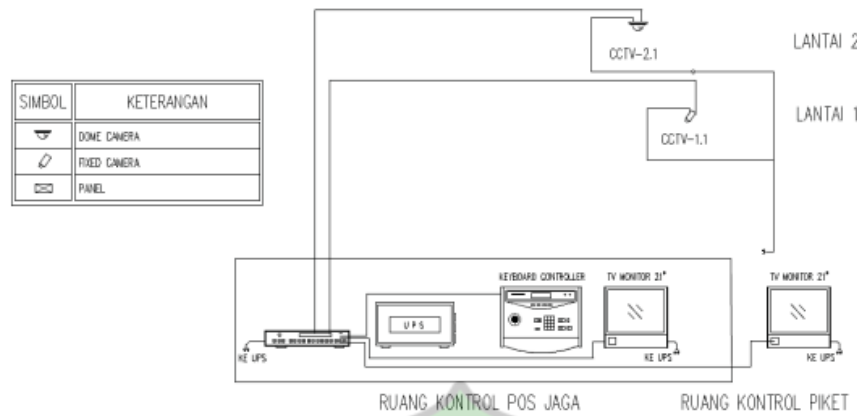


Gambar 5. 26: Skema pemadam kebakaran

Sumber: prabana, 2017

5.7.4 Sistem Keamanan

Sistem keamanan pada bangunan Gedung DPRD Pidie menggunakan cctv. Cctv dipantau dari ruang pos keamanan untuk mengawasi keadaan di sekitar bangunan dan di dalam bangunan.

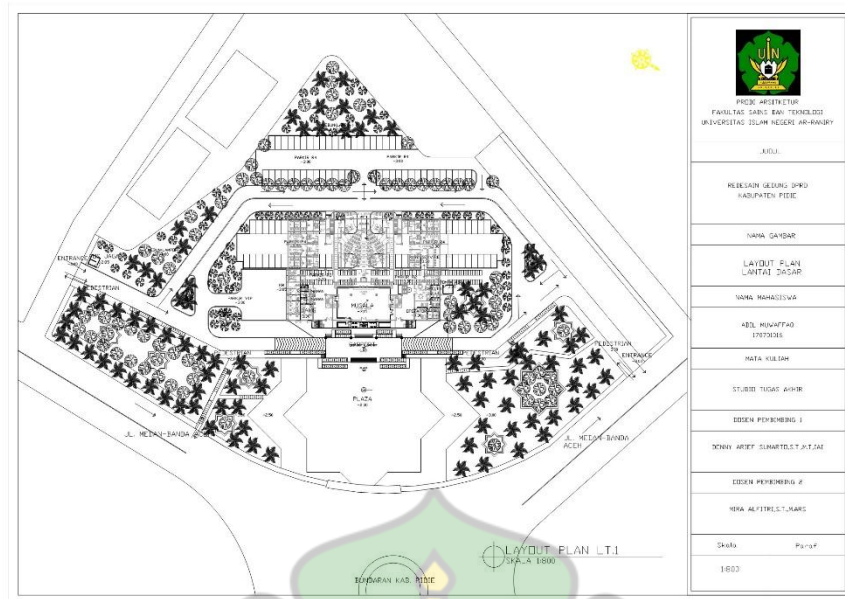


Gambar 5. 27: Sistem keamanan

Sumber: prabana, 2017

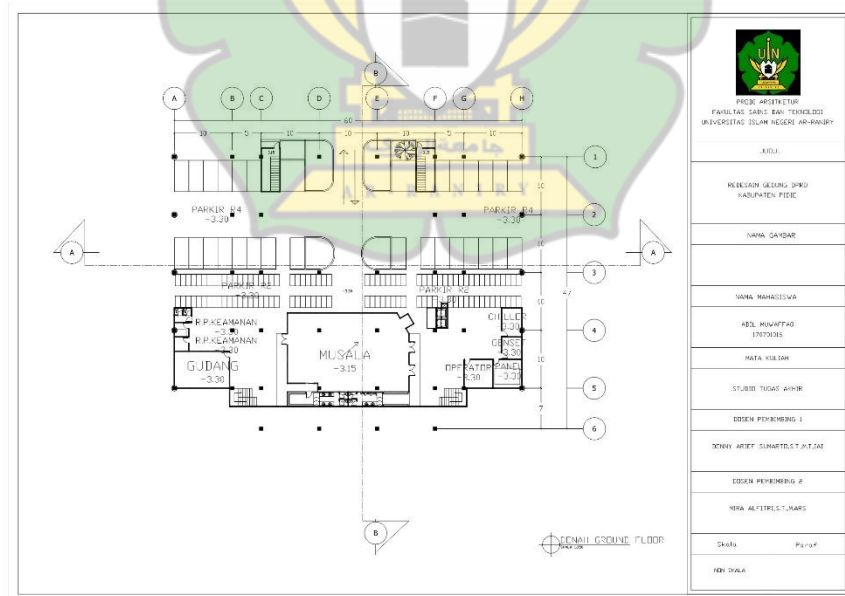


6.1.3 Layout Plan



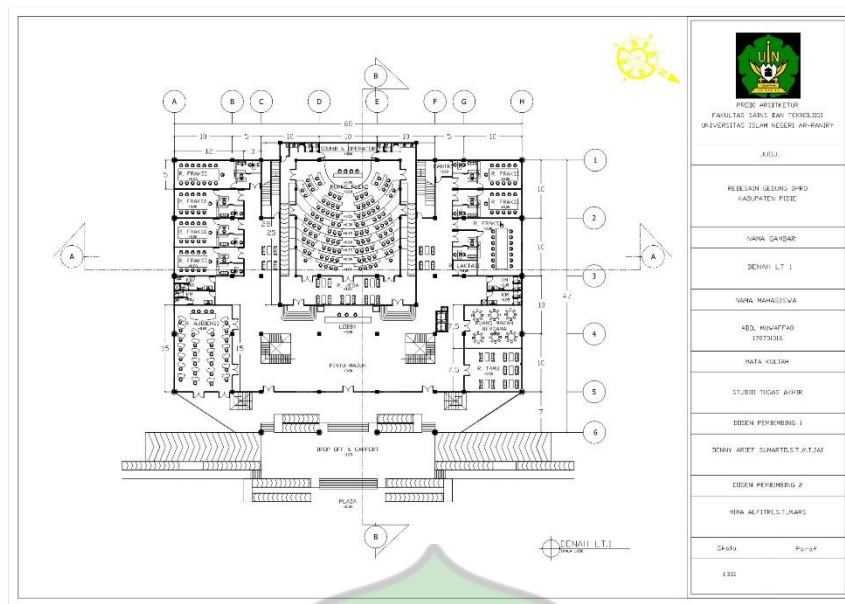
Gambar 6.3: Layout Plan
Sumber: Dokumen Pribadi

6.1.4 Denah Ground Floor



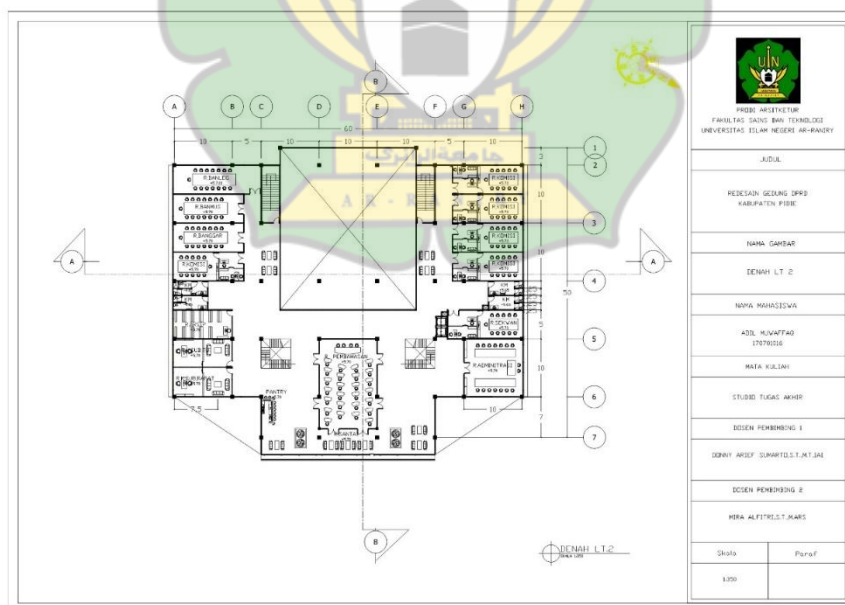
Gambar 6.4: Denah Ground Floor
Sumber: Dokumen Pribadi

6.1.5 Denah Lt. 1



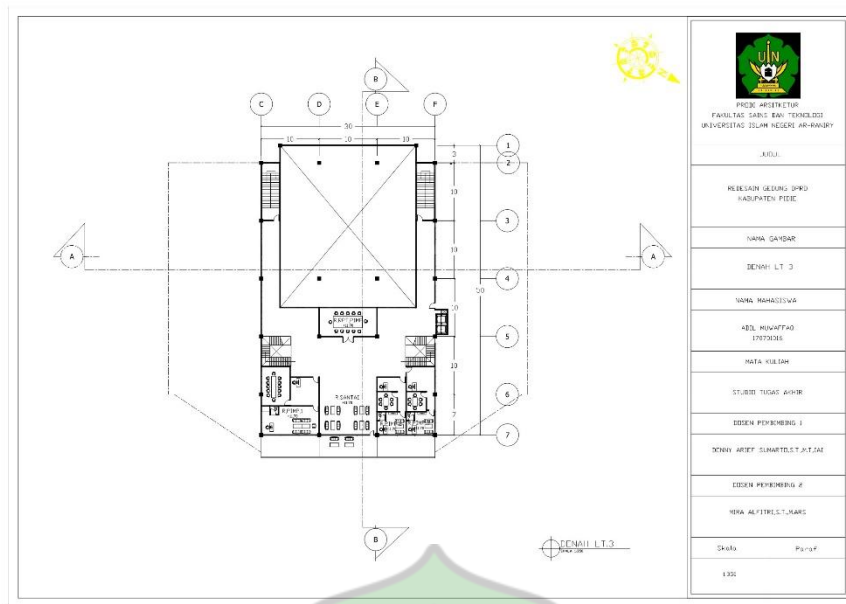
Gambar 6.5: Denah Lt. 1
Sumber: Dokumen Pribadi

6.1.6 Denah Lt. 2



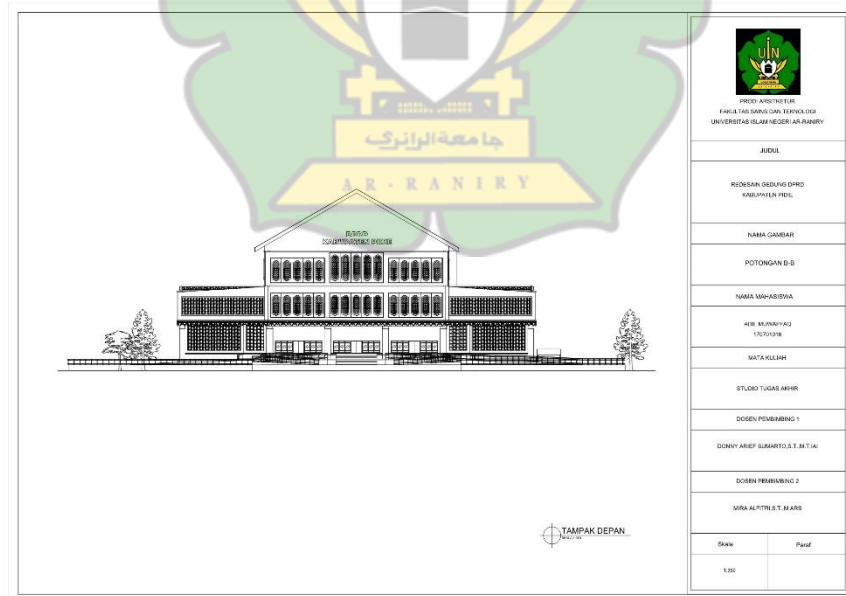
Gambar 6.6: Denah Lt. 2
Sumber: Dokumen Pribadi

6.1.7 Denah Lt. 3



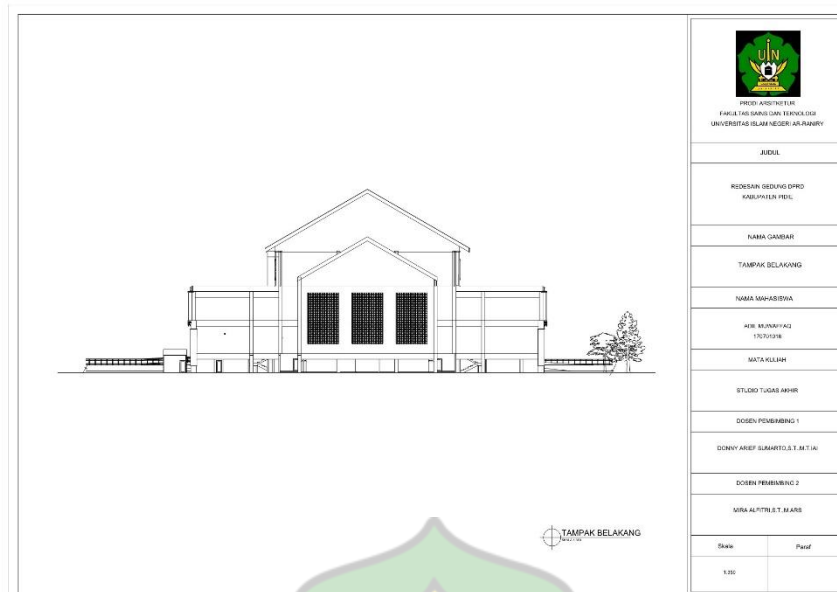
Gambar 6.7: Denah Lt. 3
Sumber: Dokumen Pribadi

6.1.8 Tampak Depan



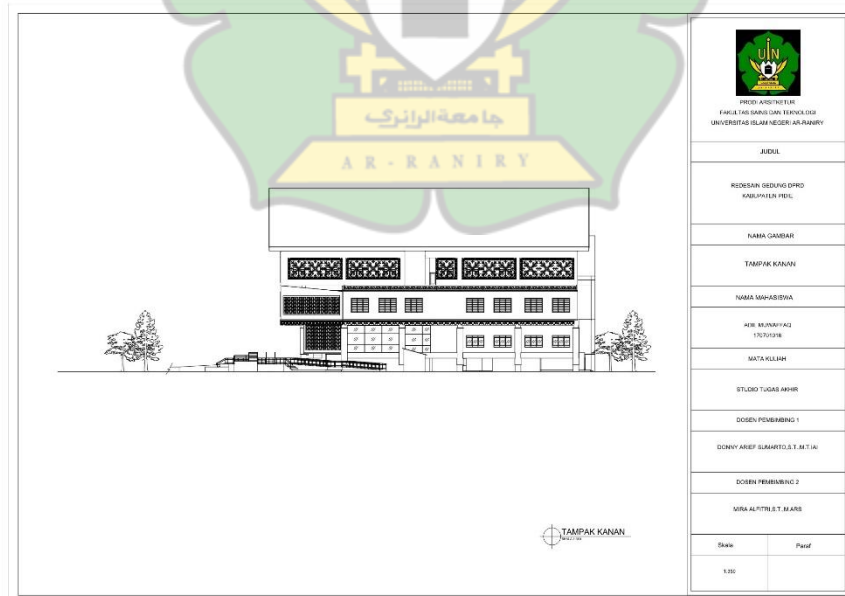
Gambar 6.8: Tampak Depan
Sumber: Dokumen Pribadi

6.1.9 Tampak Belakang



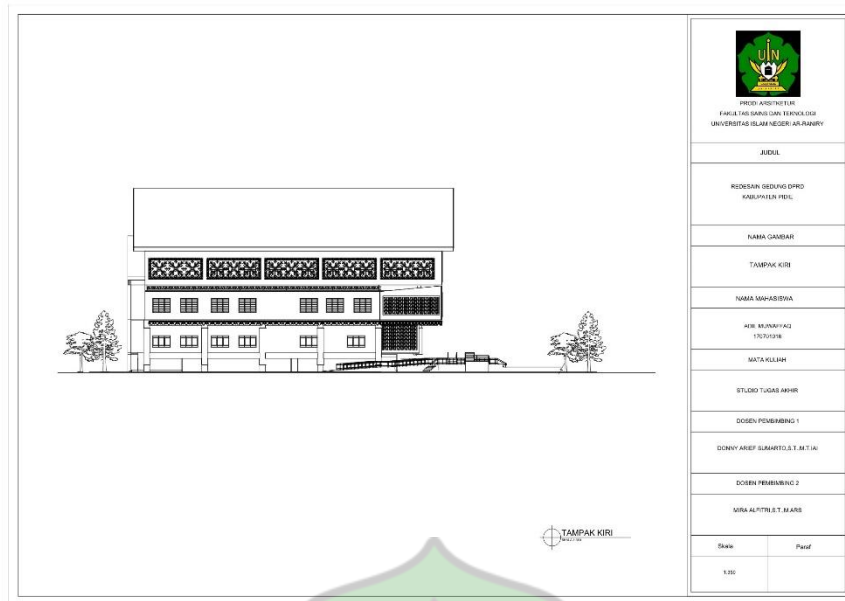
Gambar 6.9: Tampak Belakang
Sumber: Dokumen Pribadi

6.1.10 Tampak Kanan



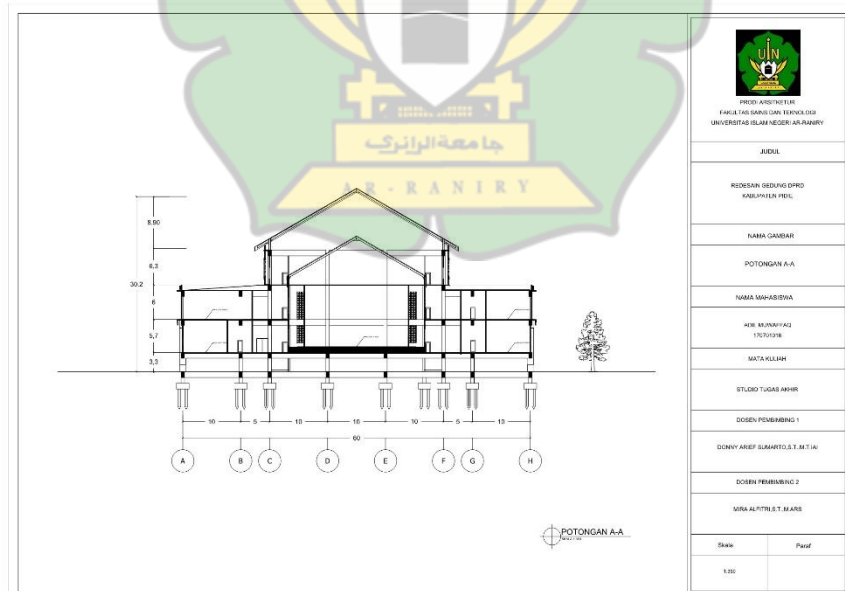
Gambar 6.10: Tampak Kanan
Sumber: Dokumen Pribadi

6.1.11 Tampak Kiri



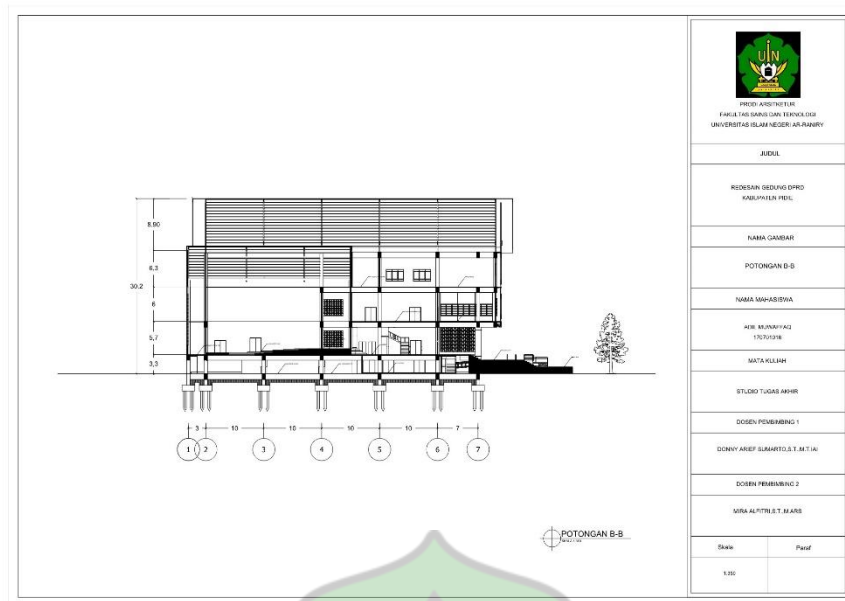
Gambar 6.11: Tampak Kiri
Sumber: Dokumen Pribadi

6.1.12 Potongan A-A



Gambar 6.12: Potongan B-B
Sumber: Dokumen Pribadi

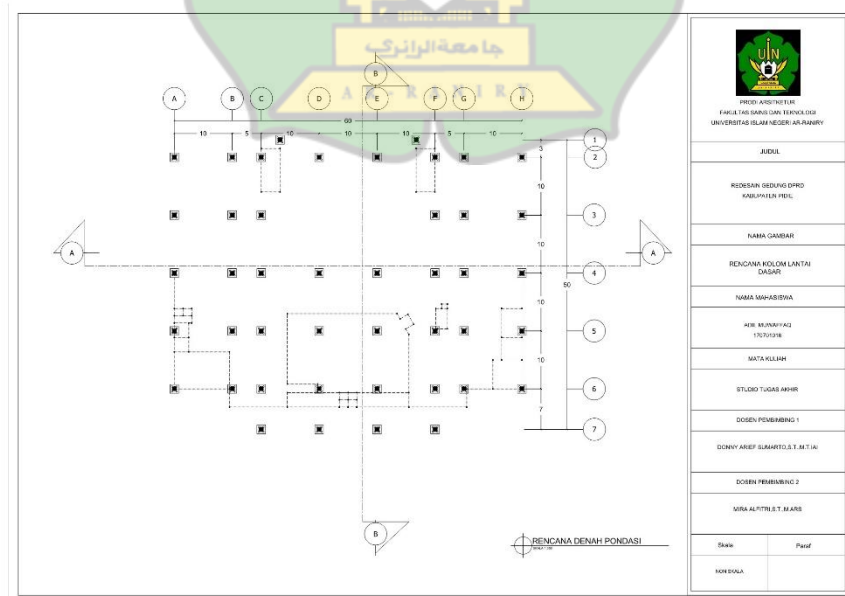
6.1.13 Potongan B-B



Gambar 6.13: Potongan B-B
Sumber: Dokumen Pribadi

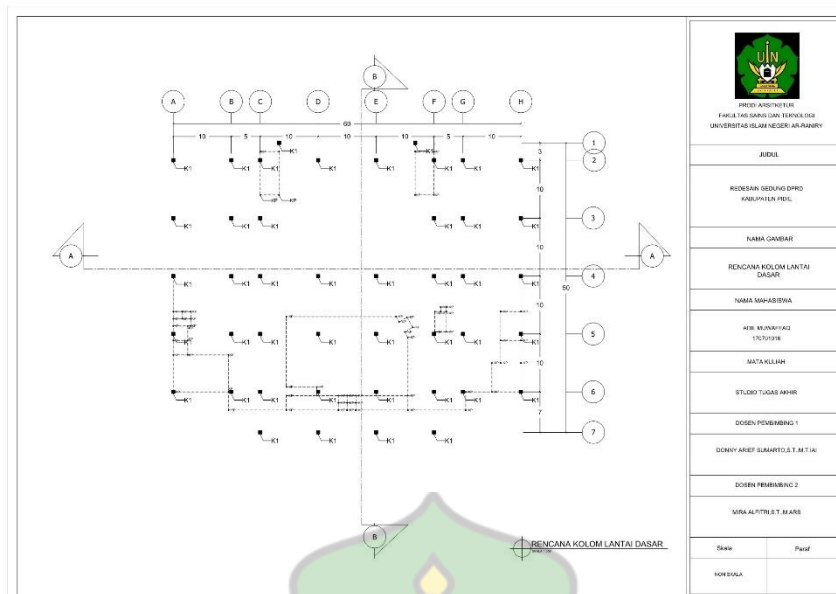
6.2 Gambar Struktural

6.2.1 Rencana Denah Pondasi



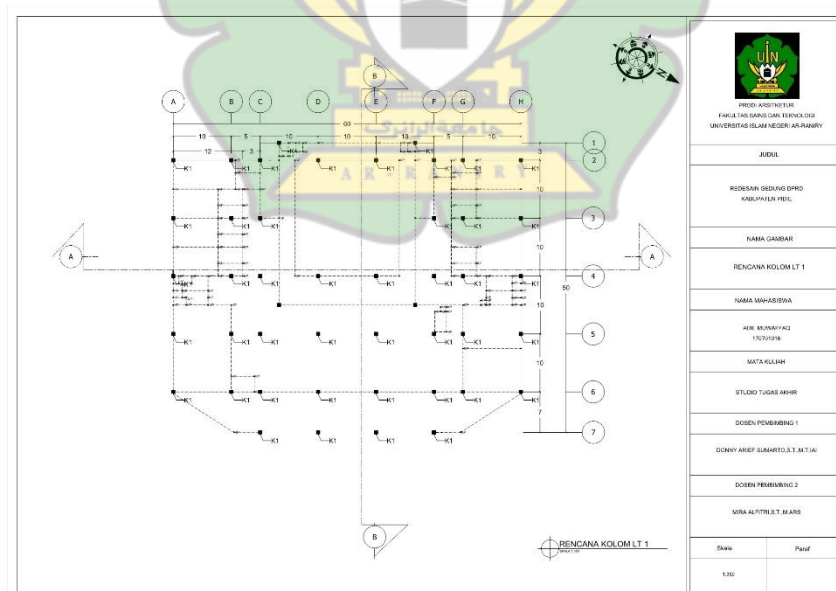
Gambar 6.14: Rencana Denah Pondasi
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.2 Rencana Kolom Lantai Dasar



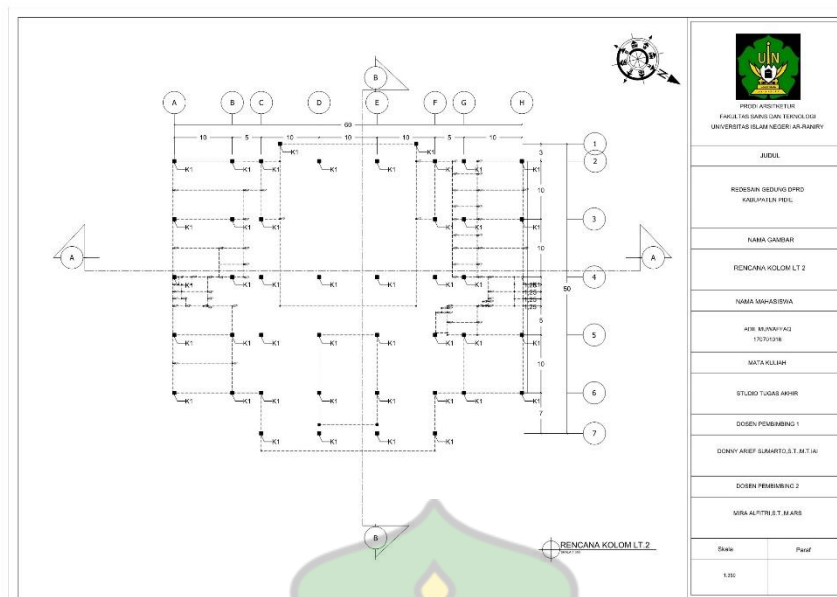
Gambar 6.15: Rencana Kolom Lantai Dasar
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.3 Rencana Kolom Lantai 1



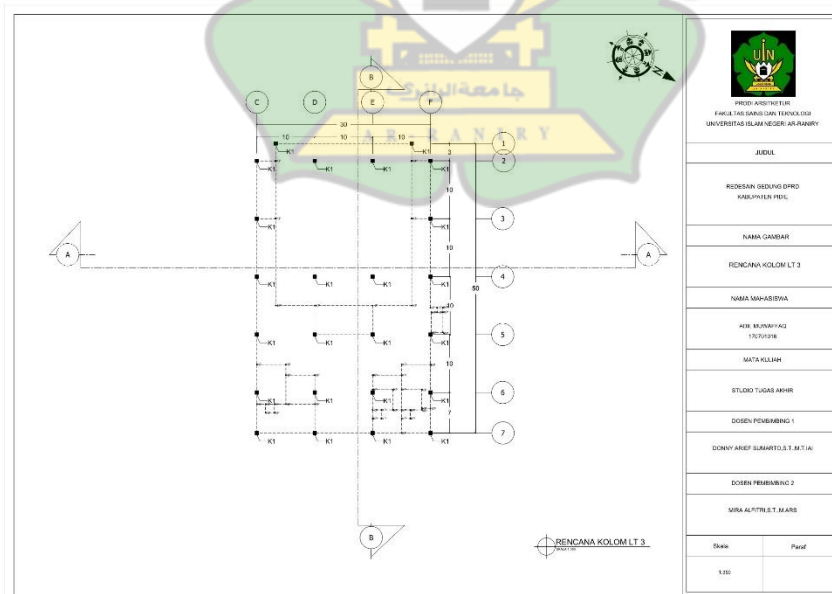
Gambar 6.16: Rencana Kolom Lantai 1
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.4 Rencana Kolom Lantai 2



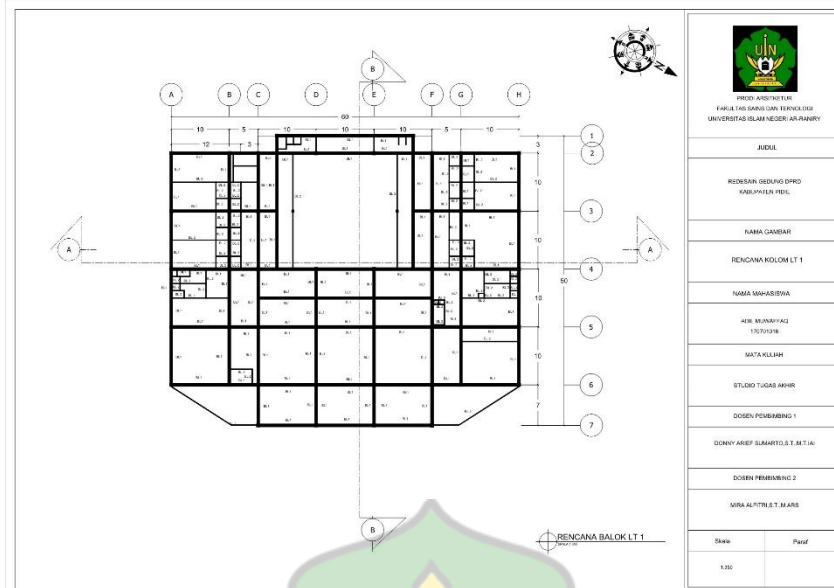
Gambar 6.17: Rencana Kolom Lantai 2
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.5 Rencana Kolom Lantai 3



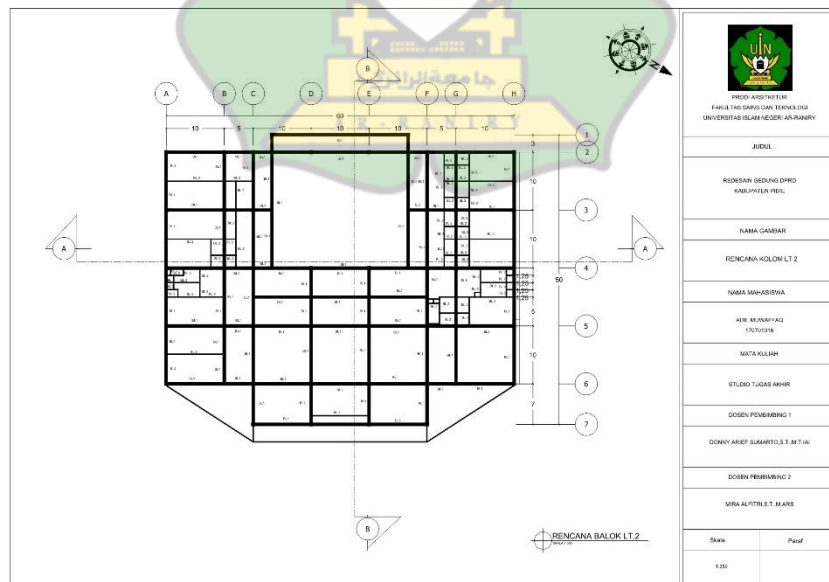
Gambar 6.18: Rencana Kolom Lantai 3
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.6 Rencana Balok Lantai 1



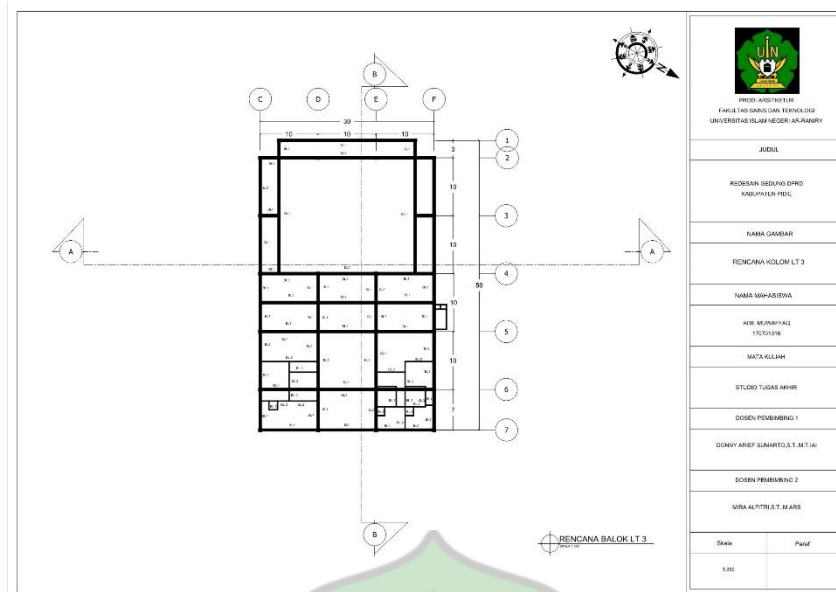
Gambar 6.19: Rencana Balok Lantai 1
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.7 Rencana Balok Lantai 2



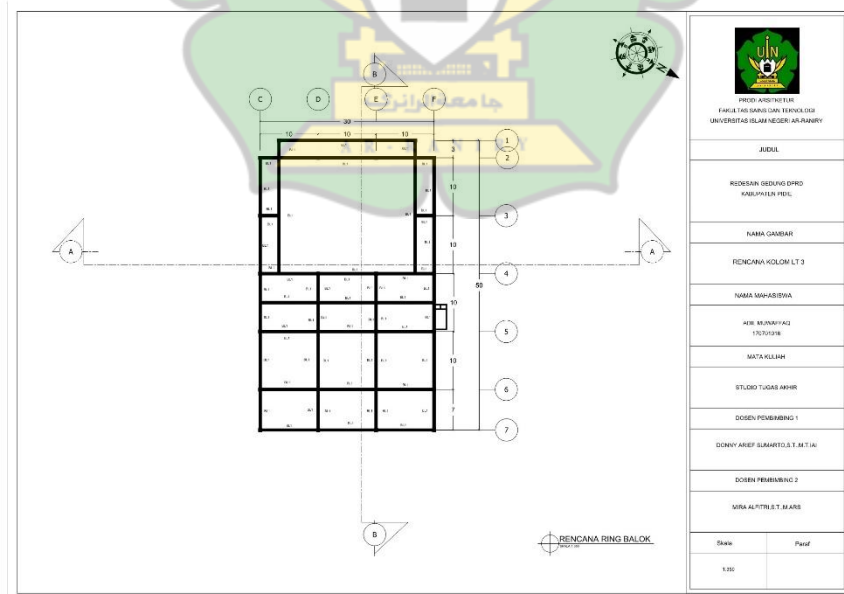
Gambar 6.20: Rencana Balok Lantai 2
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.8 Rencana Balok Lantai 3



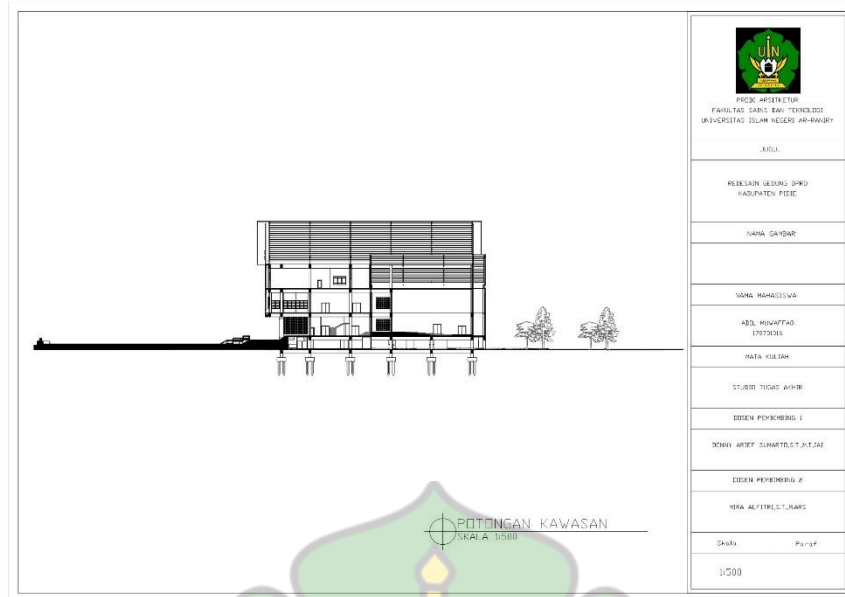
Gambar 6.21: Rencana Balok Lantai 3
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.9 Rencana Ring Balok



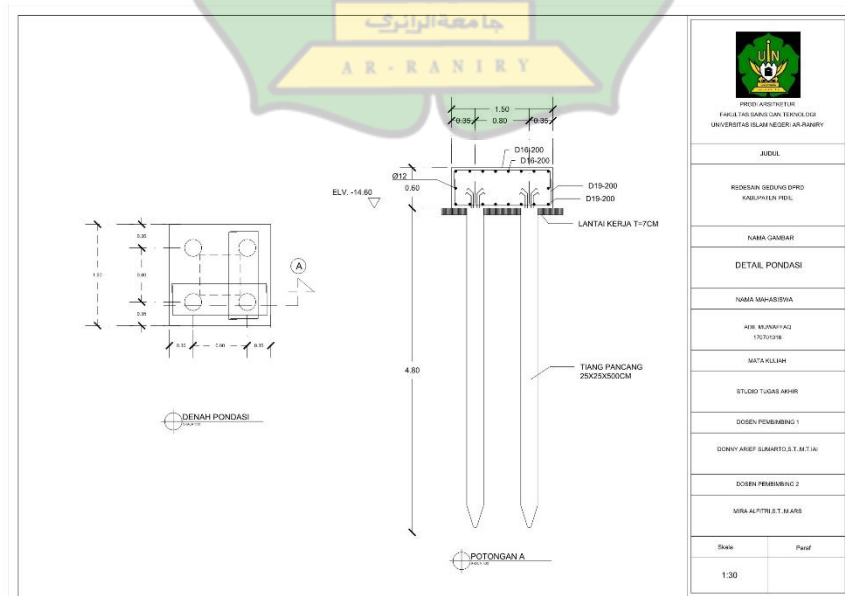
Gambar 6.22: Rencana Ring Balok
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.10 Potongan Kawasan



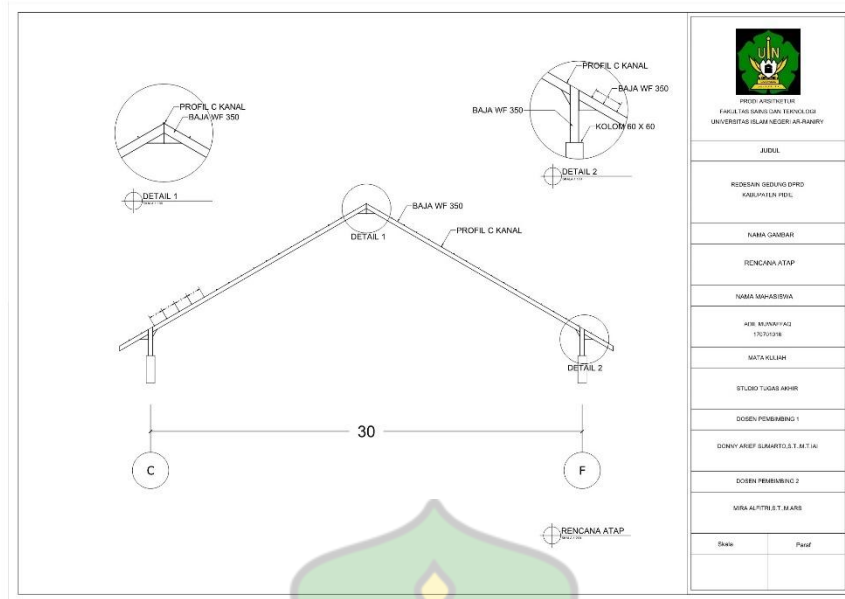
Gambar 6.23: Potongan Kawasan
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.11 Denah Pondasi



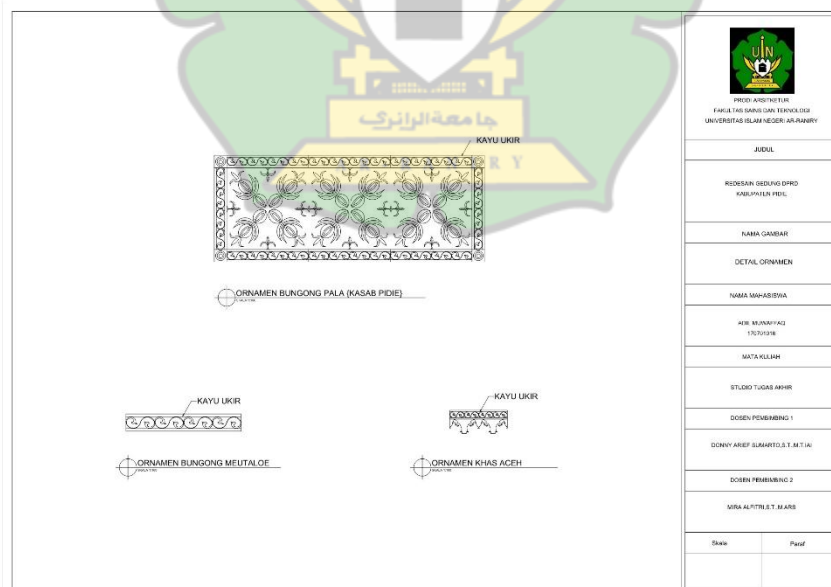
Gambar 6.24: Denah Pondasi
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.12 Rencana Atap



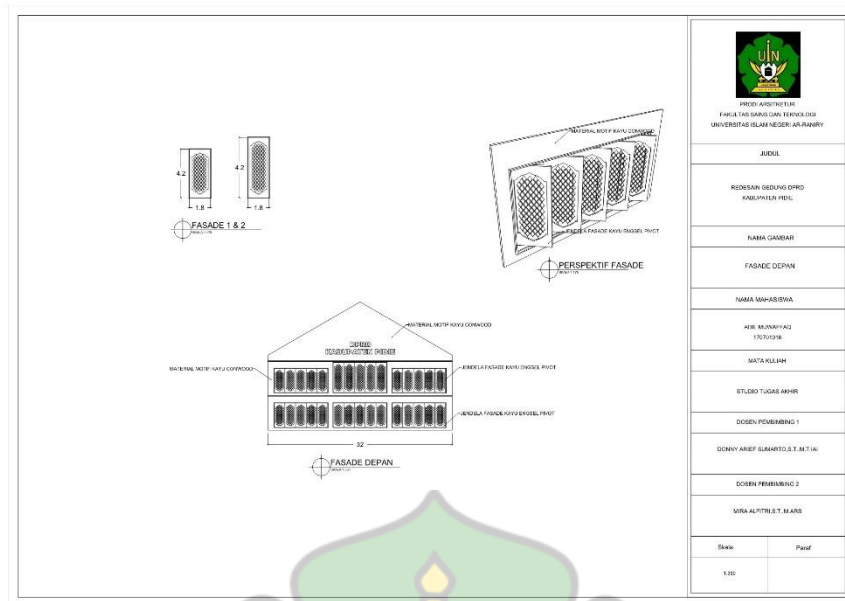
Gambar 6.25: Rencana Atap
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.13 Detail Ornamen



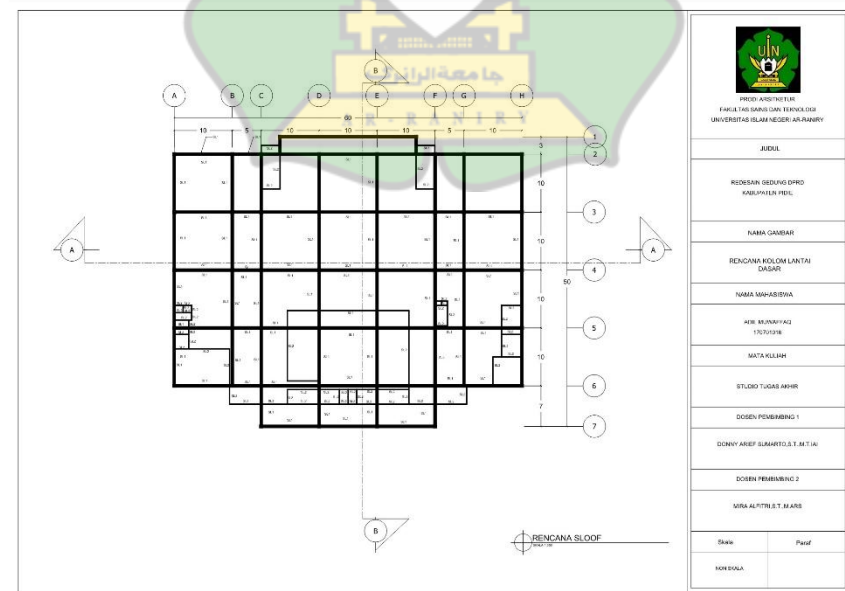
Gambar 6.26: Detail Ornamen
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.14 Detail *Facade*



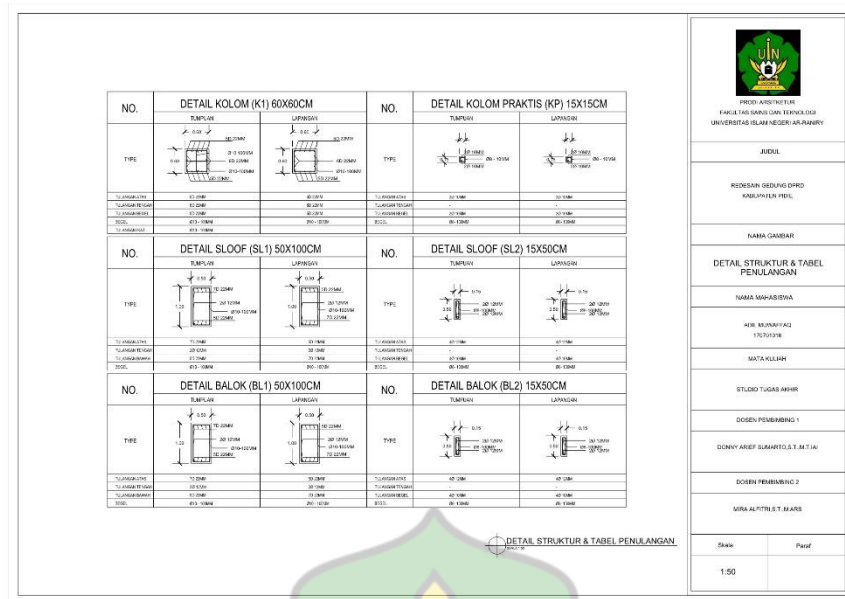
Gambar 6.27: Detail *Facade*
Sumber: Dokumen Pribadi

6.2.15 Rencana Sloof



Gambar 6.28: Rencana Sloof
Sumber: Dokumen Pribadi

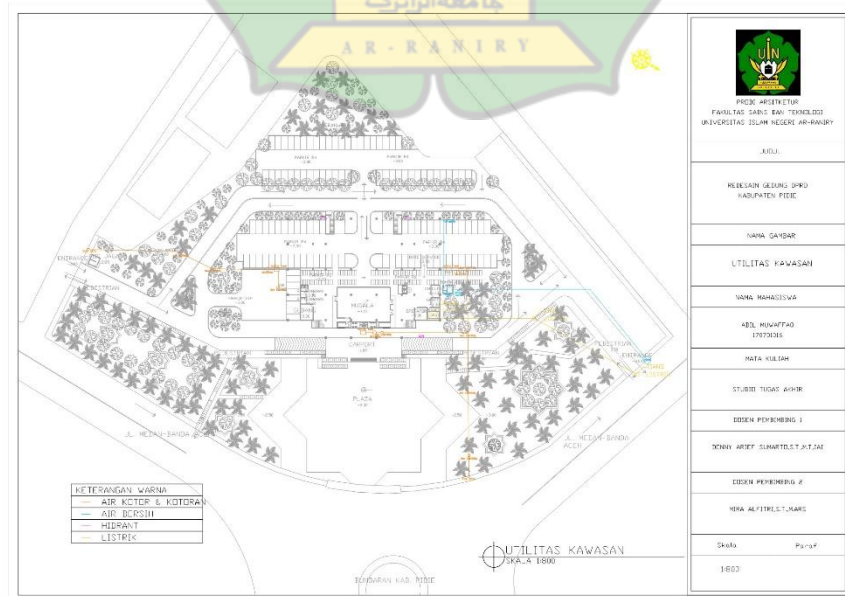
6.2.16 Detail Struktural & Tabel Penulangan



Gambar 6.29: Detail Struktural & Tabel Penulangan
Sumber: Dokumen Pribadi

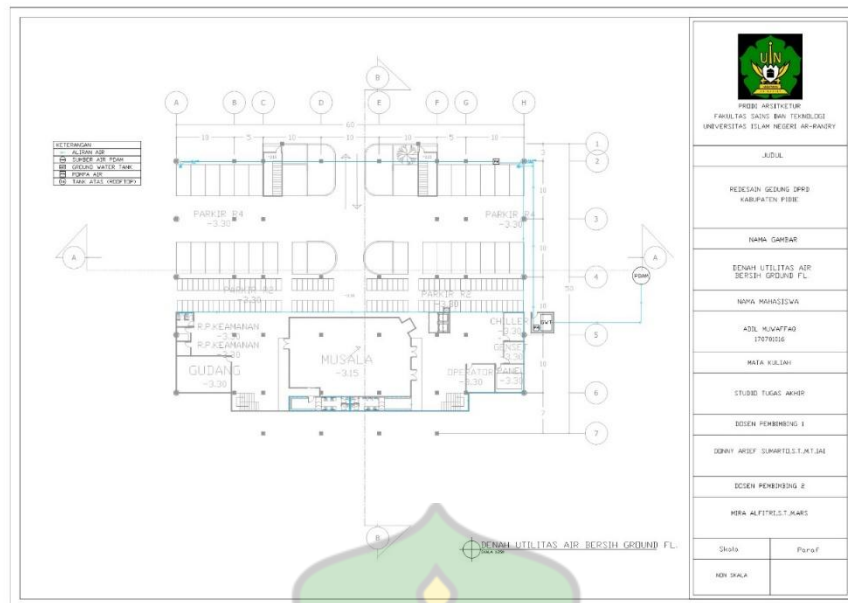
6.3 Gambar Utilitas

6.3.1 Utilitas Kawasan



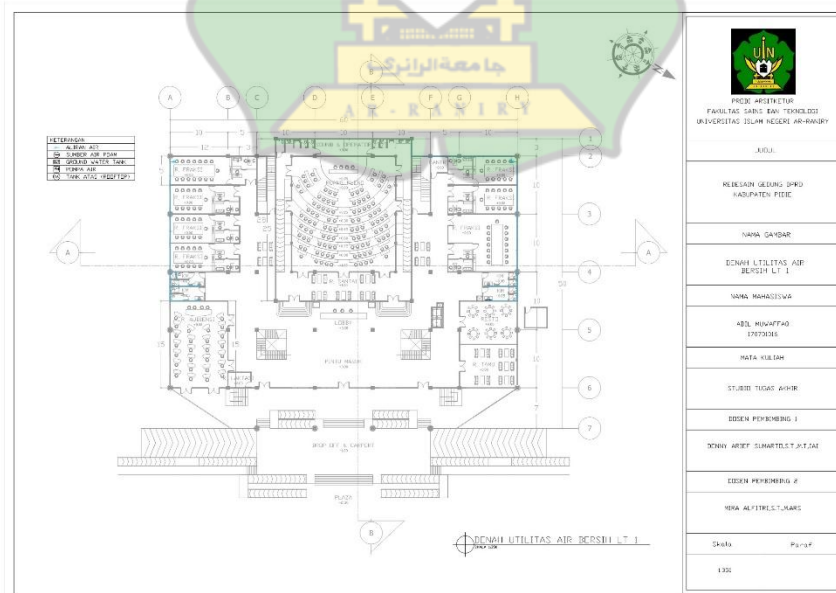
Gambar 6.30: Utilitas Kawasan
Sumber: Dokumen Pribadi

6.3.2 Denah Utilitas Air Bersih *Ground Floor*



Gambar 6.31: Denah Utilitas Air Bersih *Ground Floor*
Sumber: Dokumen Pribadi

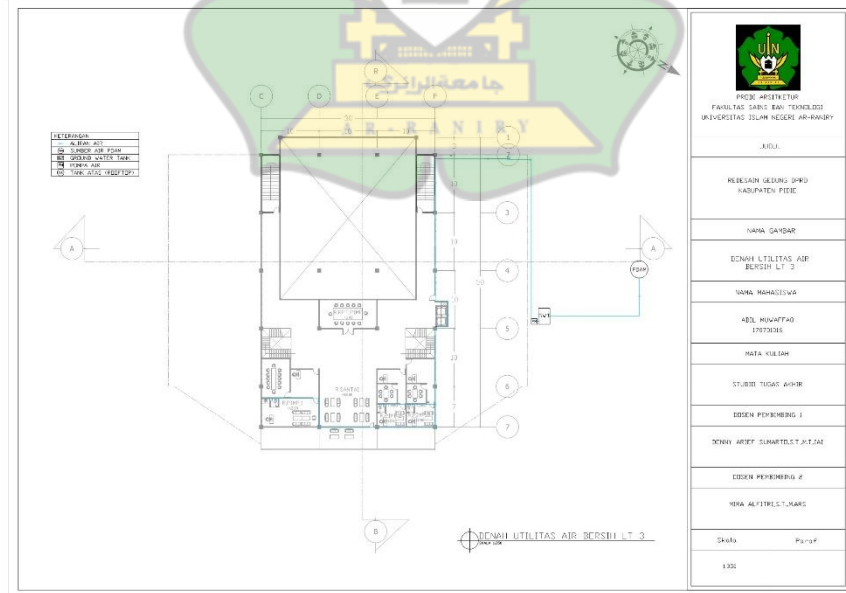
6.3.3 Denah Utilitas Air Bersih Lantai 1



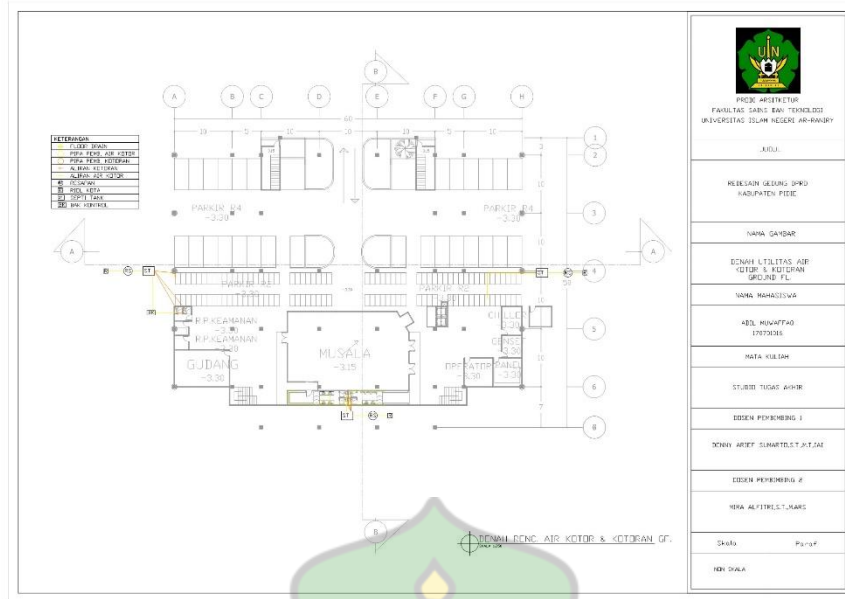
Gambar 6.32: Denah Utilitas Air Bersih Lantai 1
Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 6.33: Denah *Utilitas* Air Bersih Lantai 2
Sumber: Dokumen Pribadi

Gambar 6.34: Denah Utilitas Air Bersih Lantai 3
Sumber: Dokumen Pribadi

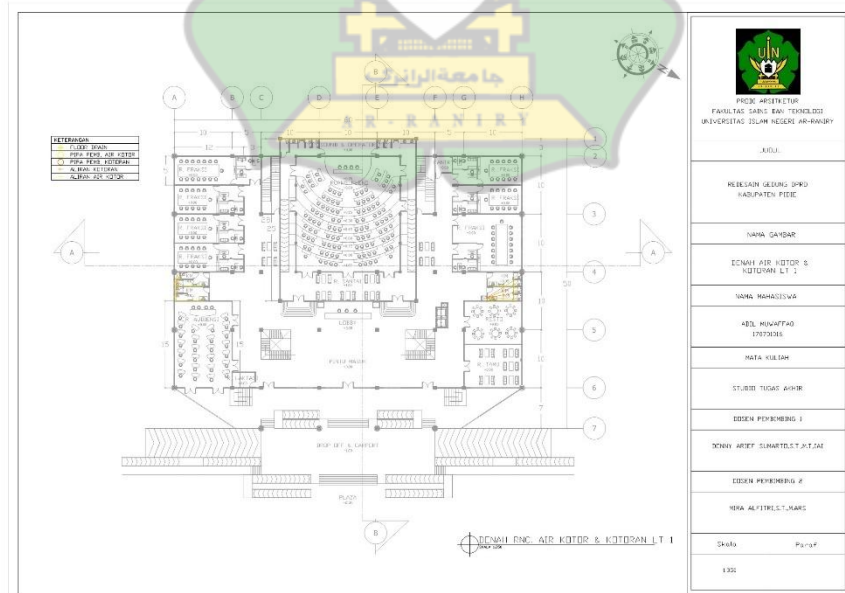


6.3.6 Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran *Ground Floor*



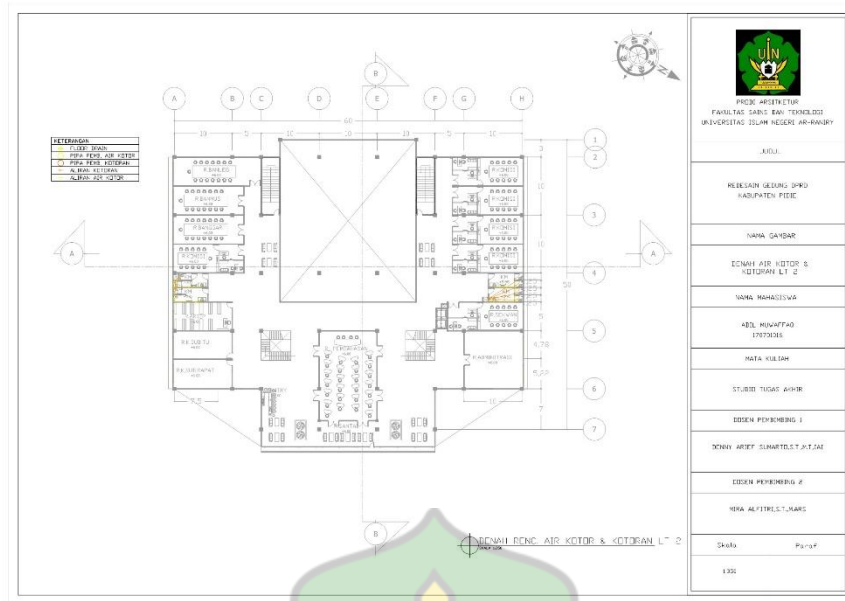
Gambar 6.35: Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai *Ground Floor*
Sumber: Dokumen Pribadi

6.3.7 Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai 1



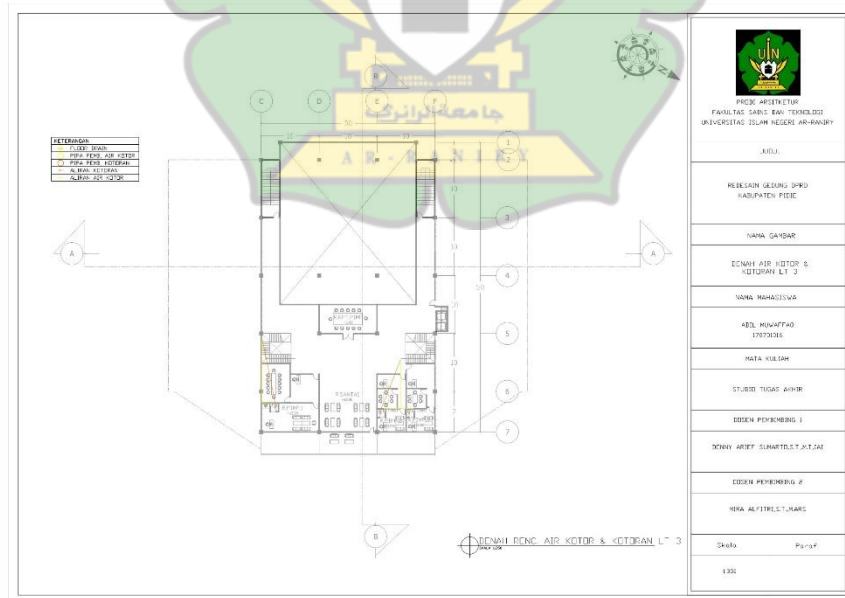
Gambar 6.36: Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai 1
Sumber: Dokumen Pribadi

6.3.8 Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai 2



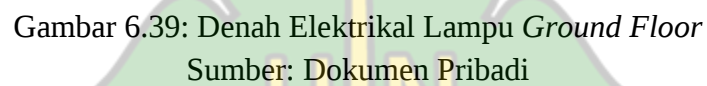
Gambar 6.37: Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai 2
Sumber: Dokumen Pribadi

6.3.9 Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai 3



Gambar 6.38: Denah Utilitas Air Kotor & Kotoran Lantai 2
Sumber: Dokumen Pribadi

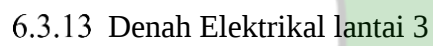
6.3.11 Denah Elektrikal Lampu Lantai 1



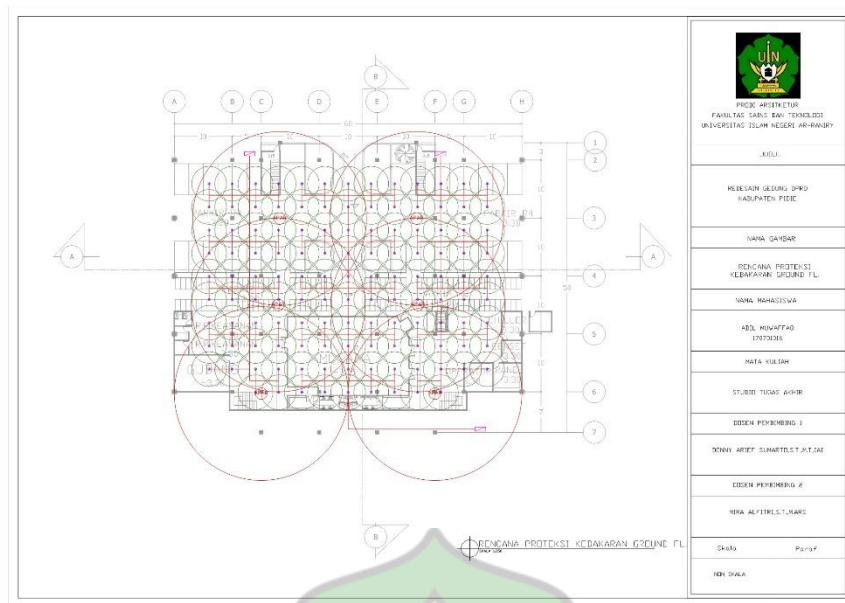
6.3.11 Denah Elektrikal Lampu Lantai 1



Gambar 6.41: Denah Elektrikal Lampu Lantai 2
Sumber: Dokumen Pribadi

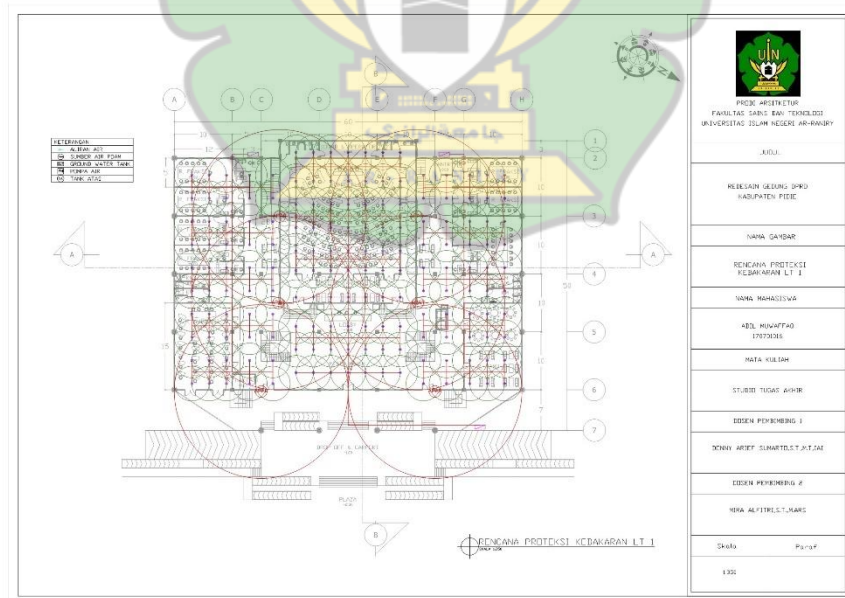


6.3.14 Denah Rencana Proteksi Kebakaran *Ground Floor*



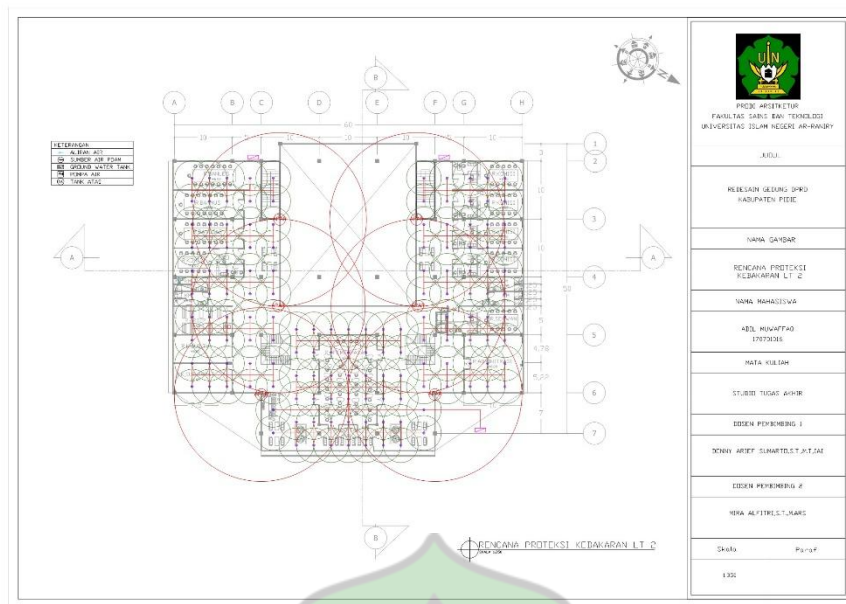
Gambar 6.43: Denah Proteksi Kebakaran *Ground Floor*
Sumber: Dokumen Pribadi

6.3.15 Denah Proteksi Kebakaran Lantai 1



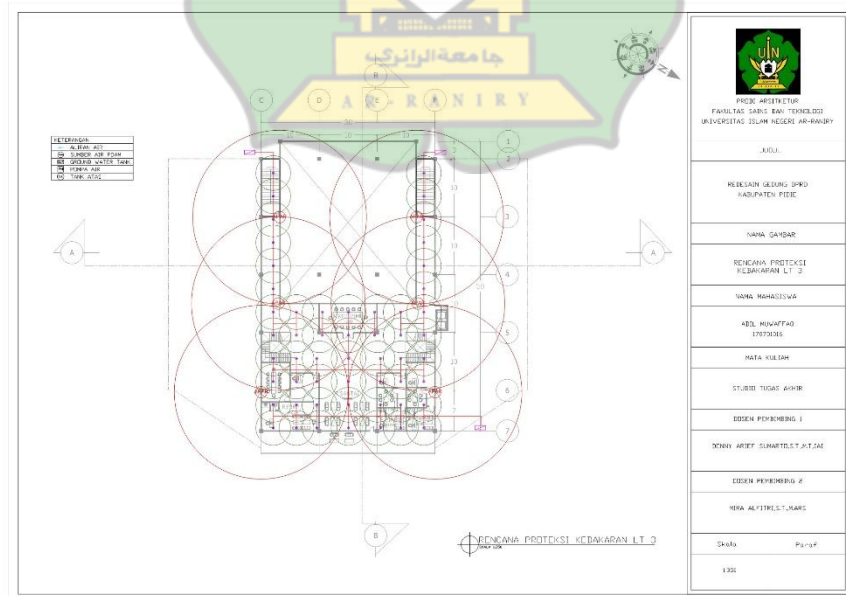
Gambar 6.44: Denah Proteksi Kebakaran Lantai 1
Sumber: Dokumen Pribadi

6.3.16 Denah Proteksi Kebakaran Lantai 2



Gambar 6.45: Denah Proteksi Kebakaran Lantai 2
Sumber: Dokumen Pribadi

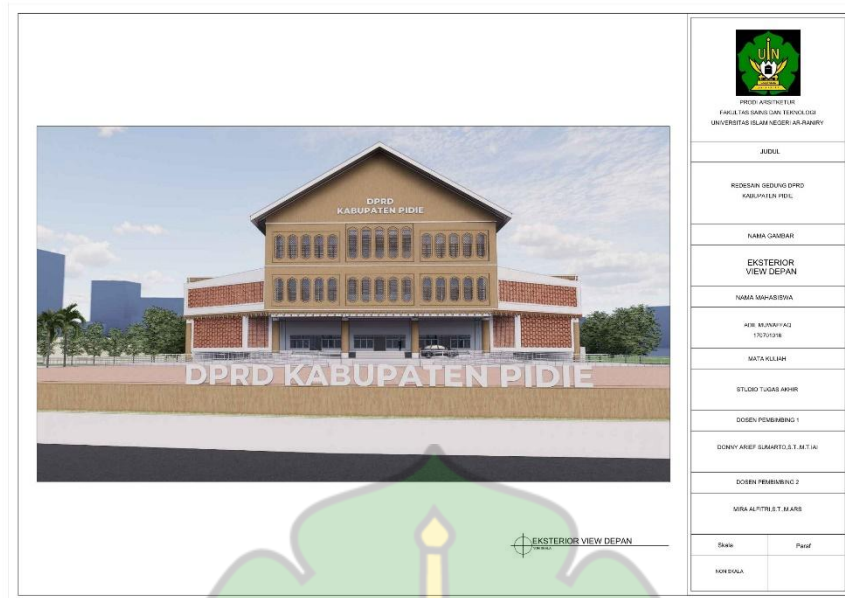
6.3.17 Denah Proteksi Kebakaran Lantai 3



Gambar 6.46: Denah Proteksi Kebakaran Lantai 3
Sumber: Dokumen Pribadi

6.4 Render Eksterior & Interior

6.4.1 Render Exterior



Gambar 6.47: Render Exterior Depan
Sumber: Dokumen Pribadi



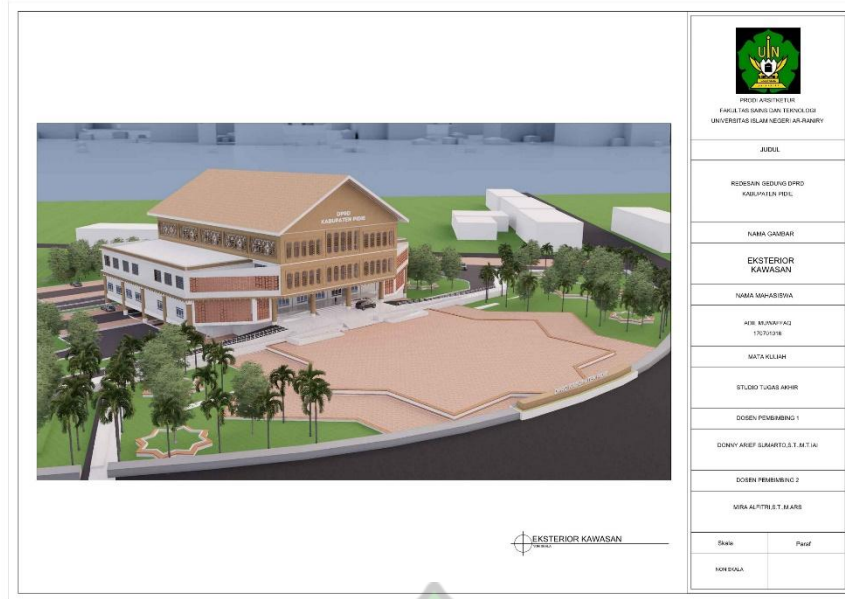
Gambar 6.48: Render Exterior Samping Kanan
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 6.49: Render Exterior Belakang
Sumber: Dokumen Pribadi

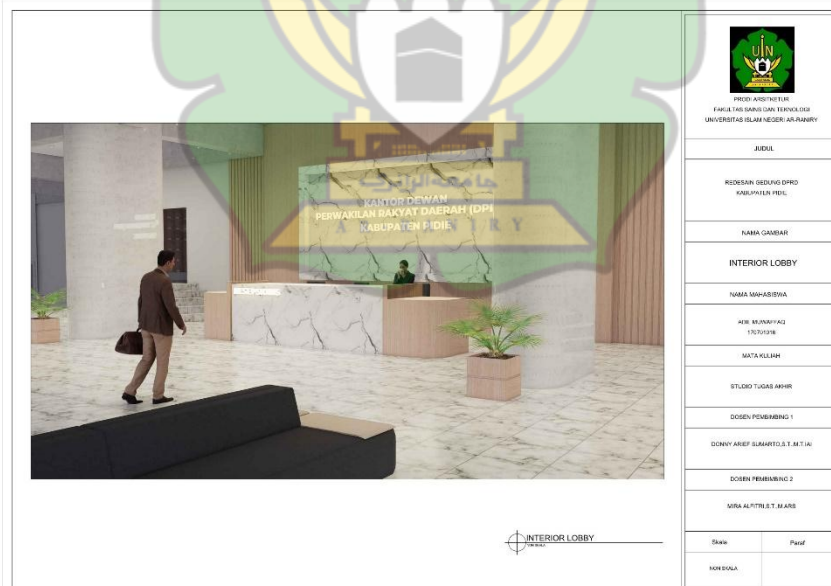


Gambar 6.50: Render Exterior Samping Kiri
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 6.51: Render Exterior Kawasan
Sumber: Dokumen Pribadi

6.4.2 Render Interior



Gambar 6.52: Render Interior Lobby
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 6.53: Render Interior Ruang Pembahasan
Sumber: Dokumen Pribadi



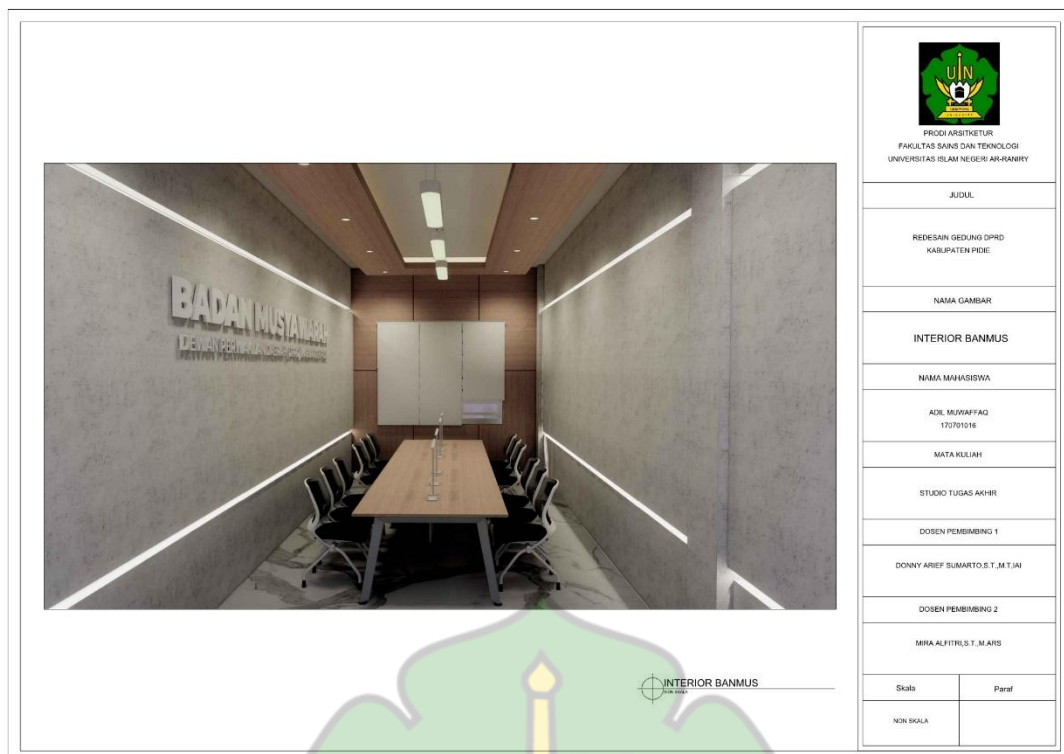
Gambar 6.54: Render Interior Ruang Pimpinan
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 6.55: Render Interior Ruang Pleno
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 6.56: Render Interior Ruang Tamu
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 6.57: Render Interior Ruang Banmus
Sumber: Dokumen Pribadi

DAFTAR PUSTAKA

- arch daily. (2012). *Asakusa Culture and Tourism Center / Kengo Kuma & Associates*. Arch Daily. <https://www.archdaily.com/251370/asakusa-culture-and-tourism-center-kengo-kuma-associates>
- Badan Pusat Statistik Aceh. (2019). *No Title*. BPS Aceh. <https://aceh.bps.go.id/indicator/12/55/1/jumlah-penduduk.html>
- Bevan, R. (2015). *Parliament building in Valletta, Malta by Renzo Piano Building Workshop*. The Architectural Review. <https://www.architectural-review.com/today/parliament-building-in-valletta-malta-by-renzo-piano-building-workshop>
- bundesrat. (n.d.). *the Bundesrat building*. <https://www.bundesrat.de/EN/organisation-en/gebaeude-en/gebaeude-node-en.html>
- DPR-RI. (2008). *undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*.
- DPR-RI. (2009). *UU NO.27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT*.
- Etawau.com. (2019). *Sarawak states legislative Assembly, Kuching city*. http://www.etawau.com/Geography/Sarawak/01_Kuching/District_Kuching/Kuching/Government/Authority/NewDunSarawakComplex.htm
- Fajrine, G., Purnomo, A. B., Juwana, J. S., Jurusan, M., & Fakultasteknik, A. (2017). *Penerapan Konsep Arsitektur Neo Vernakular Pada Stasiun Pasar Minggu*. 85–91.
- Farahimakbar. (n.d.). *Istana Budaya*. https://issuu.com/farahimakbar/docs/group_c-_assignment_1.a_precedent_studies_
- Hawa, S. (2022). *jenis kegiatan dewan*.
- Mahfuddin Ismail, S. P. (2021). *wawancara dengan bapak mahfudin ismail, ketua DPRD Pidie*.
- Pemerintah Kabupaten Pidie. (2015). *Pemkab Pidie Rencanakan Bangun Gedung DPRK Baru*. <http://pidiekab.go.id/2015/11/pemkab-pidie-rencanakan-bangun-gedung-dprk-baru/>

- Permen PU. (2007). *permen PU no.45 tahun 2007 tentang pedoman teknis pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN)*.
- Pidie, K., Lembaran, T., Lembaran, T., Republik, N., Nomor, I., Lembaran, T., Republik, N., Lembaran, T., & Republik, N. (2012). *Bismillahirrahmanirrahim dengan nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas rahmat allah yang maha kuasa*.
- purwaningtyas. (2016). *5 jenis konsep arsitektur*. Idea.
<https://ikapurwaningtyas.wordpress.com/2016/01/23/5-jenis-konsep-arsitektur>
- Qanun Kabupaten Pidie. (2015). *QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR : 6 TAHUN 2015*.
- Rahmania, N., Prabowo, H., & Rosnarti, D. (2019). Komparasi Penerapan Arsitektur Neo-Vernakular Pada Elemen Fisik Pusat Budaya Diindonesia Dan Malaysia. *Prosiding SEMINAR NASIONAL 'Komunitas Dan Kota Keberlanjutan'*, September, 326–332.
- Riza, M. (2020). *Rencana Dewan Satukan Gedung Meusapat Ureung Pidie Segera Terwujud*. Waspada.Id. <https://waspada.id/aceh/rencana-dewan-satuan-gedung-meusapat-ureung-pidie-segera-terwujud/>
- SANI, A. A. (2018). Bentuk dan Proporsi Pada Perwujudan Arsitektur Vernakular Bugis (Studi Kasus : Bola Soba Di Kota Watampone,Sulawesi Selatan). *Diponegoro University*, 1, 1–476. <http://eprints.undip.ac.id/59777/>
- UUD 1945. (2008). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Wibowo, H. (2019). *arsitektur neo vernakular*. Docplayer. <https://docplayer.info/47293248-Bab-iii-arsitektur-neo-vernakular.html>